



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

P-RKPD TAHUN 2025

PERUBAHAN

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN
MOROWALI**

BUKU I



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran pemerintah, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan revisi atau perubahan dari RKPD awal.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Morowali.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

P-RKPD Tahun 2025 merupakan revisi atau perubahan dari RKPD Tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan mempertimbangkan perubahan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah;

Pasal 3

Sistematika Dokumen P-RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran kondisi umum daerah;
- c. bab III : rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah ;
- d. bab IV : prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- e. bab V : rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. bab VI : kinerja penyelenggaraan pemerinta daerah; dan
- g. bab VII : penutup.

Pasal 4

Dokumen P-RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) P-RKPD Tahun 2025 disusun mengacu pada RPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045 yang akan diturunkan ke dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) P-RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi PD dalam Penyusunan RKPD dan Penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menggunakan P-RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS dengan DPRD dalam rangka Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pasal 7

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala Bappelitbangda menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD dengan P-RKPD Tahun 2025.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI MOROWALI,
ttd.
IKSAN

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 5 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.
YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika Dokumen P-RKPD.....	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	II-24
2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I tahun 2025.....	II-25
2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah/ Kunci.....	II-71
2.3 Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2025.....	II-91
2.4 Capaian Kinerja Indikator Program.....	II-101

2.5	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Tujuan Pembangunan Daerah	II-143
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi.....	III-2
3.1.2	Proyeksi Perekonomian Kabupaten Morowali di Tahun 2025.....	III-28
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-29
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-31
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-33
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-36
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	IV-1
4.2	Prioritas Pembangunan.....	IV-16
4.2.1	Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025.....	IV-16
4.2.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2025.....	IV-17
4.3	Inovasi daerah	IV-52
BAB V	RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1	Rencana Program Prioritas.....	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1
7.1	Kaidah Pelaksanaan.....	VII-1
7.2	Kesimpulan.....	VII-3

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1	Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.....	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Morowali.....	II-1
Gambar 2.2	Dampak ancaman bencana masing – masing kecamatan di Kabupaten Morowali.....	II-9
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-6
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024.....	III-6
Gambar 3.3	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-9
Gambar 3.4	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024.....	III-9
Gambar 3.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024.....	III-10
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-11
Gambar 3.7	Indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-14
Gambar 3.8	Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	III-15
Gambar 3.9	Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023.....	III-17
Gambar 3.10	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	III-18
Gambar 3.11	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	III-19
Gambar 3.12	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-20
Gambar 3.13	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	III-21
Gambar 3.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-22

Gambar 3.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	III-23
Gambar 3.16	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-24
Gambar 3.17	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	III-25
Gambar 3.18	IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-26
Gambar 3.19	Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	III-28

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jarak setiap kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.2	Potensi Bencana Dan Dampak Yang Ditimbulkan Di Kabupaten Morowali.....	II-8
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-21
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-23
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023 dan 2024.....	II-23
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan I RPD Tahun 2024.....	II-30
Tabel 2.7	IPM Menurut Kab./Kota Se-Sulteng Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	II-33
Tabel 2.8	Inflasi <i>m-to-m</i> dan Komponen Pembentuk Inflasi Tahun 2024.	II-37
Tabel 2.9	Usia Harapan Hidup (UHH) Kab. Morowali Tahun 2023 s/d 2024.....	II-43
Tabel 2.10	RLS dan HLS Kab. Morowali Tahun 2023 s/d 2024.....	II-45
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan II RPD Tahun 2024.....	II-47
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan III RPD..	II-57
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan IV RPD Tahun 2024.....	II-61
Tabel 2.14	Status Desa dan IDM Kabupaten Morowalia Tahun 2024.....	II-66
Tabel 2.15	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan V RPD Tahun 2024.....	II-70
Tabel 2.16	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Morowali Tahun 2022 s/d 2024.....	II-71
Tabel 2.17	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	II-96
Tabel 2.18	Evaluasi Kinerja Program Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025.....	II-102
Tabel 2.19	Permasalahn Pokok Pembangunan Daerah.....	II-143
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 (Persen).....	III-3
Tabel 3.2	PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	III-8

Tabel 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024.....	III-12
Tabel 3.4	IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	III-27
Tabel 3.5	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2025...	III-29
Tabel 3.6	Ringkasan Perubahan Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.....	III-33
Tabel 3.7	Ringkasan Perubahan Belanja Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.....	III-35
Tabel 3.8	Ringkasan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.....	III-37
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	IV-7
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	IV-8
Tabel 4.3	Program Prioritas dan Penanggung Jawab Program.....	IV-12
Tabel 4.4	Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025...	IV-18
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	IV-20
Tabel 4.6	Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Morowali.....	IV-55
Tabel 5.1	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025...	V-1
Tabel 6.1	Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-1
Tabel 6.2	Matriks Indikator dan Target Kinerja Geografi dan Demografi Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	VI-6

DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Grafik 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kab. Moroawali Tahun 2019-2023.....	II-26
Grafik 2.2	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Se-Sulteng Tahun 2024.....	II-26
Grafik 2.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Morowali Tahun 2019-2024.....	II-27
Grafik 2.4	Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Morowali Tahun 2019-2024.....	II-28
Grafik 2.5	Indeks Gini Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-29
Grafik 2.6	IPEI Kabupaten Morowali Tahun 2017-2021.....	II-31
Grafik 2.7	IPM Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-32
Grafik 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-34
Grafik 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Persektor Kab. Morowali Tahun 2022-2024.....	II-35
Grafik 2.10	Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-36
Grafik 2.11	Inflasi Kabupaten Morowali (y-on-y) Tahun 2024.....	II-36
Grafik 2.12	TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2024.....	II-38
Grafik 2.13	TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2024.....	II-39
Grafik 2.14	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Tahun 2019 s.d 2024.....	II-40
Grafik 2.15	Persenatse Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap target PAD Kabupaten Morowali Tahun 2019 s.d 2024.....	II-41
Grafik 2.16	Realsiasi Investasi Kabupaten Morowali tahun 2020 s.d 2024.....	II-42
Grafik 2.17	PMTB Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 (dalam Milyar Rupiah).....	II-42
Grafik 2.18	Prevalensi Stunting Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2024.....	II-44
Grafik 2.19	IRB Kabupaten Morowali tahun 2021-2023.....	II-48
Grafik 2.20	IKM Kabupaten Morowali tahun 2021-2024.....	II-50
Grafik 2.21	SAKIP Kabupaten Morowali tahun 2019-2023.....	II-51
Grafik 2.22	Nilai SPI dan Komponen Perhitungan Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-52
Grafik 2.23	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-53
Grafik 2.24	Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024.....	II-54

Grafik 2.25	Nilai IPKD Kabupaten Morowali Tahun 2022-2024.....	II-54
Grafik 2.26	Opini BPK atas LHP Keuangan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-55
Grafik 2.27	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-56
Grafik 2.28	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024.....	II-59
Grafik 2.29	IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-60
Grafik 2.30	Jumlah Kriminal Kabupaten Morowali Tahun 2021- 2023.....	II-62
Grafik 2.31	IPG Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023.....	II-63
Grafik 2.32	IKD Kabupaten Morowali Tahun 2023.....	II-64
Grafik 2.33	IRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-65

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan P-RKPD merupakan tindak lanjut amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun P-RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Ruang lingkup penyusunan P-RKPD Tahun 2025 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Tahun 2025. Penyusunan P-RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal P-RKPD, rancangan P-RKPD, rancangan akhir P-RKPD dan penetapan P-RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan P-RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa Dokumen P-RKPD ini belum sempurna dalam penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi pemerintah daerah guna penyempurnaan Dokumen ini pada khususnya dan bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali pada umumnya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Morowali serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Morowali.

BUPATI MOROWALI

I K S A N



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor : 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Morowali guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, melalui sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat 5 menyebutkan bahwa RKPD dapat di ubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) s/d (9) disebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan/atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6841.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ

- tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tanggal 25 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor ...);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 28 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 028 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0316);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 12);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 71118);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 115,28);
 31. Peraturan Bupati Morowali Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor: 023).

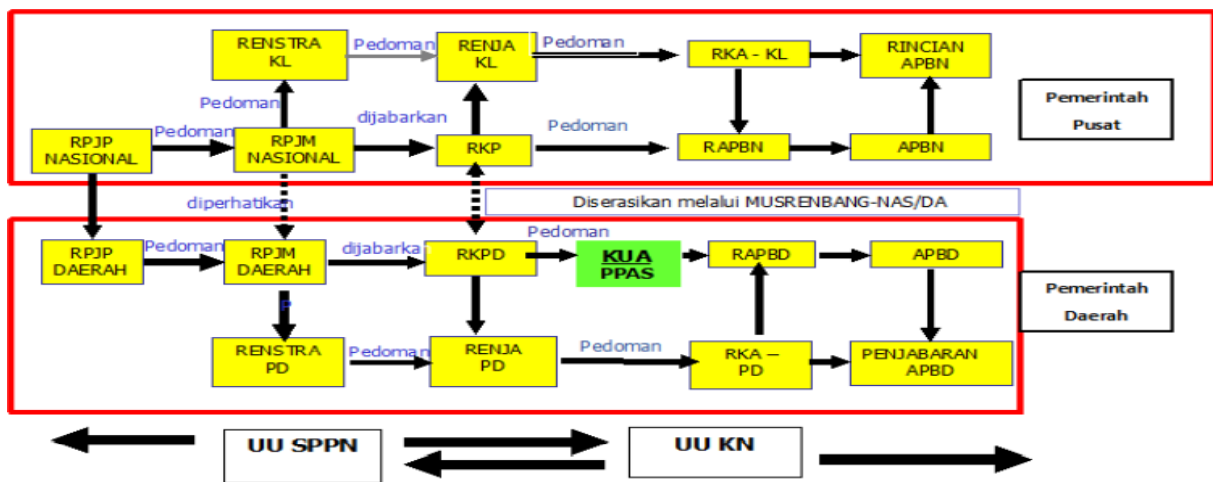
32. Peraturan Bupati Morowali Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor: 038);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, Perubahan RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Perubahan RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) P-RPJMD/RPD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Perubahan Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Selain itu Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap memperhatikan hasil Review APIP Inspektorat Daerah. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Sumber : diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1
keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

Mengacu pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
2. Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah/ RPD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
3. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
4. Perubahan RKPD nantinya dijabarkan ke dalam Perubahan RAPBD dengan berpedoman juga kepada Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2025, Perubahan RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025 – 2045 yang dituangkan kedalam Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026. Selain itu kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kedudukan RKPD Morowali.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025 yaitu untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan daerah Kabupaten Morowali sebagai akibat dari adanya beberapa perubahan asumsi yang sudah di tetapkan, sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025. Sedangkan Tujuan Perubahan RKPD 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, antar sektor pembangunan, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dengan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Serta Program Asta Cita Sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900.1.1/640/SJ;
3. Adanya Efesinesi belanja pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 tahun 2025;
4. Sebagai Dasar bagi Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) terutama indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.5 Sistematika Dokumen P-RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan memuat uraian tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat tentang : Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Morowali Tahun 2025 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya, Permasalahan Pembangunan Daerah.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat uraian tentang : Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2025 serta Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah memuat uraian tentang perubahan Tujuan, Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat uraian tentang perubahan rencana program dan kegiatan masing – masing urusan pemerintahan daerah beserta Perangkat Daerah pengampunya di sertai perubahan kerangka pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025.
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memaut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB VII Penutup



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

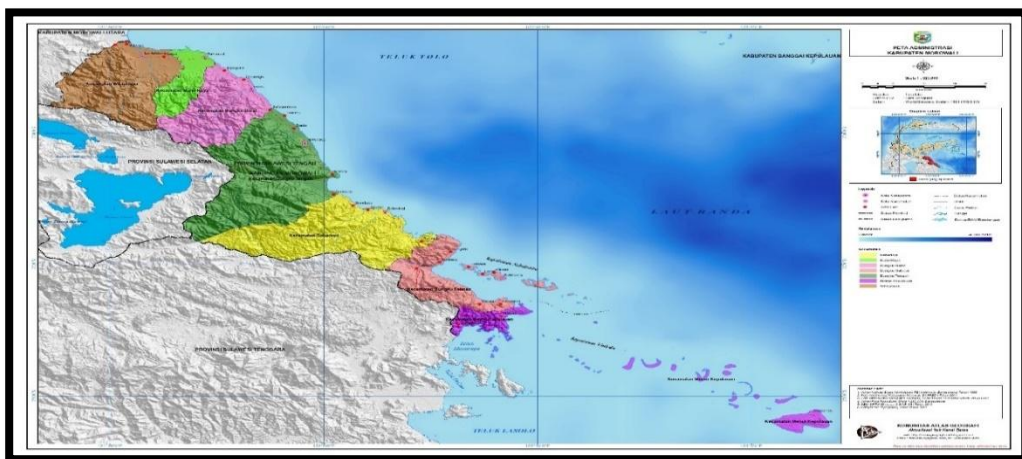
2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 dengan luas wilayah 15.490,12 km² atau 22,77 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota Kabupaten di Kolonodale. Dengan terbentuknya dan berpisahnya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013 sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara, maka luas wilayah Kabupaten Morowali terjadi perubahan menjadi 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yang hanya memiliki luas 223,63 km². selengkapnya tertera pada peta administratif Kabupaten Morowali pada Gambar 2.1.



Sumber : <https://sulteng.bpk.go.id/peta-administrasi-kabupaten-morowali>

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kab. Morowali

Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali sebanyak 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Menui Kepulauan dan Pada tahun 2023 dilakukan pemekaran Wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan. Kecamatan Sombori Kepulauan merupakan pemekaran dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Menui Kepulauan; dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Bungku Selatan. Kecamatan Sombori Kepulauan memiliki wilayah seluas 267,78 Km². Cakupan wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan terdiri atas 13 (tiga belas) Desa meliputi :

1. Desa Tanjung Harapan seluas 12,90 Km² ;
2. Desa Matano seluas 13,79 Km²;
3. Desa Tanona seluas 7,10 Km²;
4. Desa Tanjung Tiram seluas 9,00 Km²;
5. Desa Matarape seluas 20,03 Km²;
6. Desa Mbokita seluas 7,07 Km²;
7. Desa Dongkalan seluas 13,01 Km²;
8. Desa Pulau Tengah seluas 3,2 Km²;
9. Desa Masadian seluas 6,03 Km²;
10. Desa Pulau Tiga seluas 3,85 Km²;
11. Desa La Lemo seluas 48,09 Km²;
12. Desa Lamontoli seluas 118,70Km²; dan
13. Desa Pulau Dua Darat seluas 5,01 Km².

Adapun luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali selengkapnya tertera pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jarak setiap kecamatan
di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Kecamatan	Luas (Km2)	%	Desa	Kel.	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Mill Laut/ Km)
Menui Kepulauan	127.65	2.33	13	1	Ulunambo	99
Bungku Tengah	725.57	13.26	13	6	Marsaoleh	0
Bungku Selatan	232.1	4.24	23	0	Kaleroang	64
Bahodopi	1,080.98	19.75	12	0	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867.29	15.85	10	0	Lafeu	75
Bungku Timur	387.23	7.08	10	0	Kolono	18
Bungku Barat	758.93	13.87	10	0	Wosu	27
Bumi Raya	504.77	9.22	13	0	Bahonsuai	48
Witaponda	519.7	9.50	9	0	Laantula Jaya	61
Sombori Kepulauan	267.78	4.89	13	0	Tanjung Harapan	-
Jumlah	5,472.00	100,00	126	7		

Sumber : Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

2.1.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Morowali terletak antara 01° 31'12" Lintang Selatan dan 03°46' 48" Lintang Selatan serta antara 121°02' 24" Bujur Timur dan 123°15'36" Bujur Timur. Jika ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil.

Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Wilayah daratan Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat; 2) Wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2019). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di dua kecamatan yakni Menui Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerengan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen).

berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sangat curam), 11,70 % luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), 12,56 % luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 % dan 23,30 % luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 % (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 %. Namun demikian, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar.

2.1.1.1.4. Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: - Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), dijumpai di sekitar sungai besar; - Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; - Vulkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; - Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung.

Berikut adalah uraian tentang kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan eksplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun nikel yang terdapat di wilayah Banggai dan Morowali (menerus sampai ke wilayah Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tenggara) sampai saat ini masih dalam tahapan eksplorasi. Berdasarkan data statistik Tahun 2006, produksi minyak dan gas bumi telah berlangsung sejak Tahun 2005, dengan nilai produksi Tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar Rp 63,2 milyar dan Rp 225,1 milyar, dengan laju pertumbuhan sebesar 158,79 persen. Dengan persentase kontribusi masih senilai 1,16 persen jika nilai ini digabungkan dengan produksi pertambangan bahan galian mineral yang berkontribusi sebesar 1,75 persen, maka total kontribusi sektor pertambangan adalah 2,91 persen, masih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar yaitu 44,80 persen. Kegiatan penambangan nikel sebetulnya berskala besar telah dan sedang dilakukan bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan di mana sebagian lahan permukiman (umumnya transmigrasi) dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang sebagaimana terjadi di Kecamatan Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Selatan.

2.1.1.1.5. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Wita Ponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional.

Adapun wilayah sungai tersebut adalah wilayah sungai Laa-Tambalako (1045,6Ha), yang meliputi daerah sungai laa (2.875,6 Ha), DAS Tirongan, DAS Salato, DAS Morowali, DAS Sumare (237,5Ha), DAS Bahombelu dan DAS Bahodopi (246,87Ha). Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah

besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai.

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar. Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan.

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang pernah terjadi dilihat berdasarkan DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko bencana dengan menggunakan teknologi SIG. Tidak menutup kemungkinan potensi bencana lain dapat terjadi di Kabupaten Morowali mengingat faktor-faktor kondisi daerah sehingga analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis untuk memetakan potensi bencana berdasarkan faktor-faktor kondisi daerah.

Jumlah potensi bencana di Kabupaten Morowali berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah. Bencana-bencana yang berpotensi di Kabupaten Morowali terdiri dari banjir, banjir bandang, tanah

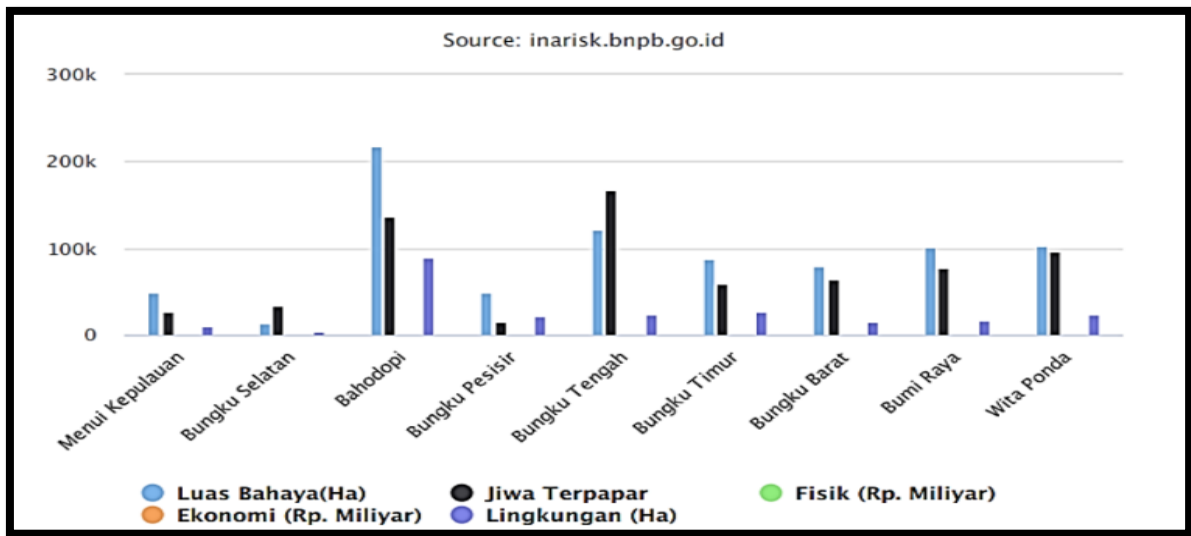
longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Ke sembilan potensi bencana di Kabupaten Morowali tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana Kabupaten Morowali untuk tahun 2022 sampai tahun 2027. Potensi bencana merupakan kemungkinan terjadi suatu bencana dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang pernah terjadi. Potensi tersebut dilihat dari bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah dan kemungkinan terjadi bencana lainnya. Penentuan potensi bencana merupakan langkah awal yang penting dilakukan dalam pengkajian risiko bencana. Dari analisa terhadap bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Morowali dan potensi risiko bencana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNPB, maka terdapat 9 (sembilan) jenis potensi bencana dan dampak yang timbulkan di kabupaten Morowali, bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Potensi Bencana Dan Dampak Yang Ditimbulkan Di Kabupaten Morowali

Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Jiwa Terpapar	Fisik (Rp. Miliar)	Ekonomi (Rp. Miliar)	Lingkungan (Ha)
Gempabumi	129,443	78,438	398.663	552.542	0
Tsunami	8,243	19,988	69.511	8.092	430
Banjir	16,961	59,670	332.73	375.117	434
Banjir Bandang	6,340	3,307	21.157	114.674	57
Tanah Longsor	237,658	15,289	108.982	436.409	85,483
Kebakaran Hutan & Lahan	38,279	0	0	529.85	3,273
Kekeringan	303,705	162,098	0	1,012.25	138,138
Cuaca Ekstrim	39,127	128,144	1,145.204	839.344	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	16,961	59,670	332.73	375.117	434

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Sementara dampak yang ditimbulkan akibat bencana terhadap luas bahaya, Jiwa terpapar, fisik, ekonomi dan lingkungan per kecamatan di wilayah kabupaten Morowali dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.2
Dampak ancaman bencana masing - masing kecamatan di Kabupaten Morowali

2.1.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di dimanfaatkan untuk pengairan.

Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (run off) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (catchment area), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan November dengan Curah Hujan 333 mm³ dengan selama 11 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Maret dengan Curah Hujan 332 mm³ selama 16 hari hujan, pada Bulan Mei masa paling lama hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan September dengan Curah Hujan 52 mm³ selama 5 hari hujan, disusul pada bulan Oktober dengan Curah Hujan 77 mm³ selama 7 hari hujan.

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah sebagian besar digunakan untuk sawah, sementara lahan kering digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi oleh lahan Kehutanan seluas kemudian Lahan Pertanian dan Perkebunan.

2.1.1.1.8. Peruntukkan Lahan

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas $\pm 99.576,41$ ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039.

Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat dikawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbunan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Kawasan cagar budaya terdiri atas : a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

2.1.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- b. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur,

- Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- d. Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan, saat ini kondisi di Kabupaten Morowali untuk Pervalansi Ketidakcukupan Pangan pada tahun 2024 adalah 4,14 dan untuk Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2024 adalah 81,44.
 - e. Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;
 - f. Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
 - g. Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
 - h. Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;

- i. Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan budidaya keramba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- j. Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;
- k. Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
- l. Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir;

- (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;
- m. Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- n. Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Wita Ponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali disetiap kecamatan, Batu gunung disetiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- o. Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- p. Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri

- atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;
- q. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas : (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
- r. Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas : (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda;
- s. Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1). Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3). Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Goa Berlian, Goa Alo, Kecamatan Menui Kepulauan; (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafobaho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Menui Kepulauan. (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Menui Kepulauan Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- t. Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo-Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b). Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-

- pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente ,Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbeleyang kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Menui Kepulauan; (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Menui Kepulauan;
- u. Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
 - v. Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;
 - w. Rencana kawasan potensi pariwisata lainnya di setiap kecamatan;
 - x. Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas : 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Pesisir; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) / Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:

10. permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi Terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda.

2.1.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Perkawasan

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

2.1.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor. Banjir besar terjadi di Kecamatan Bungku Tengah terjadi pada Tahun 2013 yang merendam permukiman masyarakat yang mencapai 1 (satu) meter lebih. Kabupaten Morowali memiliki Angka Indeks Risiko Bencana BNPB 189

(tinggi) dan menempati peringkat ke-80 dari 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB, 2013)

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, pada Tahun 2013 telah terjadi bencana banjir yang merendam Kota Lama Bungku dengan perkiraan ketinggian air mencapai 2 meter. Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

- Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir.

- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah- masalah sosial dan ekonomi. Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan

dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk

2.1.1.2.1. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Istilah kependudukan (*population*) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, perpindahan penduduk (*migration*) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.

A. Jumlah Penduduk

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang

berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali periode 31 Desember 2024 jumlah penduduk kabupaten morowali sebesar 198.968 jiwa, hal ini tentunya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut ini adalah tabel yang menggambarkan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali
Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Org/Km ²)
	Km2	%	Jumlah	%	
Menui Kepulauan	127,65	2,33	9.636	4,84	75,49
Bungku Selatan	232,10	4,24	14.869	7,47	64,06
Bahodopi	1.080,98	19,75	45.434	22,83	42,03
Bungku Pesisir	867,29	15,85	8.467	4,26	9,76
Bungku Tengah	725,57	13,26	36.385	18,29	50,15
Bungku Timur	387,23	7,08	15.341	7,71	39,62
Bungku Barat	758,93	13,87	21.064	10,59	27,75
Bumi Raya	504,77	9,22	17.648	8,87	34,96
Wita Ponda	519,70	9,50	23.664	11,89	45,53
Sombori Kepulauan	267,78	4,89	6.460	3,25	24,12
Morowali	5.472,00	100	198.968	100	36,36

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2025

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024,

rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 36,36 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 36.385 jiwa mencapai kepadatan penduduk sebanyak 50,15 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 75,49 jiwa per km², Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit dibanding kecamatan lain yakni hanya 2,33 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 9,76 jiwa per km².

Disamping itu, Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut *jenis* kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Dilihat dari proporsi jenis kelamin Penduduk di Kabupaten Morowali diketahui bahwa terbanyak adalah penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 106.590 jiwa atau sebesar 53,57 persen, sedangkan penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 92.378 jiwa atau sebesar 46,43 persen. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Morowali sebesar 115,36, Rasio jenis kelamin penduduk terbesar di Kecamatan Bahodopi (132,59), sebaliknya yang terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan yakni sebesar (98,52). berikut ini adalah tabel yang menggambarkan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio
	Lk	Pr		
Menui Kepulauan	4.782,00	4.854,00	9.636,00	98,52
Bungku Selatan	7.629	7.240	14.869	105,37
Bahodopi	25.900	19.534	45.434	132,59
Bungku Pesisir	4.453	4.014	8.467	110,94
Bungku Tengah	19.081	17.304	36.385	110,27
Bungku Timur	8.037	7.304	15.341	110,04
Bungku Barat	11.767	9.297	21.064	126,57
Bumi Raya	9.246	8.402	17.648	110,05
Wita Ponda	12.381	11.283	23.664	109,73
Sombori Kepulauan	3.314	3.146	6.460	105,34
Morowali	106.590	92.378	198.968	115,38

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2025

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya penduduk baru yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten Morowali yakni pekerja di wilayah pertambangan. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). berikut ini adalah tabel yang menggambarkan laju pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024 :

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2023 dan 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2023	2024
1.	Menui Kepulauan	13.602	14.106	9.636	3,71	- 31,69
2.	Bungku Selatan	14.540	14.987	14.869	3,07	- 0,79
3.	Bahodopi	37.698	41.641	45.434	10,46	9,11
4.	Bungku Pesisir	7.067	7.799	8.467	10,36	8,57

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2023	2024
5.	Bungku Tengah	31.947	33.576	36.385	5,10	8,37
6.	Bungku Timur	13.383	14.277	15.341	6,68	7,45
7.	Bungku Barat	14.659	18.679	21.064	27,42	12,77
8.	Bumi Raya	16.297	16.681	17.648	2,36	5,80
9.	Wita Ponda	21.222	22.211	23.664	4,66	6,54
10.	Sombori Kepulauan	0,00	0,00	6.460	0,00	0,00
	TOTAL	170.415	183.957	198.968	7,95	8,16

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Morowali Tahun 2025

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di kabupaten morowali pada tahun 2024 mencapai 8,16 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2023. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi dikecamatan bungku barat sebesar 12,77 persen, kecamatan bahodopi sebesar 10,46 persen dan kecamatan bungku pesisir sebesar 9,11 persen. Pertumbuhan penduduk terendah pada tahun 2024 terjadi di kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan, hal ini disebabkan karena penduduk di dua kecamatan tersebut telah disesuaikan dengan Kecamatan pemekaran baru yaitu kecamatan Sombori Kepulauan.

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan sampai dengan tahun berjalan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah- langkah perbaikan pada periode berikutnya.

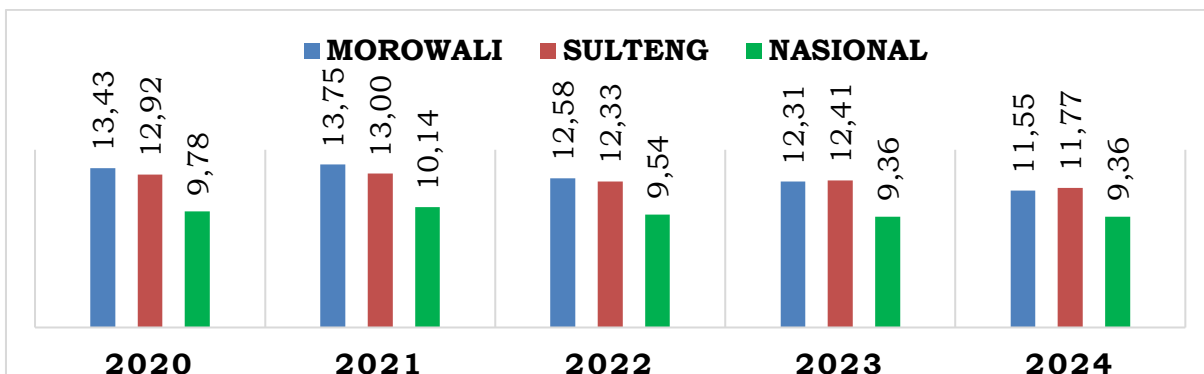
2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Morowali Tahun 2024–2026 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang digunakan pada masa transisi sebagai rumusan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025, maka pemerintah daerah menetapkan 5 (lima) tujuan pembangunan daerah dengan 6 (enam) indikator dan 13 (tiga belas) sasaran Strategis dengan 26 (Dua Puluh enam). Adapun pencapaian tujuan pembangunan daerah pada Triwulan I tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Tujuan 1 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata.

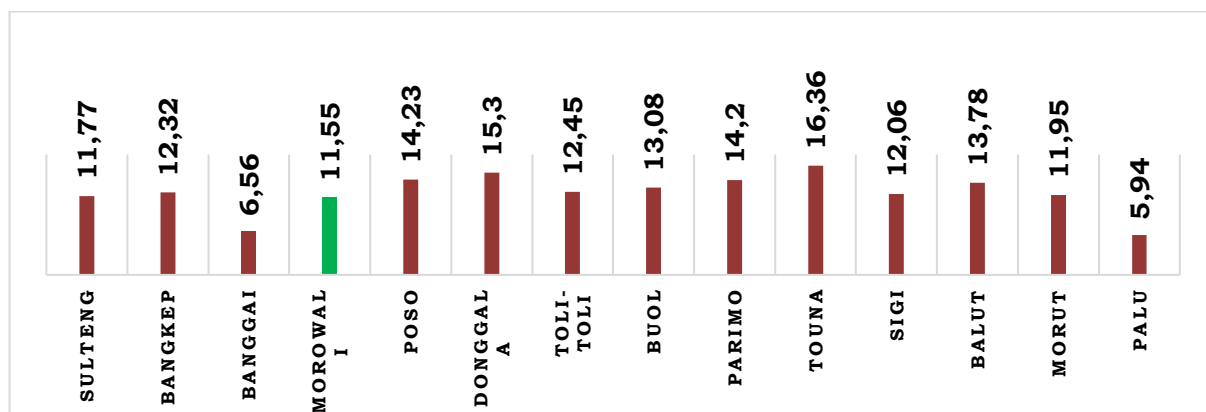
Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator yaitu Angka Kemiskinan dengan target 11,30 persen pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator ini telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun. Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi kemiskinan Kabupaten Morowal kurun 2019-2024.



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kab. Moroawali Tahun 2019-2023

Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Moroawali mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, walaupun penduduk miskin Kabupaten Moroawali mengalami penurunan dan berada di bawah Sulawesi Tengah namun masih berada di atas nasional. Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah daerah untuk melakukan upaya penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit. Pada tahun 2025 menurut data BPS Provinsi Sulawesi Tengah persentase Penduduk Miskin Kabupaten Moroawali berada di peringkat ke-3 (tiga) terendah se-Sulawesi Tengah Setelah Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



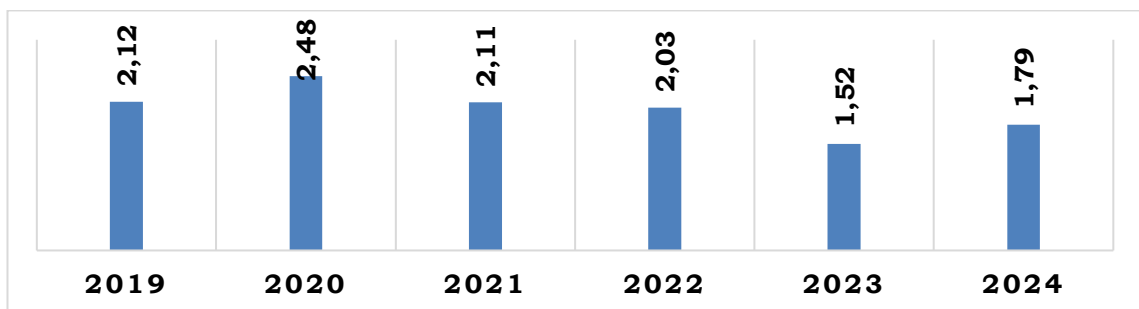
Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.2
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Se-Sulteng Tahun 2024

Adapun upaya lain yang telah dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2025 untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain Optimalisasi

Anggaran Untuk Penanganan Kemiskinan dan kemiskinan Ekstrem serta meningkatkan Koordinasi Dengan berbagai pihak terkait Validasi Data Kemiskinan khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem untuk menuju Zero Miskin Ekstrem. Indikator kemiskinan ini didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran strategis yaitu :

- Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada angka 1,90 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I Tahun 2025 mencapai 1,79 persen atau mencapai 106,15 persen realisasi. walaupun demikian Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 1,52 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah Tingkat partisipasi angkatan kerja, Angka melek huruf, Tingkat pengangguran terbuka, Rasio ketergantungan penduduk, Rata-rata lama sekolah dan Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). grafik dibawah ini menunjukkan kondisi kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali kurun waktu 6 (Enam) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2024) :

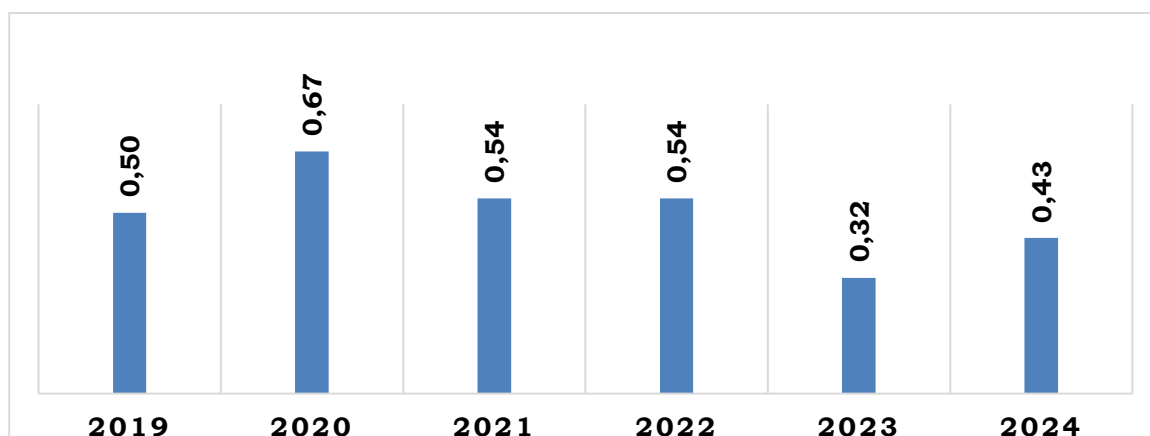


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2025

Grafik. 2.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Morowali
Tahun 2019-2024

- Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi

nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada angka 0,52 persen, sementara Kinerja Indikator ini pada Semester I Tahun 2025 mencapai 0,43 persen atau mencapai 120,93 persen realisasi. Sama halnya dengan indikator Kedaaman Kemiskinan sebelumnya, Indeks Keparahan Kemsikinan Kabupaten Morowali Tahun 2024 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 0,32 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan antara lain Pengeluaran per kapita dan Garis kemiskinan. pemerintah daerah tetap melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan indeks keparahan kemiskinan, grafik dibawah ini menunjukkan kondisi keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (tahun 2019 s/d tahun 2024) :

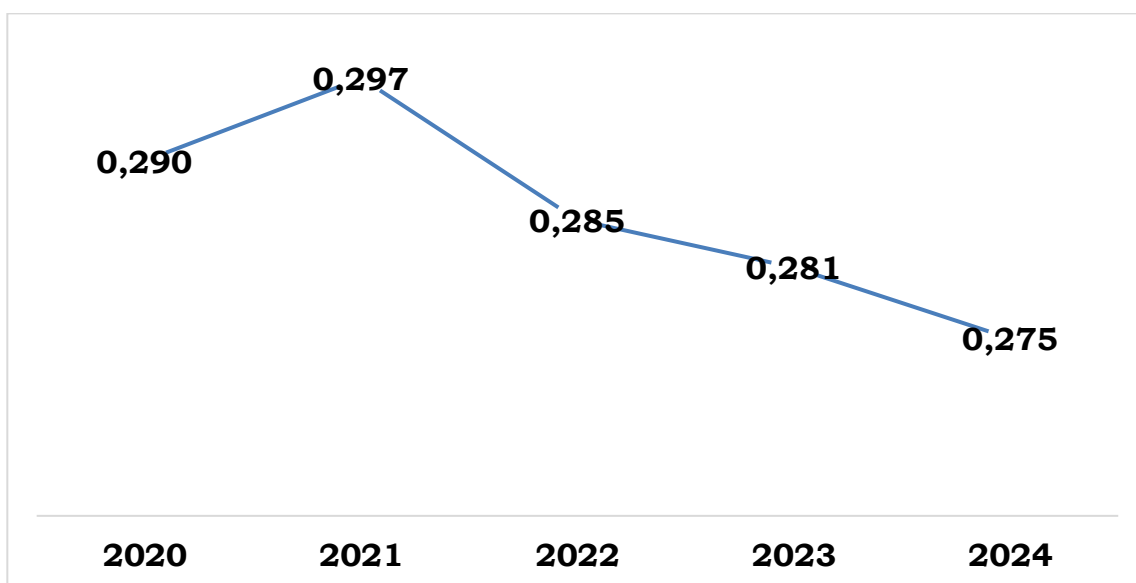


Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.4
Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Morowali
Tahun 2019-2024

- Gini Ratio, merupakan menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi disutu wilayah. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidak merataan atau ketimpangan sama sekali. target Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada angka 0,265 persen, sementara realisasi Kinerja Indikator ini sampai dengan Semester I

Tahun 2025 mencapai 0,275 persen atau mencapai 96,36 persen realisasi. dengan demikian pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat menurunkan angka indeks gini kabupaten Morowali pada tahun 2025, hal ini tentunya dengan menurunnya Indeks Gini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Gini Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2020 s/d tahun 2024) :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (*) Data Sementara

Grafik. 2.5
Indeks Gini Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan I Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan I RPD Tahun 2024

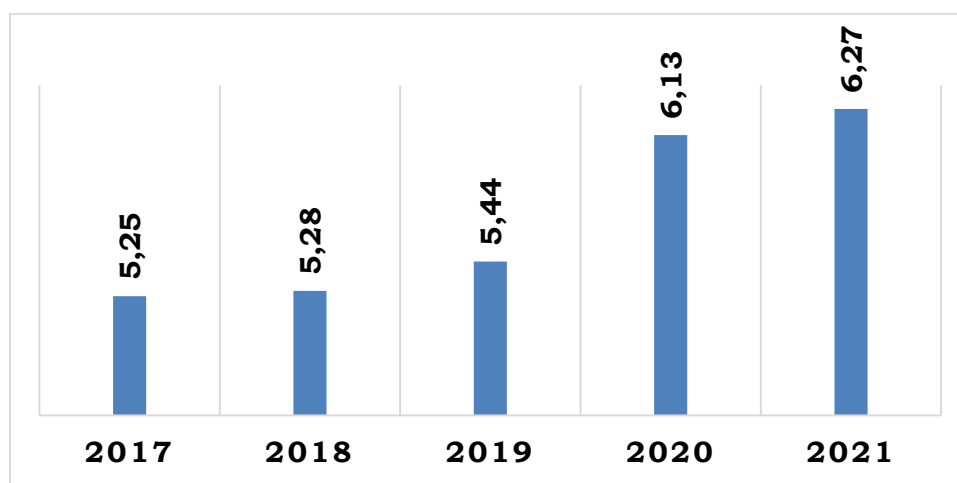
TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN					TERGET 2025		REALISASI	% Capaian	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2020	2021	2022	2023	2024	RPD	RKPD				
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	Angka Kemiskinan			Persen	13,43	13,75	12,58	12,31	11,55	12,58 - 12,00	11,59	11,55	99,65	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	Semua OPD
		Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	2,84	2,11	2,03	1,52	1,79	1,90-1,80	1,90 - 1,80	1,79	106,15		
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,67	0,54	0,54	0,32	0,43	0,53-0,52	0,53 - 0,52	0,43	120,93		
			Gini Ratio	Persen	0,290	0,297	0,285	0,281	0,275	0,279-0,275	0,265	0,275	96,36		

Sumber : BPS Prov. Sulteng

➤ **Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dengan target 6 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 74,00 persen. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sesuai hasil pengukuran indeks yang dikeluarkan oleh Bappenas kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator ini mengalami peningkatan secara signifikan.

Peningkatan IPEI ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi perbaikan dalam distribusi manfaat pembangunan ekonomi, dimana lebih banyak masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung inklusivitas, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan akses terhadap pasar kerja. Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Morowal kurun waktu 2017-2021 :

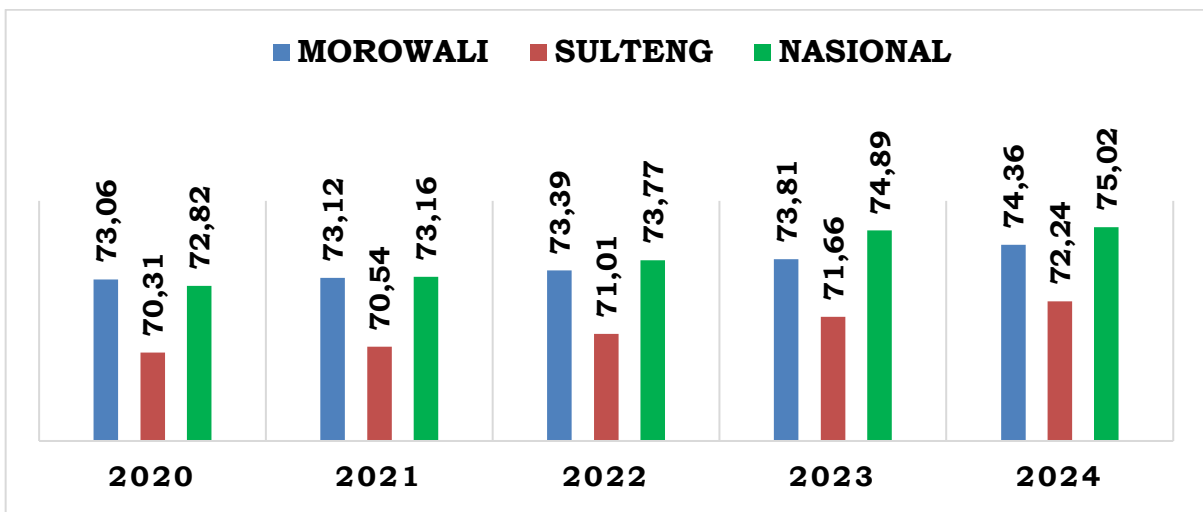


Sumber : Bappenas tahun 2024

Grafik. 2.6
IPEI Kabupaten Morowali Tahun 2017-2021

Sementara itu, untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Morowali juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, IPM itu

sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Pada grafik dibawah ini menunjukkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowal kurun waktu 2020-2024 :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.7
IPM Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 IPM kabupaten Morowali berada pada urutan kedua tertinggi se-Sulawesi tengah setelah kota palu, walaupun demikian pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan IPM di Kabupaten Morowali hal ini disebabkan karena Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali pada tahun 2024 masih berada pada angka 13,39 persen ini mengartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,39 tahun atau baru setara dengan Diploma I, disamping itu Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali pada tahun 2024 juga masih berada pada angka 9,38 persen ini berarti rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali adalah setara kelas tiga SMP/Sederajat. Dari capaian ini menunjukkan bahwa secara umum,

sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Morowali telah sepenuhnya tuntas pendidikan dasar sembilan tahun, namun belum mampu menjawab tuntutan pemerintah pusat untuk menuntaskan wajib belajar dua belas tahun. Untuk mewujudkan program ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti : Meningkatkan mutu pendidikan, Membangun gedung sekolah menengah, Melakukan intervensi dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK). Sementara untuk Usia Harapan Hidup Kabupaten Morowali tahun 2024 berada diangka 71,09 persen artinya capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Morowali rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 71,09 tahun sementara standar UHH maksimal yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) adalah 85 Tahun. Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan tahun 2024.

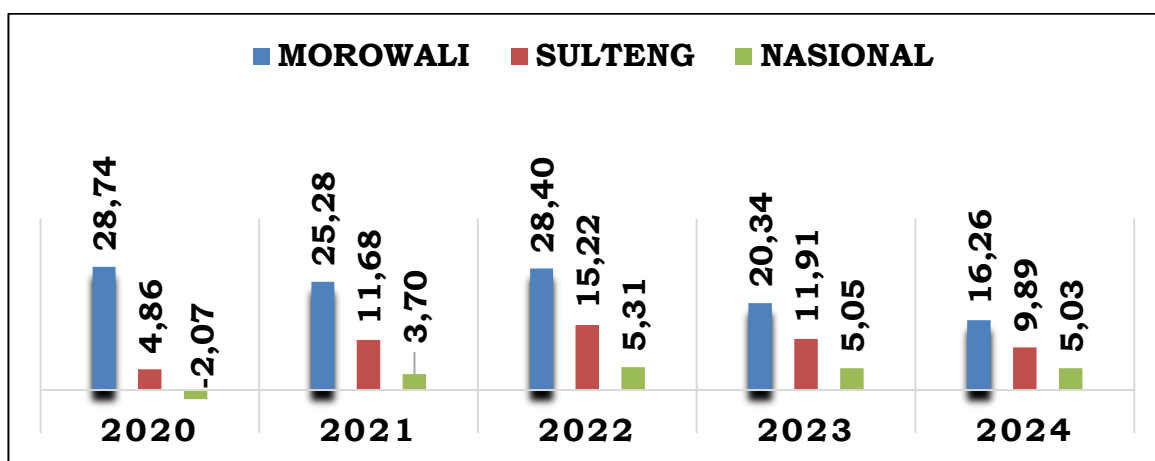
Tabel 2.7
IPM Menurut Kab./Kota Se-Sulteng Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	(Metode Baru) IPM dan Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)									
	Umur Harapan Hidup (UHH) (SP2020-LF)		Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Sulawesi Tengah	70,66	70,84	13,33	13,34	8,96	9,04	10.149,00	10.536,00	71,66	72,24
Banggai Kepulauan	67,35	67,54	13,09	13,11	8,62	8,70	8.066,00	8.375,00	67,05	67,65
Banggai	72,09	72,26	13,34	13,35	8,63	8,81	10.400,00	10.772,00	72,19	72,86
Morowali	71,00	71,09	13,38	13,39	9,37	9,38	11.708,00	12.281,00	73,82	74,36
Poso	72,98	73,02	13,74	13,75	9,53	9,54	9.622,00	9.948,00	73,25	73,65
Donggala	70,52	70,74	12,61	12,62	7,99	8,00	8.766,00	9.117,00	68,17	68,71
Tolitoli	71,09	71,31	13,04	13,17	8,77	8,91	8.665,00	8.918,00	69,68	70,38
Buol	71,06	71,30	13,17	13,18	9,09	9,20	8.678,00	9.051,00	70,18	70,89
Parigi Moutong	68,62	68,72	12,51	12,52	8,04	8,05	10.471,00	10.846,00	69,06	69,48
Tojo Una-una	70,89	71,05	12,37	12,43	8,51	8,56	8.550,00	8.863,00	68,47	69,04
Sigi	71,11	71,33	13,05	13,13	9,03	9,04	8.891,00	9.254,00	70,28	70,90
Banggai Laut	70,75	71,04	13,03	13,04	8,64	8,65	8.470,00	8.776,00	69,12	69,65
Morowali Utara	72,19	72,35	12,29	12,44	8,94	9,13	9.623,00	10.032,00	70,74	71,64
Kota Palu	73,71	73,91	16,51	16,52	11,74	11,75	15.501,00	15.941,00	83,71	84,12

Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah didukung oleh 9 (sembilan) indikator sasaran strategis yaitu :

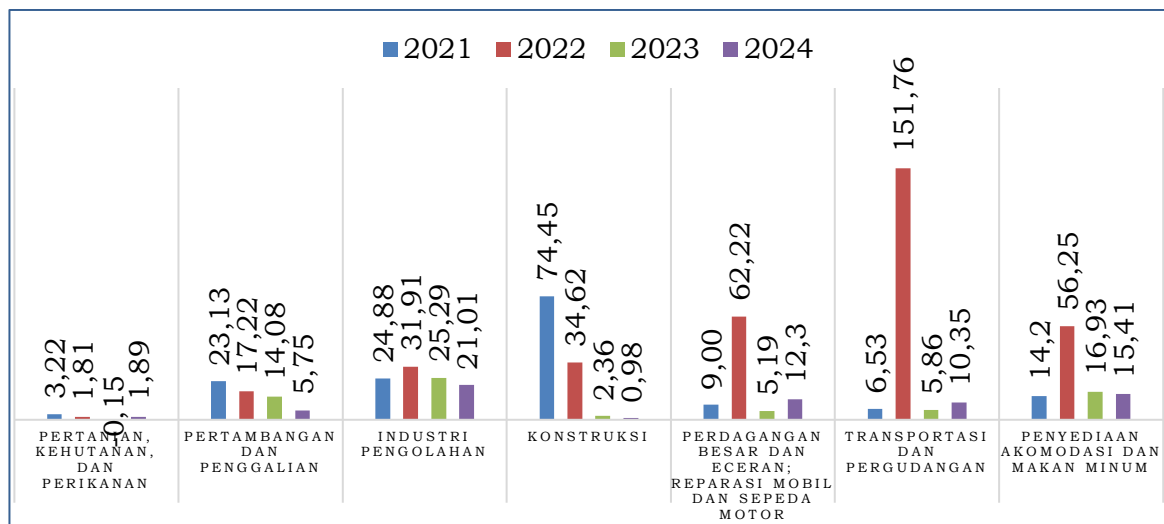
➤ Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2024 berada pada angka 16,26 persen, angka pertumbuhan ini menemptakan Kabupaten Morowali berada pada urutan pertama pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada angka 25,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2025 mencapai 16,26 persen atau mencapai 65,04 persen realisasi. dengan demikian pertumbuhan ekonomi masih menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian maupun industri pengolahan, sementara untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan sektor penggerak ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Walaupun demikian sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan setiap tahunnya, begitu juga dengan sektor industri pengolahan, sehingga langkah konkrit pemerintah daerah kedepan adalah dengan menggerakkan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor dominan masyarakat kabupaten morowali. Grafik dibawah ini menunjukkan kondisi pertumbuhan Kabupaten Morowali kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2020 s/d tahun 2024.



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (* Data Sementara)

Grafik. 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

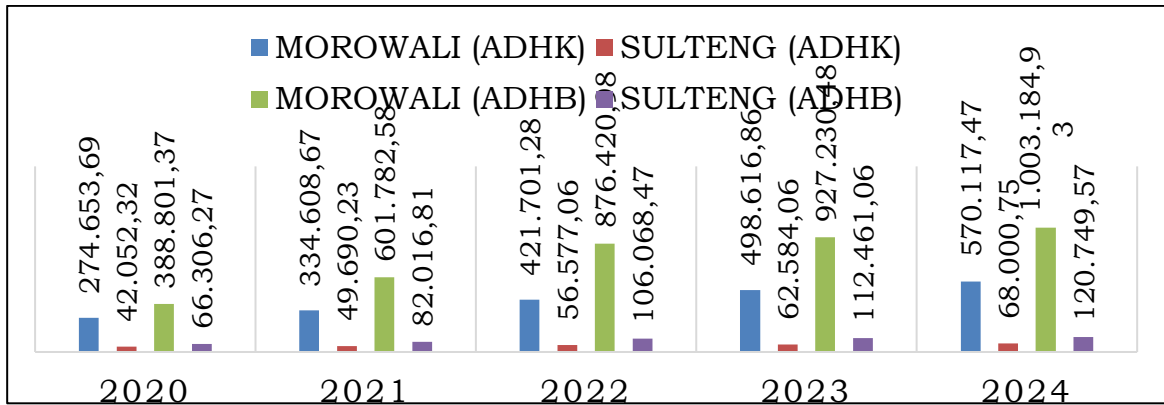
Sementara itu untuk melihat sektor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2024 dan perbandingan dengan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2025

Grafik. 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Persektor Kab. Morowali Tahun 2022-2024

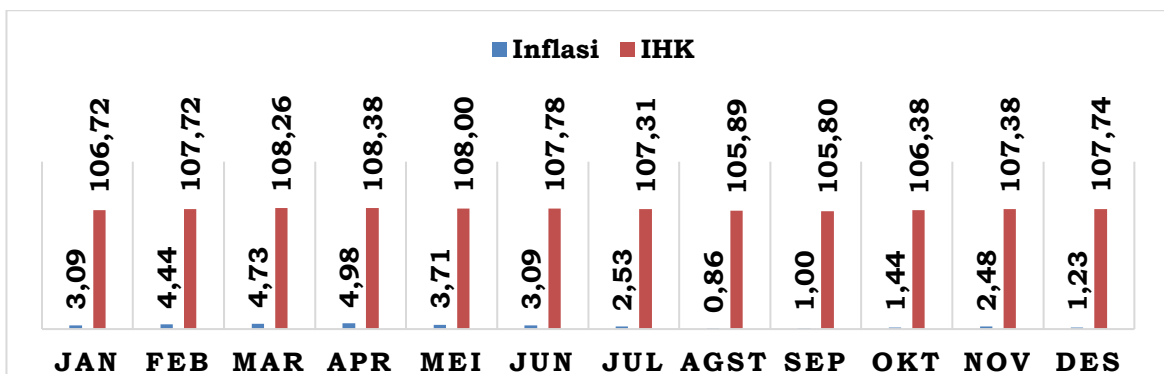
- Pendapatan Perkaapita Kabupaten Morowali pada Tahun 2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berada pada angka Rp. 570.117,47 Juta Rupiah, angka ini menempatkan Kabupaten Morowali berada pada urutan Pertama Se-Sulawesi Tengah dengan Pendapatan Perkapita tertinggi. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada angka 498 Juta, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 114,28 persen realisasi. Namun demikian pemerintah daerah masih tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita di Kabupaten Morowali hal ini disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Morowali yang mengartikan bahwa pendapatan perkapita yang tinggi namun belum merata sampai ke lapisan masyarakat paling bawah atau masyarakat miksin. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi pertumbuhan Perkaapita Kabupaten Morowali kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (tahun 2020 s/d tahun 2024).



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024

Grafik. 2.10
Pendapatan Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

- Infasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, pada tahun 2024 ini untuk pertama kalinya Kabupaten Morowali masuk dalam Perhitungan Inflasi Oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada angka 3,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Desember Tahun 2024 mencapai 1,23 persen atau mencapai 243,90 persen realisasi. Walaupun kurun waktu bulan januari s/d Desember 2024 Inflasi secara *y-on-y* mengalami fluktuasi namu pemerintah daerah Kabupaten Morowali dapat menekan inflasi di Kabupaten Morowali sejak bulan juli tahun 2024 sampai dengan bulan desember tahun 2024. Berikut ini grafik inflasi *y-on-y* di Kabupaten Morowali Tahun 2024.



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.11
Inflasi Kabupaten Morowali (*y-on-y*) Tahun 2024

Keberhasilan ini tentunya diikuti dengan kinerja pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, komitmen pemerintah daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk menangani inflasi di Kabupaten Morowali. Adapun langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain dengan mengalokasikan Anggaran untuk Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan menerapkan strategi 4 K yaitu Menjaga Keterjangkauan Harga, Menjaga Ketersediaan Pasokan, Menjaga Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif dengan mengikuti Rakor Inflasi yang diadakan oleh Kemendagri dan Rakor Forkopimda Pengendalian Kebutuhan Pokok. Iniflasi kabupaten morowali masih dipenagruhi kelompok pengeluaran Makan, Minuman dan tembakau serta Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Adapun inflasi *m-to-m* Kabupaten Morowali dan komponen pembentuk inflasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

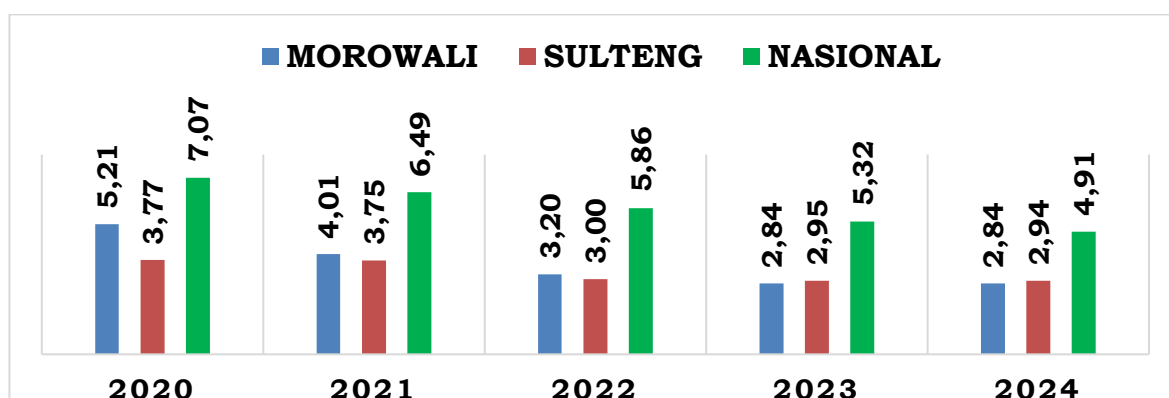
Tabel 2.8
Inflasi *m-to-m* dan Komponen Pembentuk Inflasi Tahun 2024

Kelompok Pengeluaran	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
Umum	0,27	0,94	0,5	0,11	-0,35	-0,2	-0,44	-1,32	-0,08	0,55	0,94	-
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,9	2,39	1,56	0,76	-0,85	-0,49	-1,07	-3,83	0,23	1,61	1,49	-
Pakaian dan Alas Kaki	-0,03	0,01	-	-	-	0,1	0,14	0,44	-	-	-	-
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,47	-0,14	-0,77	-1,49	-	-0,08	-0,09	-0,64	-1,14	0,01	2,3	-
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,13	-	-	-	-	-	-	-0,13	0,64	-	-	-
Kesehatan	0,02	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Transportasi	-0,14	0,05	0,03	0,04	-0,05	-	-	1,21	-0,8	-1,17	0,04	-
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-	-	-0,34	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-	-	-	-	-	-	-	0,63	-	0,02	-	-
Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,3	-	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	0,32	0,06	-
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,09	0,17	0,21	0,18	0,01	0,02	0,01	1,91	0,23	0,2	0,14	-

Sumber : BPS Sulawesi tengah Tahun 2024

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, oleh sebab itu untuk mendapatkan angka TPT diukur dengan menggunakan

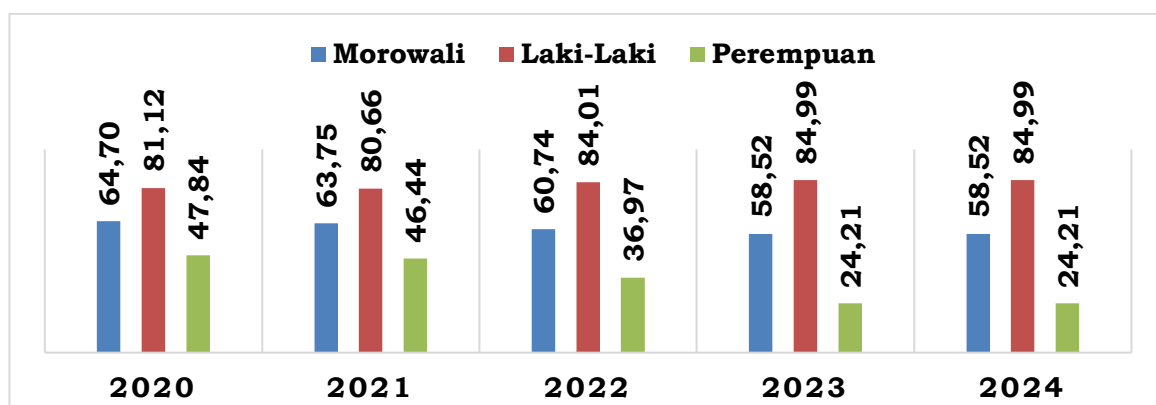
persentase anatar jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada tahun 202 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali berada pada angka 2,84 persen atau berada pada urutan keenam tertinggi Se-Sulawesi Tengah. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada angka 2,50 Persen, dengan demikian Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai mencapai 88,03 persen realisasi. Walaupun kurun waktu lima tahun terakhir pemerintah daerah telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran secara persentase namun jika melihat data BPS tahun 2023 jumlah penganggur Kabupaten Morowali berjumlah 2.077 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 278 jiwa jika dibandingkan tahun 2022, hal ini terjadi karena tingginya peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja perempuan juga mengalami peningkatan, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka antara lain dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk usai kerja agar dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi sehingga dapat bersaing dipasar tenaga kerja, selain itu pada tahun 2025 ini pemerintah daerah telah melakukan kerja sama dengan kementerian perindustrian melalui pendidikan vokasi baik ditingkat D-1 maupun sampai dengan D-III. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2024 :



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.12
TPT Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2024

Selain Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami penurunan dan pada tahun 2024 TPAK Perempuan hanya berada pada angka 24,21 persen. Sehingga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi perempuan. grafik dibawah ini menunjukkan kondisi TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2024 :



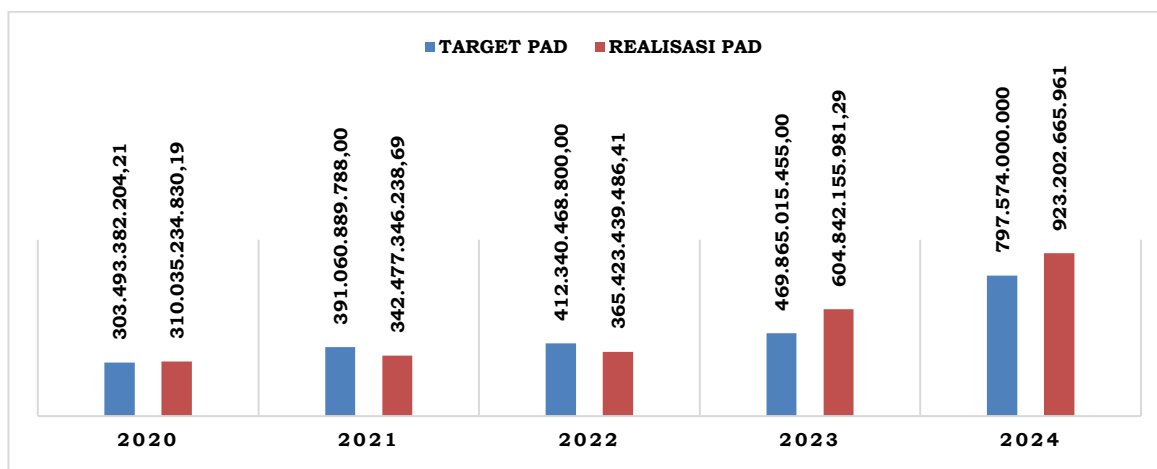
Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2024 (* Data Sementara)

Grafik. 2.13
TPAK Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2024

➤ **Persentase Kenaikan PAD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 6,00 Persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 27,18 persen atau. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali kurun waktu 2019-2024 mengalami peningkatan yang signifikan dan realisasi PAD tertinggi adalah pada tahun 2024

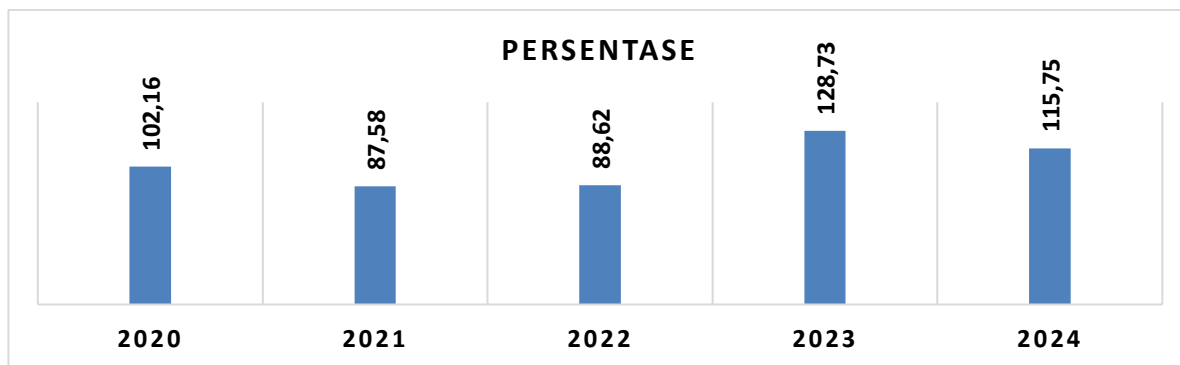
hingga bulan oktober sudah mencapai Rp. 767.038.867.554,00 jika dibandingkan dengan bulan desember tahun 2023 sebesar Rp. 604.842.155.981,29 atau mengalami peningkatan sebesar 26,82 persen. Sementara itu untuk target PAD pada Penetapan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 627.115.662.509,00 dan mengalami peningkatan pada perubahan APBD sebesar 27,18 persen atau senilai Rp. 797.574.000.000,00 grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi PAD Kabupaten Morowali Tahun 2020 s/d 2024 :



Sumber : LRA Audited Kabupaten Morowali (* Data Sementara)

Grafik. 2.14
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali
Tahun 2019 s.d 2024

Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 bersumber dari Pajak Daerah, Reribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari ke 4 (empat) rincian obyek PAD Kabupaten Morowali, Pajak Daerah memberikan kontribusi paling tinggi sebesar Rp. 492.937.477.158,02 atau 64,26 persen dari Total Realisasi PAD, sementara untuk Retribusi daerah sebesar Rp. 207.872.178.088,00 atau 27,10 persen. adapun persentase capaian Realisasi PAD Kabupaten Morowali terhadap Target PAD tahun 2019 s/d 2024 adalah sebagai berikut :



Sumber : LRA Audited Kabupaten Morowali (* Data Sementara)

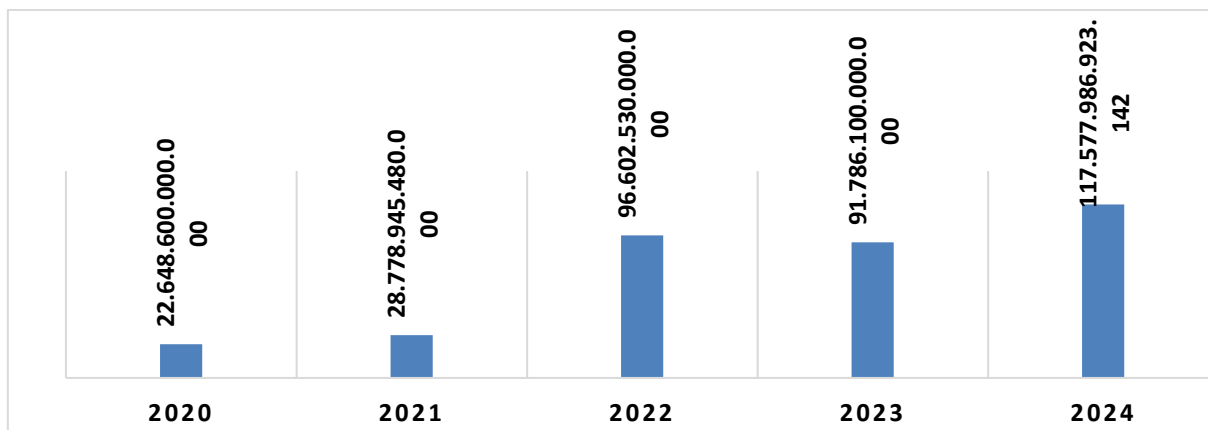
Grafik. 2.15

Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap target PAD Kabupaten Morowali Tahun 2019 s.d 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Kinerja Realisasi PAD pada tahun 2023 adalah yang tertinggi mencapai 128,73 persen dan pada tahun 2020 mencapai 102,16 persen. Sementara untuk tahun 2024 baru mencapai 115,75 persen data realisasi yang digunakan pada saat perhitungan adalah data realisasi sementara dengan menggunakan data sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

➤ Nilai Investasi

Kinerja pemerintah daerah menumbuhkan investasi di kabupaten Morowali patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa, hal ini dapat dilihat dari realisasi investasi Kabupaten Morowali yang mengalami kenaikan disetiap tahun. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 90 Triliun, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 mencapai 117.577 Triliun. Walaupun pada tahun 2023 realisasi Investasi mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 namun secara umum realisasi Investasi Kabupaten Morowali masih menempati urutan pertama se-Sulawesi Tengah. grafik dibawah ini menunjukkan Realisasi Investasi Kabupaten Morowali Tahun 2020 s/d 2024 :

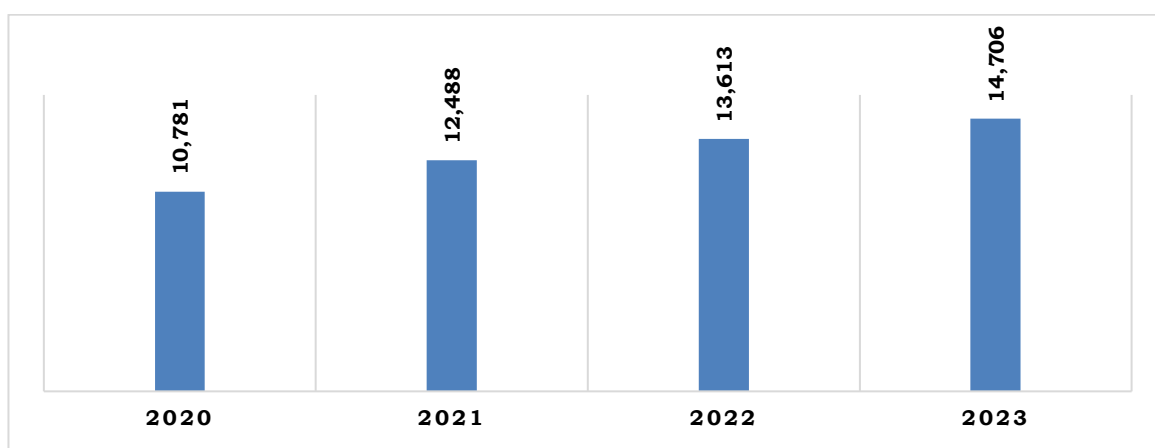


Sumber : DPMPTSP Kab. Morowali (Diolah Kembali)

Grafik. 2.16

Realsiasi Investasi Kabupaten Morowali tahun 2020 s.d 2024

Peningkatan investasi di Kabupaten Morowali juga salah satunya dapat diukur melalui peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika melihat data BPS dalam Buku Morowali dalam Angka Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan PMTB Kabupaten Morowali mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2020 s/d tahun 2023, walaupun pada tahun 2020 mengalami dampak dan pemulihan dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara nasional namun tidak mempengaruhi kondisi investasi di kabupaten morowali. Adapun data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2024 (Diolah Kembali)

Grafik. 2.17

**PMTB Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023
(dalam Milyar Rupiah)**

- Indeks Kesehatan, indikator ini merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi nilai indeks pembangunan manusia oleh United National Development Progame (UNDP), Menurut Bloom et al., (2010) kesehatan adalah sumber kesejahteraan manusia dan juga sebagai instrumen dalam meningkatkan pendapatan. target RKPD Tahun 2024 untuk indikator ini berada pada angka 0,43 persen, sementara Kinerja Indikator ini pada Tahun 2024 mencapai 0,79 persen atau mencapai 176,74 persen realisasi. Indeks kesehatan ini diukur dengan menggunakan Usia Harapan Hidup, adapun gambaran Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Usia Harapan Hidup (UHH) Kab. Morowali Tahun 2023 s/d 2024

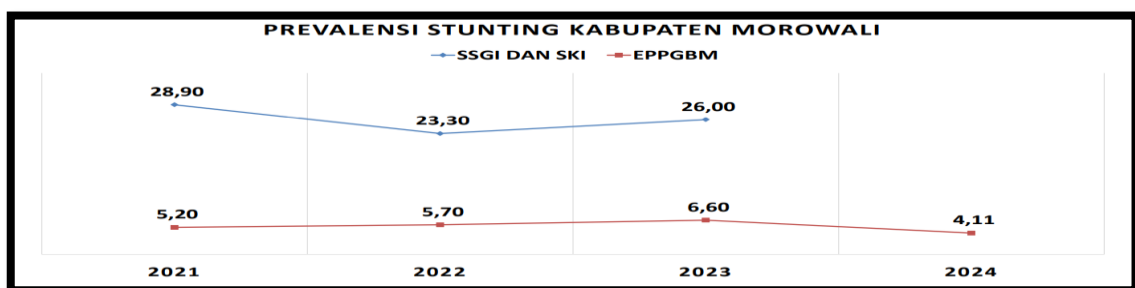
Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (UHH) (SP2020-LF)	
	2023	2024
Sulawesi Tengah	70,66	70,84
Banggai Kepulauan	67,35	67,54
Banggai	72,09	72,26
Morowali	71,00	71,09
Poso	72,98	73,02
Donggala	70,52	70,74
Tolitoli	71,09	71,31
Buol	71,06	71,3
Parigi Moutong	68,62	68,72
Tojo Una-una	70,89	71,05
Sigi	71,11	71,33
Banggai Laut	70,75	71,04
Morowali Utara	72,19	72,35
Kota Palu	73,71	73,91

Sumber : BSP Sulawesi Tengah Tahun 2025

pencaapaian ini merupakan kategori sangat tinggi mengingat berbagi program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Morowali antara lain Penjaminan Kesehatan Gratis melalui BPJS Kesehatan pada tahun 2025. dan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, sampai dengan tahun 2024 tenaga kesehatan yang ada sebanyak 1.598 orang yang terdiri dari dokter spesialis 31 orang, dokter umum 54 orang, perawat 593 orang, bidan 611 orang, Kesmas 122 orang dan sisanya Kesling 27 orang,

Apoteker 72 Orang, Nutrisionis 40 orang dan Analis LAB 62 orang. Dengan pencapaian ini bukan berarti pemerintah daerah tidak mendapatkan hambatan dan kendala salah satu tantangan yang dihadapi saat ini yaitu dengan tingginya pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dan penyediaan obat-obatan, sehingga masih perlu upaya dan kerja keras dari pemerintah daerah dalam menangani hal ini.

- Angka Stunting atau stunting adalah keadaan saat balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Masalah stunting di kabupaten morowali merupakan masalah kesehatan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan prevalensi stunting kabupaten morowali pada tahun 2023 mencapai 26,00 persen atau mengalami peningkatan sebesar 12,7 persen dari angka stunting tahun sebelumnya sebesar 23,30 persen. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada angka 20,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 26,00 persen atau hanya mencapai 76,92 persen realisasi. Capaian ini masih menggunakan data sementara sambil menunggu data hasil survey Gizi Indonesi (SSGI) yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan RI. Adapun Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting. Garfik dibawah ini menunjukan prevalensi stunting kabupaten morowali yang bersumber dari SSGI atau SKI dan EPPGBM pada tahun 2024



Sumber Data : SKI/SSGI dan EPPGBM

Grafik. 2.18
Prevalensi Stunting Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2024

Adapun upaya atau langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal menurunkan angka stunting di kabupaten morowali adalah penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insetntif), Pembangunan Jamban Lokus Stunting, Bantuan Pangan Non Tunai. pemberian makanan tambahan pada balita selama 90 hari dan pendampingan balita stunting dan keluarga beresiko stunting.

➤ Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), tujuan dilakukan pengukuran Indeks Pendidikan adalah untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar. Angka RLS dan HLS Kabupaten Morowali tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023, angka RLS yang diraih Kota Kediri yakni 9,37 dan meningkat menjadi 9,38 di tahun 2024. Sedangkan HLS, dari 13,38 di tahun 2023 menjadi 13,39 di tahun 2024. “RLS untuk mengetahui berapa tahun penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata menjalani pendidikan formal. Sedangkan HLS itu untuk memperkirakan berapa lama anak-anak pada umur tertentu bisa menyelesaikan sekolah. Tabel dibawah ini menunjukan RLS dan HLS Kabupaten Morowali Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tabel 2.10
RLS dan HLS Kab. Morowali Tahun 2023 s/d 2024

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	
	2023	2024	2023	2024
Sulawesi Tengah	13,33	13,34	8,96	9,04
Banggai Kepulauan	13,09	13,11	8,62	8,7
Banggai	13,34	13,35	8,63	8,81
Morowali	13,38	13,39	9,37	9,38
Poso	13,74	13,75	9,53	9,54
Donggala	12,61	12,62	7,99	8
Tolitoli	13,04	13,17	8,77	8,91

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	
	2023	2024	2023	2024
Buol	13,17	13,18	9,09	9,2
Parigi Moutong	12,51	12,52	8,04	8,05
Tojo Una-una	12,37	12,43	8,51	8,56
Sigi	13,05	13,13	9,03	9,04
Banggai Laut	13,03	13,04	8,64	8,65
Morowali Utara	12,29	12,44	8,94	9,13
Kota Palu	16,51	16,52	11,74	11,75

Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2025

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan II Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

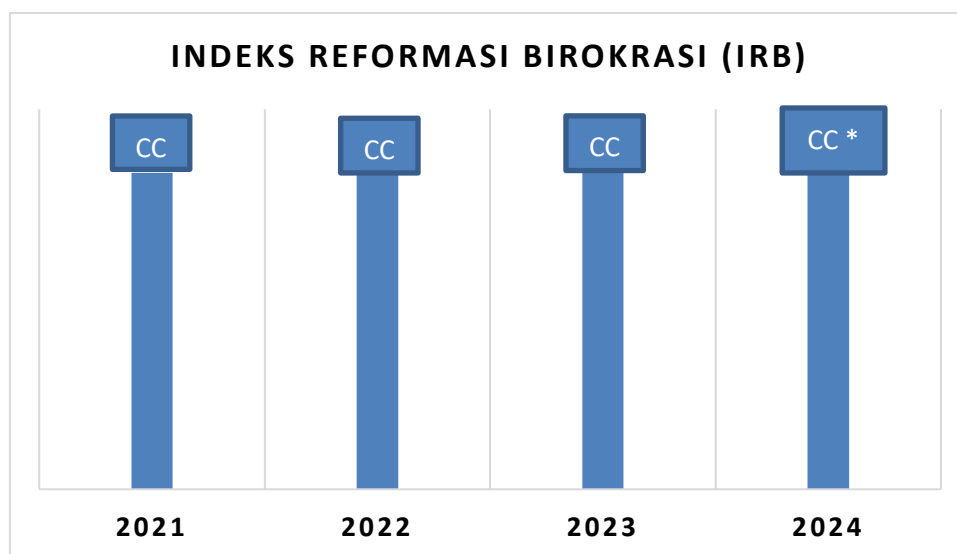
Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan II RPD Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN					TERGET 2024			REALISASI	% Capaian	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	RPD	RKPD	P-RKPD					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Angka Pertumbuhan Ekonomi			Persen	20,26	28,74	25,28	28,40	20,34	25,00 - 30,00	25 - 30	25,00	16,26	65,04			
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	282	274	334	421	498	400,10 - 420,00	370 - 400	498,90	570,12	114,28	Dinas Perikanan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Semua OPD	
	Inflasi		Persen	NA	NA	NA	NA	4,98	3,00 - 2,00	3,00 - 2,00	3,00-2,00	1,23	243,90				
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dipasar Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,97	5,21	4,01	3,20	2,84	3,2 - 3,00	3,2 - 3,00	2,50	2,84	88,03	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	Semua OPD	
			Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	Persen	22,48	39,68	10,46	3,54	5,09	1,00 - 2,00	3,00 - 6,00	3,00 -6,00	15,75	262,50	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Semua OPD
				Nilai Investasi	Triliun Rupiah	25.862	22.648	28.778	96.602	91.786	65 - 70 Triliun	65 - 70 Triliun	70-90 Triliun	117.577 Triliun	130,64	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semua OPD
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	71,92	73,06	73,12	73,39	73,02	72,55 - 72,75	72,55 - 72,75	74,00	73,54	99,38		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,751	0,756	0,757	0,757	0,76	0,40 -0,43	0,40 - 0,43	0,40-0,43	0,79	183,72	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua OPD
				Stunting (SSGI)	Persen	NA	NA	28,09	23,30	26,00	20 - 17	20 -17	20-17	26,00 (*)	76,92		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	67,68	67,68	68,22	68,28	68,40	55,00 - 57,00	55,00 - 57,00	55,00-57,00	68,46	120,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua OPD

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 3 : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan target B. Jika melihat kinerja pemerintah daerah pada indikator ini masih kategori rendah dengan capaian CC atau realisasi 85,48 persen. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan gambaran sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan Publik yang berkualitas. Pemerintah daerah melakukan upaya untuk menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) grafik dibawah ini menunjukkan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :



Sumber : Kementerian PAN RB RI Tahun 2024

Grafik : 2.19
IRB Kabupaten Morowali tahun 2021-2023

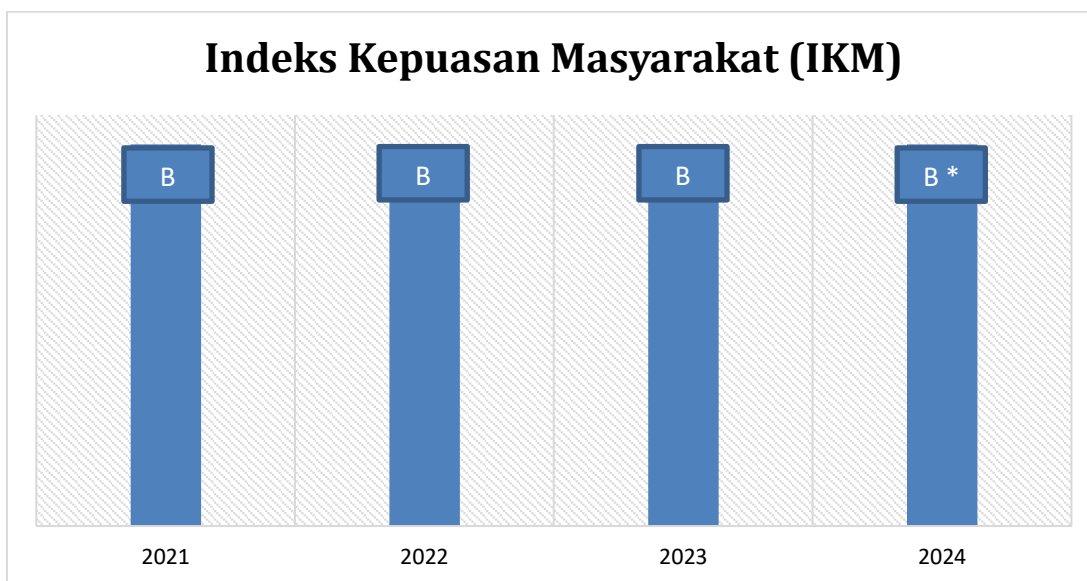
Jika berdasarkan grafik 2.19 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian tujuan Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 hanya mencapai nilai 55,56 atau kategori CC. tercapainya indikator tujuan III ini ditunjang oleh 7 (Tujuh) indikator sasaran yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, penilaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kabupaten Morowali dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pelayanan kependudukan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini berada pada Poin B, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai B persen atau mencapai 100 persen realisasi namun pencapaian ini masih perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pada sektor Pelayanan Kependudukan untuk memudahkan Akses dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kepulauan Pemerintah Daerah menyerahkan Bantuan Alat Perekaman E-KTP untuk kecamatan bungku selatan dan menui kepulauan. Untuk sektor pelayanan perizinan pada tahun 2023 telah mengeluarkan izin sebanyak 2.299 Izin dan pada tahun 2024 sampai dengan Bulan oktober tahun 2024 telah mengeluarkan sebanyak 2.378 izin usaha. Peningkatan layanan ini salah satunya yaitu di dukung dengan dioperasikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dimasyarakat secara efektif dan efisien, sampai dengan tahun 2024 Mall Pelayanan Publik telah membuka 27 gerai layanan yang terdiri dari 20 gerai layanan perangkat daerah teknis dan 7 gerai layanan bagi instansi vertikal.

Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan pada sektor Perizinan anatara lain Inovasi “MPP Jemput Bola” Sosialisasi Dan Penerbitan NIB Bagi Pelaku Usaha Mikro Secara Langsung Di Kecamatan, PLAT EMAS (Pelayanan Terpadu Secara Edukatif dan Masif)

Merupakan inovasi DPMPTSP dalam peningkatan pelayanan pelayanan public dan Pengopaersian WEB GIS Sebagai Sarana Potensi Investasi Kabupaten Morowali disamping itu DPMPTSP juga telah menerapkan Sistem Antrian Yang Dapat Di Akses Secara Online sehingga pengunjung MPP tidak perlu datang ke kantor MPP untuk mendapatkan nomor antrian serta dapat di pantau secara real time melalui Gadget. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Morowali terhadap pelayanan publik Tahun 2021 s/d 2024 :



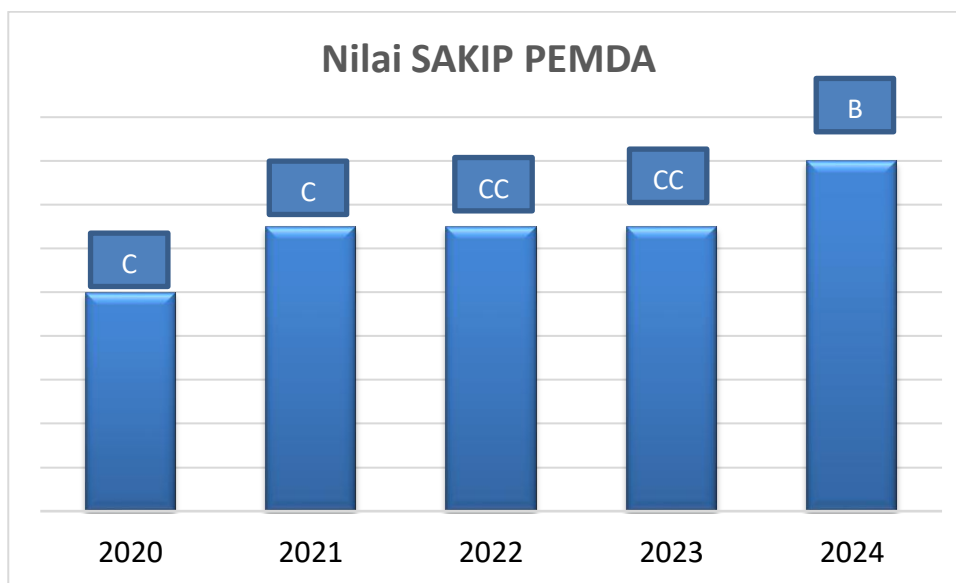
Sumber : Dukcapil dan DPMPTS Kab. Morowali tahun 2024

Grafik : 2.20

IKM Kabupaten Morowali tahun 2021-2024

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kabupaten Morowali pada tahun 2021-2023 masih dengan Capaian CC, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah B, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 adalah B atau mencapai 100 persen realisasi. Ini untuk pertama kalinya Sakip Pemda Morowali mencapai Nilai B,

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain Komitmen Pimpinan dalam hal perjanjian kinerja dan penyerapan anggaran dimasing-masing perangkat daerah, pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan Sumber Daya Aparatur. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SAKIP Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2024 :

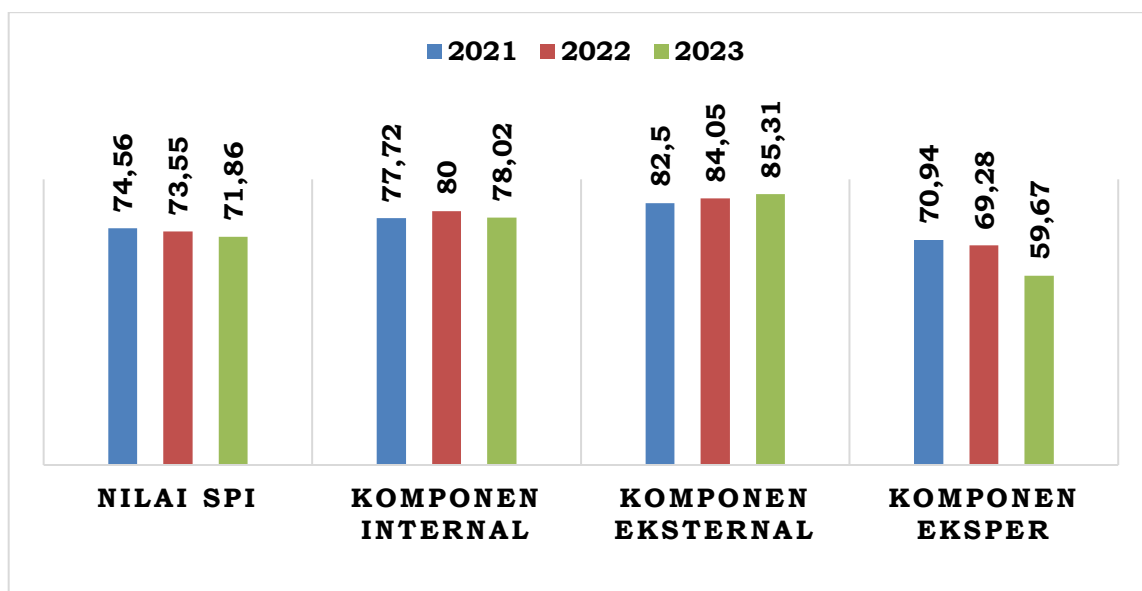


Sumber : Kementerian PAN RB Tahun 2024

Grafik : 2.21
SAKIP Kabupaten Morowali tahun 2019-2023

- Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Pada tahun 2023, Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator

ini adalah 73,70 (Waspada), sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 71,68 (Rentan) atau 97,52 persen realisasi. Pada tahun 2023 Nilai SPI Kabupaten Morowali berada pada angka 71,86 atau mengalami penurunan dari tahun 2021 dan tahun 2022, Skor turun sebanyak 1.69 poin dari tahun sebelumnya. Kabupaten Morowali saat ini berada dalam kategori Rentan, pemerintah daerah perlu berupaya dalam meningkatkan skor sebanyak 1.14 poin untuk masuk ke dalam kategori Waspada. penurunan ini disebabkan karena komponen Internal mengalami penurunan dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada Komponen Eksternal. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SPI dan Komponen Perhitungan Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :

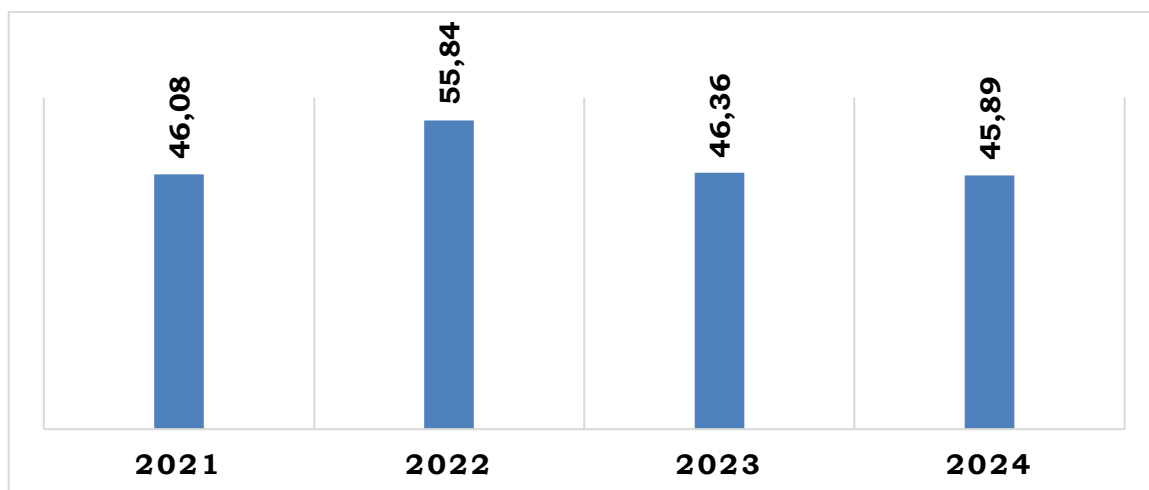


Sumber : <https://www.jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=ae068786>

Grafik : 2.22
Nilai SPI dan Komponen Perhitungan Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

- Indeks Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 40,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 45,89 persen atau 114,73 persen realisasi. Pencapaian ini menempatkan

Kabupaten Morowali sebagai Kabupaten terinovatif ke-3 se-sulawesi tengah setelah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Parigi Moutong dan menempati peringkat 205 terinovatif secara nasional, walaupun demikian namun indeks ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 pemerintah daerah telah melakukan penginputan Inovasi kedalam aplikasi Innovative Government Award (IGA) sebanyak 23 inovasi, yang terdiri dari 19 inovasi dengan nilai kematangan 111, 1 inovasi dengan nilai kematangan 108, 1 inovasi dengan nilai kematangan 103, 1 inovasi dengan nilai kematangan 73,00, dan 1 inovasi dengan nilai kematangan 50,00. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023



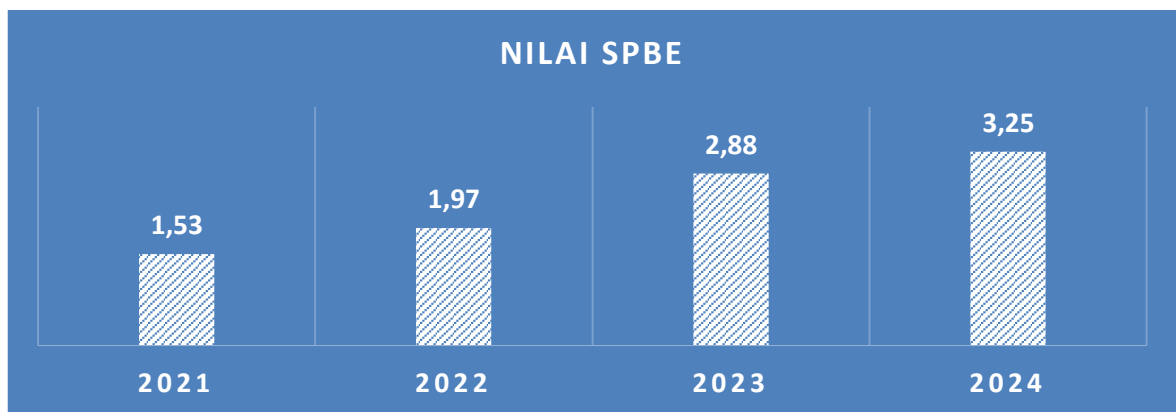
Sumber : Bid. Litbang Bappelitbangda Kab. Morowali

Grafik : 2.23

Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai SPBE Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 2,88 persen, sementara Kinerja Indikator ini pada Tahun 2024 mencapai 3,25 persen atau 112,85 persen realisasi. Berbagai upaya yang dilakukan,

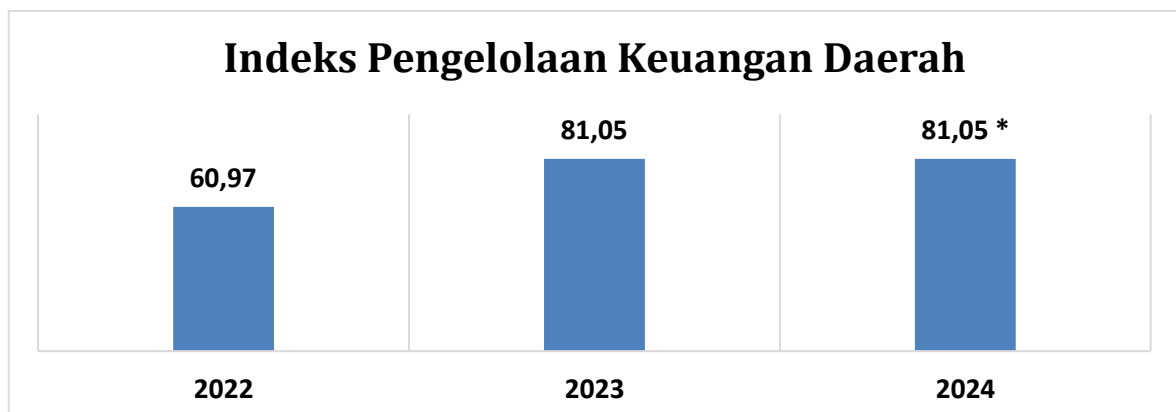
grafik dibawah ini menunjukkan Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :



Sumber : Dinas Kominfo Kab. Morowali

Grafik : 2.24
Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 68,96 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 81,05 persen atau 117,53 persen realisasi. Adapun pencapaian Indeks Pengelolaan keuangan Daerah Tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : BSDKN Kemendagri (* Data Sementara)

Grafik : 2.25
Nilai IPKD Kabupaten Morowali Tahun 2022-2024

Pemerintah daerah setiap tahunnya telah berupaya untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Morowali salah satunya dengan cara meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Aset daerah dengan mempertahankan Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang sejak 2019 sampai dengan 2023 mendapatkan opini BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). grafik dibawah ini menunjukkan hasil Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 s/d 2023 :

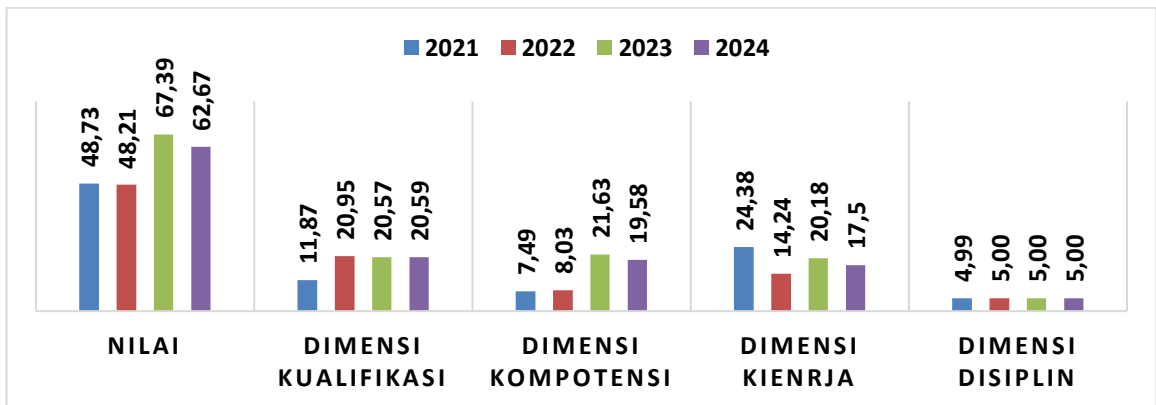


Sumber : BPKAD Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.26
Opini BPK atas LHP Keuangan Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2023

- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN Kabupaten Morowali pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,07 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, ini mengartikan bahwa ada komponen penilaian yang mengalami penurunan dalam pengukuran IP ASN Tahun 2022. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) Dimensi yaitu Dimensi Kualifikasi merupakan Riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS dengan bobot 25 persen, Dimensi Kompetensi merupakan Riwayat pengembangan kompetensi dengan bobot 40 persen, dimensi kinerja merupakan Riwayat hasil penilaian

kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan bobot 30 persen dan dimensi disiplin merupakan Data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima dengan bobot 5 persen. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 71,00 persen, sementara Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 67,39 persen atau 94,77 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai Indesk Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 masih dalam kategori rendah.



Sumber : SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Grafik : 2.27

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa ke empat dimensi pengukura IP ASN mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, walaupun IP ASN Kabupaten Morowali masih dalam kategori rendah. Untuk meningkatkan dimensi Kinerja pada tahun 2024 pemerintah daerah telah menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20 Persen dari tahun 2023 dan pada awal tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 15 persen Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan III Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan III RPD

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN					TERGET 2024			REALISASI	% Capaian	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	RPD	RKPD	P-RKPD				
Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Predikat	NA	NA	CC	CC	CC	B	B	B	CC			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Publik	Persen	NA	NA	B	B	B	75,00-80,00	75,00-80,00	75,00-80,00	88,19 (*)	110,24	Dinas Kependudukan, Semua Kecamatan dan Pencatatan Sipil Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappelitbangda Kab. Morowali, Dinas Perpustakaan Daerah, Sekretariat Daerah, Inspektoriat Daerah, Sekretariat DPRD	Semua OPD
			Nilai Sakip	Nilai	C	C	CC	CC	CC	B	B	B	B	100,00		
			Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	NA	NA	74,56	73,55	71,87 * (Rentan)	73,7-77,4 (Waspada)	73,7-77,4 (Waspada)	73,7-77,4 (Waspada)	71,87 * (Rentan)	97,52		
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	NA	NA	46,08	55,84	46,34	32,50-37,50	32,50-37,50	37,50-40	45,89	114,73		
			Nilai SPBE	Nilai	NA	NA	1,53	1,97	2,88	1,53-1,75	1,53-1,75	1,53 - 2,88	3,25	112,85		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	NA	NA	NA	60,97	81,05	68,96	68,96	68,96	81,05 (*)	117,53	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Semua OPD
	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	NA	NA	48,73	48,21	67,39	71-73	71-73	71-73	62,67 (*)	88,27	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua OPD		

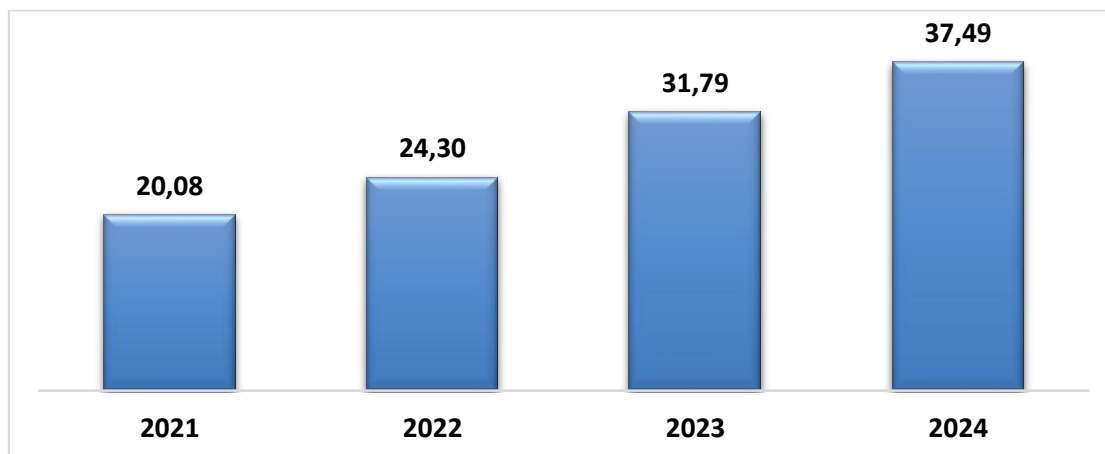
Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 50 Persen. Kualitas Layanan Infrastruktur (KLI) adalah data dan informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terdapat 10 (sepuluh) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu jalan dan jembatan, irigasi, taman kota/RTH, drainase, PJU, AMPL, rambu dan penunjuk jalan, persampahan, sanitasi, dan halte. Sampai dengan desember Tahun 2025 Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, namun pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Infastruktur dengan mengalokasikan anggaran spending mandatory pada APBD tahun 2024. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027. Untuk lebih mengefisienkan pencapaian dalam indikator tujuan IV ini ditunjang oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah

24,50 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 37,49 persen atau 153,02 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali Tahun 2021 s/d 2023 :

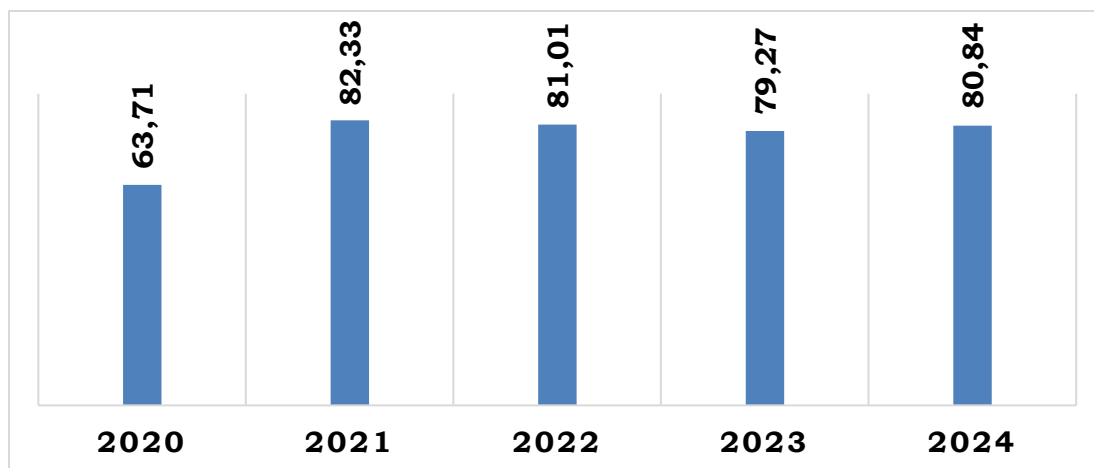


Sumber : Dinas PUPR Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.28
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2024

- Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun tahun 2022, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 55,00 persen, Sampai dengan tahun 2025 Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran untuk Indikator ini, pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memenuhi tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan mengalokasikan anggaran Penilaian Perwujudan (Monev) RTRW Kab. Morowali Peninjauan Kembali (PK) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Morowali dan Revisi RTRW Kab. Morowali. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan PERDA RTRW Kabupaten Morowali tahun 2019 yang sudah harus direvisi pada tahun 2024.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, sementara target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 80,54

persen, Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 80,84 persen atau 100,37 persen realisasi, pada tahun 2024 selain penanganan sampah di ibu kota bungku, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan persampahan di kawasan industri bahodopi. grafik dibawah ini menunjukkan Nilai IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2020-2023 :



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup daerah Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.29
IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan IV Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan IV RPD Tahun 2024

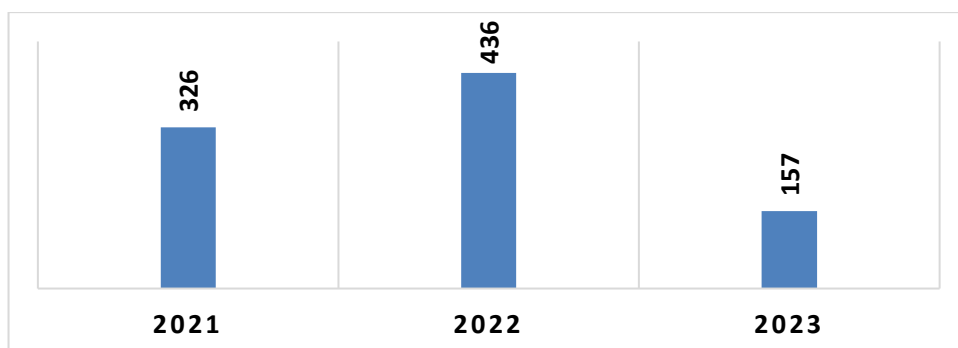
TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN					TERGET 2024			REALISASI	% Capaian	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	RPD	RKPD	P-RKPD				
Meningkatkan Kualitas Penataan Wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Persen	NA	NA	NA	NA	NA	50-60 (Tidak Baik)	50-60 (Tidak Baik)	50-60 (Tidak Baik)	NA	NA		
		Meningkatnya Persentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	NA	NA	20,08	24,30	31,79	23,50-24,50	23,50-24,50	23,50-24,50	37,49	153,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Semua OPD
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	50,00-55,00	50,00-55,00	50,00-55,00	NA	NA	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Semua OPD
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	NA	63,71	82,33	81,01	79,27	80,54-81,00	80,54-81,00	80,54-81,00	80,84	100,37	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Semua OPD

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

➤ **Tujuan 5 : Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan pembangunan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menetapkan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman dengan target 70 persen. Untuk capaian sampai dengan tahun 2025 indikator ini belum dilakukan pengukuran. Adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2025 antara lain meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda dan Forkopimcam dan seluruh instansi vertikal di daerah secara berkala, Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dan Mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial. Untuk lebih mengefisienkan pencapaian dalam indikator tujuan V ini ditunjang oleh 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

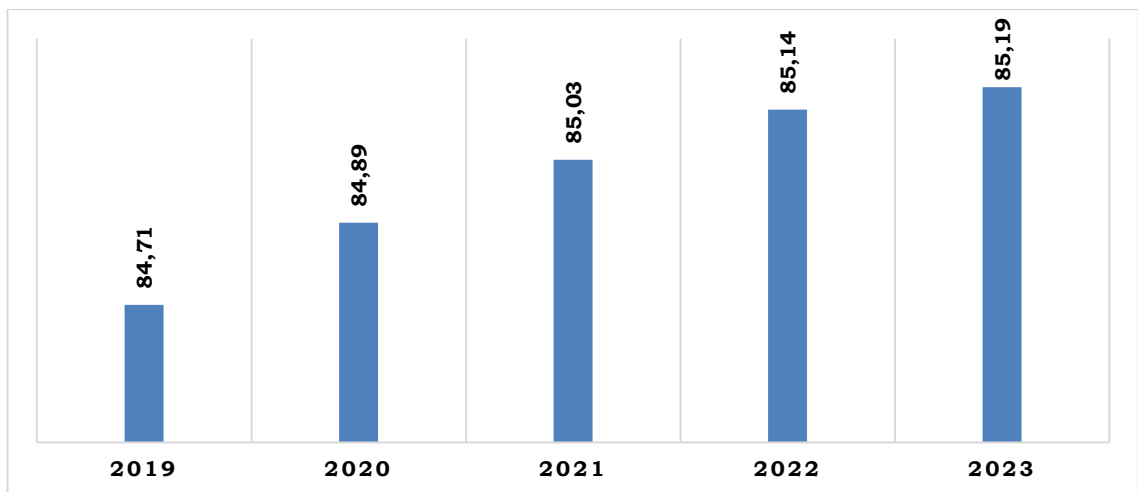
- Angka Kriminalitas, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 17,50 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 9,21 persen atau 190,01 persen realisasi. Berdasarkan data BPS dalam Buku Kabupaten Morowali dalam Angka tahun 2024 volume 20, Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Morowali, 2021-2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. grafik dibawah ini menunjukkan Jumlah Tindak Pidana Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023 :



Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2025

Grafik : 2.30
Jumlah Kriminal Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI), dengan ketentuan Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data IPG Kabupaten Morowali pada tahun 2023 yang berada pada angka 85,19 persen atau dikategorikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 85,00 persen, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 mencapai 85,19 persen atau 100,22 persen realisasi. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 :

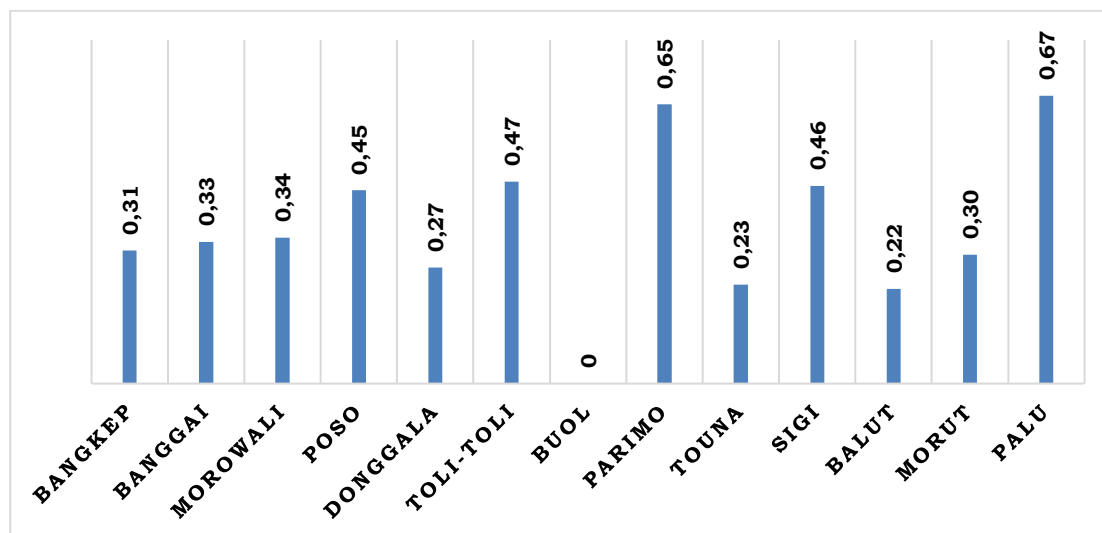


Sumber : BPS Kab. Morowali Tahun 2025

Grafik : 2.31
IPG Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023

- Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan, hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRB, pada tahun 2023 IKD Kabupaten Morowali berada pada

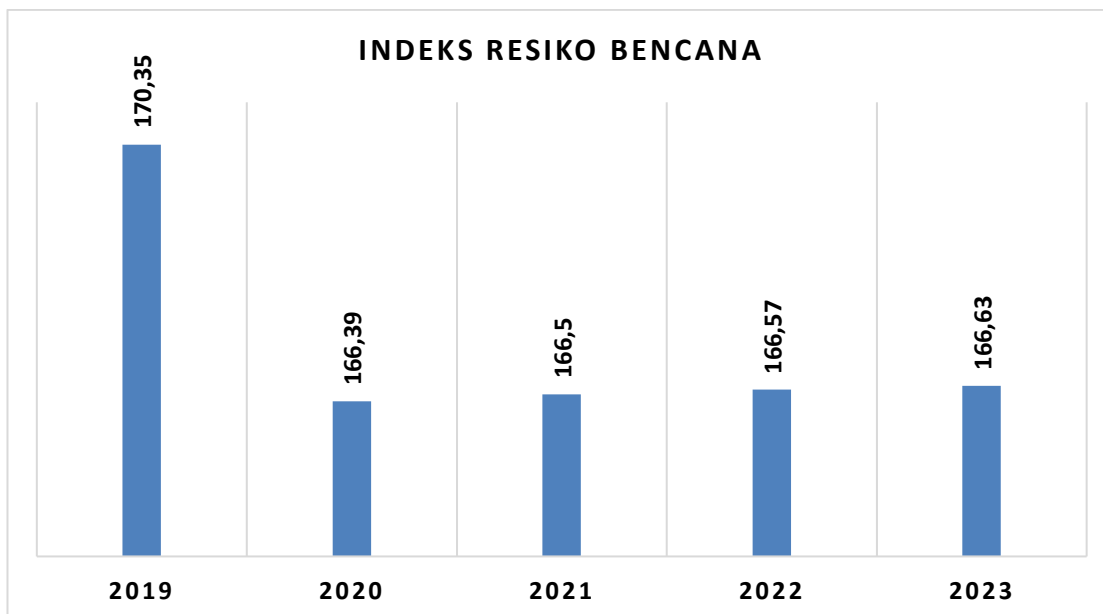
angka 0,34 persen. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah Level 2, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan belum dilakukan pengukuran. grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana Kabupaten Morowali Tahun 2023 :



Sumber : BPBD Kab. Morowali Tahun 2024

Grafik : 2.32
IKD Kabupaten Morowali Tahun 2023

Sementara itu, untuk Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Morowali mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, namun demikian angka IRB 173,25 tersebut masih termasuk dalam kategori tinggi untuk Indeks resiko bencana. Adapun untuk indesk resiko bencana per ancaman adalah bencana bajir dengan dengan skor 12 atau kategori sedang, bencana gempa bumi dengan skor 32,40 atau kategori tinggi, bencana Tsunami dengan skor 19,20 atau kategori tinggi, bencana kebakaran hutan dan lahan denga skor 24,00 atau kategori tinggi, bencana tanah longsor dengan skor 24,00 atau kategori tinggi, bencana gelombang ekstreme dan abrasi dengan skor 36,00 atau ketegory tinggi, kekeringan dengan skor 16,00 atau kategori tinggi, Cuaca Ekstrem dengan skor 13,60 atau ketegori tinggi, grafik dibawah ini menunjukkan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023 :



Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/perb/ikd.html>

Grafik : 2.33
IRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

- Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi, pada tahun 2023 IDM Kab. Morowali mencapai 0,6871. target RKPD Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 0,6178, capaian Kinerja Indikator ini sampai dengan Tahun 2024 juga berada pada 0,72861 atau 111,61 persen realisasi. Namun pencapaian ini hanya berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 secara umum indikator ini masih perlu upaya dan kerja keras pemerintah daerah karena jika melihat data tahun 2024 untuk meningkatkan status desa di Kabupaten Morowali. Pada tabel dibawah ini menunjukkan status desa mandiri, maju, berkembang dan tertinggal serta IDM masing-masing desa yang ada di Kabupaten Morowali .

Tabel 2.14
Status Desa dan IDM Kabupaten Morowalia Tahun 2024

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
720605	BUNGKU TENGAH	7206052010	PUUNGKOILU	0,8686	0,6	0,8	0,7562	MAJU
720605	BUNGKU TENGAH	7206052011	BAHONTOBUNGKU	0,7371	0,65	0,8667	0,7513	MAJU
720605	BUNGKU TENGAH	7206052012	TOFUTI	0,8743	0,65	0,9333	0,8192	MANDIRI
720605	BUNGKU TENGAH	7206052013	SAKITA	0,8343	0,6	0,8667	0,767	MAJU
720605	BUNGKU TENGAH	7206052019	MATANSALA	0,8857	0,8	0,9333	0,873	MANDIRI
720605	BUNGKU TENGAH	7206052021	BAHORURU	0,9314	0,6	0,9333	0,8216	MANDIRI
720605	BUNGKU TENGAH	7206052022	BENTE	0,8514	0,9167	1	0,9227	MANDIRI
720605	BUNGKU TENGAH	7206052023	IPI	0,8686	0,6667	0,9333	0,8229	MANDIRI
720605	BUNGKU TENGAH	7206052024	BAHOMOHONI	0,8857	0,7833	1	0,8897	MANDIRI
720605	BUNGKU TENGAH	7206052025	BAHOMOLEO	0,7943	0,6	0,8667	0,7537	MAJU
720605	BUNGKU TENGAH	7206052026	BAHOMANTE	0,8229	0,6	0,8	0,741	MAJU
720605	BUNGKU TENGAH	7206052027	LANONA	0,8114	0,7167	0,9333	0,8205	MANDIRI
720605	BUNGKU TENGAH	7206052029	TUDUA	0,7829	0,4333	0,9333	0,7165	MAJU
720606	BUNGKU SELATAN	7206062001	SAINOA	0,6857	0,4667	0,6667	0,6063	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062002	POLEWALI	0,7314	0,4667	0,8	0,666	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062003	UMBELE	0,7829	0,5	0,8667	0,7165	MAJU
720606	BUNGKU SELATAN	7206062004	PULAU DUA	0,7714	0,6	0,6667	0,6794	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062005	BAKALA	0,7029	0,5667	0,6667	0,6454	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062006	PAKU	0,8229	0,6	0,6667	0,6965	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062007	KOBURU	0,72	0,5167	0,6667	0,6344	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062008	BUTON	0,7886	0,65	0,6667	0,7017	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062009	JAWI-JAWI	0,7486	0,45	0,6667	0,6217	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062010	KALEROANG	0,8343	0,75	0,6667	0,7503	MAJU
720606	BUNGKU SELATAN	7206062011	BUNGINGKELA	0,7543	0,5833	0,6667	0,6681	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062012	LOKOMBULO	0,8171	0,5667	0,6667	0,6835	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062013	BUAJANGKA	0,8057	0,5833	0,8667	0,7519	MAJU
720606	BUNGKU SELATAN	7206062014	WARU-WARU	0,7143	0,45	0,6667	0,6103	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062015	PADABALE	0,76	0,4833	0,6667	0,6367	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062016	PADO-PADO	0,72	0,45	0,6667	0,6122	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062017	PULAUBAPA	0,6857	0,45	0,6667	0,6008	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062018	LALEMO	0,7143	0,4333	0,6667	0,6048	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062019	LAMONTOLI	0,6971	0,45	0,6667	0,6046	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062041	BUNGINTENDE	0,7086	0,5	0,6667	0,6251	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062043	PANIMBAWANG	0,8457	0,5167	0,5333	0,6319	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062044	PO'O	0,7257	0,5333	0,6667	0,6419	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062045	BOELIMAU	0,6114	0,5667	0,6667	0,6149	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062046	POARO	0,72	0,5833	0,6667	0,6567	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062047	UMBELE LAMA	0,7714	0,5	0,6667	0,646	BERKEMBANG
720606	BUNGKU SELATAN	7206062048	PULAU DUA DARAT	0,7486	0,4833	0,6667	0,6329	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072001	TEREBINO	0,7543	0,4667	0,8667	0,6959	BERKEMBANG

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072002	TORUKUNO	0,72	0,4	0,8667	0,6622	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072003	NGAPAEA	0,68	0,4333	0,8667	0,66	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072004	PADALA"A	0,7086	0,4833	0,8667	0,6862	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072005	MOROMPAITONGA	0,76	0,4167	0,8667	0,6811	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072006	KOFALAGADI	0,6857	0,5333	0,8667	0,6952	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072008	PADEI LAUT	0,7086	0,45	0,8667	0,6751	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072009	PADEI DARAT	0,7429	0,45	0,8667	0,6865	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072010	SAMARENGGA	0,7886	0,3333	0,8667	0,6629	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072011	MASADIAN	0,72	0,3667	0,8667	0,6511	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072012	PULAU TIGA	0,7657	0,3	0,8667	0,6441	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072013	MATANO	0,6743	0,3833	0,9333	0,6637	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072014	MATARAPE	0,7371	0,4833	0,8667	0,6957	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072015	ULUNIPA	0,7257	0,5	0,8667	0,6975	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072016	WAWANGKOLONO	0,68	0,3833	0,8667	0,6433	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072017	BURANGA	0,6743	0,45	0,8667	0,6637	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072018	DONGKALAN	0,6971	0,3833	0,8667	0,649	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072019	TAFAGAPI	0,7143	0,45	0,8	0,6548	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072020	PULAU TENGAH	0,6514	0,3833	0,8667	0,6338	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072021	MBOKITTA	0,7314	0,3	0,9333	0,6549	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072022	TANJUNG TIRAM	0,7371	0,35	0,8667	0,6513	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072023	TANONA	0,6571	0,3833	0,8667	0,6357	BERKEMBANG
720607	MENUI KEPULAUAN	7206072024	TANJUNG HARAPAN	0,7314	0,4	0,8667	0,666	BERKEMBANG
720608	BUNGKU BARAT	7206082001	BAHOEA REKO-REKO	0,76	0,6333	0,6	0,6644	BERKEMBANG
720608	BUNGKU BARAT	7206082002	WOSU	0,92	0,75	0,9333	0,8678	MANDIRI
720608	BUNGKU BARAT	7206082003	LAROBENU	0,8514	0,6667	0,9333	0,8171	MANDIRI
720608	BUNGKU BARAT	7206082004	UMPANGA	0,76	0,5667	0,8	0,7089	MAJU
720608	BUNGKU BARAT	7206082005	TONDO	0,7486	0,5667	0,6667	0,6606	BERKEMBANG
720608	BUNGKU BARAT	7206082006	TOPOGARO	0,6914	0,5667	0,6667	0,6416	BERKEMBANG
720608	BUNGKU BARAT	7206082007	AMBUNU	0,7429	0,4833	0,6667	0,631	BERKEMBANG
720608	BUNGKU BARAT	7206082008	WATA	0,7029	0,5667	0,6	0,6232	BERKEMBANG
720608	BUNGKU BARAT	7206082012	UEDAGO	0,8457	0,6	0,8667	0,7708	MAJU
720608	BUNGKU BARAT	7206082029	MARGA MULYA	0,7943	0,55	0,6	0,6481	BERKEMBANG
720609	BUMI RAYA	7206092001	PARILANGKE	0,8057	0,65	1	0,8186	MANDIRI
720609	BUMI RAYA	7206092002	BAHONSUAI	0,8514	0,7833	1	0,8783	MANDIRI
720609	BUMI RAYA	7206092003	ATANANGA	0,7771	0,4833	0,8667	0,709	MAJU

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
720609	BUMI RAYA	7206092004	PEBATAE	0,8229	0,8333	0,7333	0,7965	MAJU
720609	BUMI RAYA	7206092005	UMBELE	0,8114	0,6667	0,6667	0,7149	MAJU
720609	BUMI RAYA	7206092006	LAMBELU	0,8057	0,6	0,8667	0,7575	MAJU
720609	BUMI RAYA	7206092007	LIMBO MAKMUR	0,8629	0,6667	0,6667	0,7321	MAJU
720609	BUMI RAYA	7206092008	BERINGIN JAYA	0,7086	0,6	0,8667	0,7251	MAJU
720609	BUMI RAYA	7206092009	SAMARENDA	0,88	0,7167	0,9333	0,8433	MANDIRI
720609	BUMI RAYA	7206092010	LASAMPI	0,76	0,55	0,8667	0,7256	MAJU
720609	BUMI RAYA	7206092011	HARAPAN JAYA	0,7429	0,6167	1	0,7865	MAJU
720609	BUMI RAYA	7206092012	PEBOTOA	0,7429	0,5333	0,9333	0,7365	MAJU
720609	BUMI RAYA	7206092013	KARAUPA	0,7943	0,7	0,8	0,7648	MAJU
720610	BAHODOPI	7206102001	BETE-BETE	0,8743	0,7667	0,6	0,747	MAJU
720610	BAHODOPI	7206102002	PADABAHAO	0,8686	0,8667	0,6	0,7784	MAJU
720610	BAHODOPI	7206102003	LABOTA	0,7886	0,8833	0,8667	0,8462	MANDIRI
720610	BAHODOPI	7206102004	FATUFIA	0,8	0,9333	0,8	0,8444	MANDIRI
720610	BAHODOPI	7206102005	KEUREA	0,8571	0,8833	0,7333	0,8246	MANDIRI
720610	BAHODOPI	7206102006	BAHODOPI	0,8286	0,9333	0,4667	0,7429	MAJU
720610	BAHODOPI	7206102007	LALAMPU	0,7543	0,7167	1	0,8237	MANDIRI
720610	BAHODOPI	7206102008	SIUMBATU	0,7543	0,8333	0,9333	0,8403	MANDIRI
720610	BAHODOPI	7206102009	DAMPALA	0,7657	0,85	1	0,8719	MANDIRI
720610	BAHODOPI	7206102010	LE-LE	0,8	0,7667	1	0,8556	MANDIRI
720610	BAHODOPI	7206102011	BAHO MAKMUR	0,9143	0,9	0,9333	0,9159	MANDIRI
720610	BAHODOPI	7206102012	MAKARTIJAYA	0,7943	0,9	0,8	0,8314	MANDIRI
720612	WITA PONDA	7206122001	SAMPEANTABA	0,8286	0,85	0,8	0,8262	MANDIRI
720612	WITA PONDA	7206122002	EMEA	0,8571	0,75	0,8667	0,8246	MANDIRI
720612	WITA PONDA	7206122006	MOAHINO	0,8914	0,75	0,9333	0,8583	MANDIRI
720612	WITA PONDA	7206122007	SOLONSA	0,8857	0,65	0,6667	0,7341	MAJU
720612	WITA PONDA	7206122008	LANTULA JAYA	0,7829	0,7333	0,9333	0,8165	MANDIRI
720612	WITA PONDA	7206122009	PUNTARI MAKMUR	0,8114	0,8	0,8667	0,826	MANDIRI
720612	WITA PONDA	7206122010	BUMI HARAPAN	0,8171	0,6	0,9333	0,7835	MAJU
720612	WITA PONDA	7206122011	SOLONSA JAYA	0,8686	0,85	1	0,9062	MANDIRI
720612	WITA PONDA	7206122012	UNGKAYA	0,9486	0,8167	0,6667	0,8106	MAJU
720615	BUNGKU PESISIR	7206152001	PUUNGKEU	0,7371	0,45	0,6667	0,6179	BERKEMBANG
720615	BUNGKU PESISIR	7206152002	TANGOFA	0,8514	0,8	0,9333	0,8616	MANDIRI
720615	BUNGKU PESISIR	7206152003	ONE ETE	0,8057	0,6167	0,6667	0,6963	BERKEMBANG
720615	BUNGKU PESISIR	7206152004	TANDAOLEO	0,7943	0,6667	0,6667	0,7092	MAJU
720615	BUNGKU PESISIR	7206152005	LAFEU	0,8171	0,6167	0,5333	0,6557	BERKEMBANG
720615	BUNGKU PESISIR	7206152006	TORETE	0,7543	0,6333	0,6	0,6625	BERKEMBANG
720615	BUNGKU PESISIR	7206152007	BULELENG	0,8171	0,5333	0,6667	0,6724	BERKEMBANG
720615	BUNGKU PESISIR	7206152008	LAROENAI	0,72	0,65	0,7333	0,7011	BERKEMBANG
720615	BUNGKU PESISIR	7206152009	SAMBALAGI	0,7543	0,4	0,6667	0,607	BERKEMBANG
720615	BUNGKU PESISIR	7206152010	WERE'A	0,8229	0,4333	0,6667	0,641	BERKEMBANG
720618	BUNGKU TIMUR	7206182001	ONEPUTEH JAYA	0,8057	0,8	0,8667	0,8241	MANDIRI
720618	BUNGKU TIMUR	7206182002	BAHOMOTEFE	0,7829	0,7667	0,9333	0,8276	MANDIRI

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
720618	BUNGKU TIMUR	7206182003	BAHOMOAHI	0,8914	0,6667	0,8667	0,8083	MAJU
720618	BUNGKU TIMUR	7206182004	ULULERE	0,8686	0,7	0,9333	0,834	MANDIRI
720618	BUNGKU TIMUR	7206182005	KOLONO	0,8629	0,8667	0,9333	0,8876	MANDIRI
720618	BUNGKU TIMUR	7206182006	GERESA	0,8171	0,7333	1	0,8502	MANDIRI
720618	BUNGKU TIMUR	7206182007	LAROUÉ	0,7486	0,5333	0,8667	0,7162	MAJU
720618	BUNGKU TIMUR	7206182008	NAMBO	0,8343	0,7	0,6667	0,7337	MAJU
720618	BUNGKU TIMUR	7206182009	UNSONGI	0,6571	0,6833	0,8	0,7135	MAJU
720618	BUNGKU TIMUR	7206182010	LAHUAFU	0,8229	0,5667	0,8	0,7298	MAJU

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa 26,19 persen atau terdapat 33 Desa dengan Status Mandiri dari 126 desa, realisasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang baru mencapai 22 desa. Status desa Maju dengan jumlah 33 desa atau 26,19 persen, realisasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya berjumlah 31 desa. Sementara untuk status desa berkembang dengan jumlah 60 desa atau mencapai 47, 62 persen, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 49 desa. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal untuk tahun 2024 sudah tidak ada lagi. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan V Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan V RPD Tahun 2024

TUJUAN		SASARAN		SATUAN	CAPAIAN					TERGET 2024			REALISASI	% Capaian	OPD PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	RPD	RKPD	P-RKPD				
Menciptakan Tatahan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana	Indeks Rasa Aman			Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	70,00-75,00	70,00-75,00	70,00-75,00	NA	NA		
		Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang aman dan Tentram damai dan harmonis	Angka Kriminalitas	Persen	25,00	28,00	19,42	19,42	9,21	19,00-17,50	19,00-17,50	19,00-17,50	9,21 (*)	190,01	Satuan Polisi Pamongpraja	Semua OPD
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,71	84,89	85,03	85,14	85,19	85,00-86,50	85,00-86,50	85,00-86,50	85,19 (*)	100,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua OPD	
guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah	Indeks Rawan Bencana (IRB) Kabupaten			Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	Level 2	Level 2	Level 2	NA	NA		
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan Desa	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	174-173,50	174-173,50	174-173,50	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Semua OPD
		Indeks Desa Membangun	Indeks	NA	0,6147	0,6261	0,6528	0,6871	0,6528-0,6178	0,6528-0,6178	0,6528-0,6178	0,7286	111,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua OPD	

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kab. Morowali *(Data Sementara)

2.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah/Kunci

Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai. Pada RKPD tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD 2024-2026 Kabupaten Morowali juga menetapkan target kinerja daerah terkait penyelenggaraan urusan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan indikator berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Morowali
Tahun 2022 s/d 2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1,1	Ketahanan Energi,Air dan Kemandirian Pangan				
1	Indeks Ketahanan Pangan	81,51	82,36	81,44	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	6,69	7,9	4,14	
3	Konsumsi Listrik Perkapita	391,41	362,6	335,24	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	36,33	36,15	37,3	
5	Kapasitas Air Baku	60.613,80	60.613,80	66.563,60	
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	15,4	15,56	37,3	
1,2	Kualitas Lingkungan Hidup				
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0	0	0	
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	30,643,58	32,164.53	31,107.13	
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanna Penuh Pengumpulan Sampah	65	65	70	
4	Persentase timbulan sampah yang dikelola (daur ulang)	NA	NA	92,59	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
5	Proporsi Limbah B3 yang dikelola	62,5	81,5	83,33	
1,3	Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim				
1	Penurunan Insensitas Emisi GRK	17,83	11,27	18,52	
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)	174.82	173.25	171.17	
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	NA	0,34	0,34	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,01	79,27	80,84	
1,4	Demografi				
1	Rasio Penduduk	122,15	122,35	115	
2	Kepadatan Penduduk	32,21	31	36,36	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,01	1,93	8,16	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
2,1	Kesejahteraan Ekonomi				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	28.21	20.34	16.26	
2	Tingkat Kemiskinan	12,58	12,31	11,55	
3	PDRB Per Kapita	421.701,28	498.616,86	570.117,47	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,2	2,84	2,84	
5	Indeks Gini	0,285	0,281	0,275	
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	42	48	49	
7	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	73.39	73.82	74.36	
2,2	Kesehatan untuk Semua				
1	Usia Harapan Hidup	69,23	69,37	70,84	
2	Prevalensi Stunting	23,3	26	22,6	
3	Angka Kematian Ibu	282,26	127,63	248,02	
4	Angka Kematian Anak				
*	Angka Kematian Bayi	23.39	14.36	NA	
*	Angka Kematian Balita	25.81	15.95	3.60	
5	Cakupan penemuan kasus TB (treatment coverage)	354	361	705	
6	Angka Keberhasilan pengobatan TB (treatment success rate)	103.6	90	89.9	
7	Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional	163.600	178.220	214.927	
8	Indeks Keluarga Sehat	0.432	0.432	0.444	
9	Indeks Kesehatan	0,757	0,76	0,79	
2,3	Pendidikan Berkualitas yang Merata				

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,35	9,37	9,38	
2	Harapan Lama Sekolah	13,36	13,38	13,39	
3	Angka Literasi/Numerasi :				
4	Literasi Membaca SD	47,44	52,05	56,92	
5	Literasi Membaca SLTP	58,65	62,01	65,94	
6	Numerasi SD	35,83	40,98	50,19	
7	Numerasi SLTP	58,65	56,33	58,44	
8	APS PAUD	0,29	0,16	0,12	
9	APS SD/SMP	0,18	0,38	0,32	
10	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	NA	NA	11,50	
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	58,71	61,68	
12	Indeks Literasi Digital	40,77	45,97	44,98	
13	Indeks Pendidikan	68,28	68,4	68,46	
2,4	Perlindungan Sosial yang Adaptif				
1	Rumah Layak Huni	81,71	82,78	82,55	
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bersih	91,91	90,97	88,92	
3	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	NA	NA	23,59	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (100%)	0	0	0	
2,5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,30 *	75,80 *	76,2 *	
2	Persentase Jalan Kondisi Mantap	33,9	29,8	32,46	
3	Persentase Akses Jaringan Internet	86,33	86,9	87	
2,6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif				
1	Indeks Perlindungan Anak	78,84	NA	NA	
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	57,72	66,33	66,60	
3	Indeks Pembangunan Keluarga	57,72	66,33	66,60	
4	Indeks Ketimpangan Gender	0,581	0,57	0,476	
5	Indeks Pemberdayaan Gender	55,25	56,01	64,5	
6	TPAK Perempuan	36,97	24,21	30,82	
7	Indeks Pembangunan Gender	85,14	85,19	85,42	
8	Indeks Pembangunan Pemuda	53,2	54,10	55,00	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
3,1	Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1	Angka Ketergantungan	43,38	45,06	54,75	
3,2	Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi				
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	NA	NA	NA	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	31,91	25,29	20,01	
3	Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum	56,25	16,93	15,41	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,74	58,52	61,49	
5	Indeks Inovasi Daerah	55,84	46,34	45,89	
6	Persentase UMKM yang naik kelas	2,06%	4,05%	5,18%	
3,3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru				
1	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	NA	44,78	39,20	
3,4	Transformasi Digital				
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	NA	NA	NA	
3,5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
1	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	39,19	47,1	54,66	
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	37.313	37.876	39.511	
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)	66.841	69.778	77.647	
4	Ekspor Barang dan Jasa	71.906	79.976	85.535	
3,6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	79	426	108	
2	Presentase Desa Mandiri	2,83	17,5	30,95	
3	Indeks Desa Membangun	0,6528	0,6871	0,7286	
3,7	Stabilitas Ekonomi Makro				
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	2,75	3,67	6,48	
2	Tingkat Inflasi	6,62	4,35	1,23	
3	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi	45,5	45,75	46,01	
4	Pertumbuhan Industri	37,44	NA	NA	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
4,1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				
1	Indeks Reformasi Hukum	NA	45,1	87,18	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,97	2,88	3,25	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
3	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	
4	Indeks Pelayanan Publik	61,95	60,9	73,43	
5	Indeks Integritas Nasional	73,55	71,86	NA	
6	Nilai SAKIP	C	CC	B	
4,2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial				
1	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	
2	Indeks Profesionalitas ASN	48,21	67,39	62,67	
4,3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel				
1	Indeks Daya Saing Daerah	3,13	2,26	2,99	
2	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	
4	Survei Penilaian Integritas	73,55	71,86	NA	
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	60,97	81,05	81,05*	
	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah				
A	Urusan Pemerintahan Wajib				
1	Wajib Pelayanan Dasar				
1.1	Pendidikan				
1	Skor Literasi/Numerasi SD/SMP*				
-	Skor Literasi SD	47,44	52,05	56,92	
-	Skor Literasi SMP	58,65	62,01	65,94	
-	Numerasi SD	35,83	40,98	50,19	
-	Numerasi SMP	58,65	56,33	58,44	
2	Skor Literasi/Numerasi PAUD *				
-	Harapan Lama Sekolah	9,35	9,37	9,38	
-	Rata-Rata Lama Sekolah	13,36	13,38	13,39	
3	Indeks Pendidikan	68,28	68,4	68,46	
4	Angka Putus Sekolah				
*	APS SD	0,29	0,16	0,12	
*	APS SMP	0,18	0,38	0,32	
*	APS SMA	0,48	5,1	0	
5	Angka Melek Huruf	99,14	98,91	99,25	
6	Akreditasi Sekolah di Kabupaten Morowali				

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
*	Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD)	NA	20,33	NA	
	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	NA	84,97	NA	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	NA	97,3	NA	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	NA	88,89	NA	
7	Angka Partisipasi Kasar				
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	109.40	96.86	107.45	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	99.41	95.01	103.78	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	98,22	89,15	96,68	
8	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	100	100	100	
9	Angka Partisipasi Murni				
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	93,67	93,68	92,34	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	73,13	74,53	78,18	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	70,62	79,34	70,45	
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	97.78	97.04	96.86	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	94.97	95.39	95.00	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	90,06	92,49	NA	
11	Angka Kelulusan				
*	SD	100	100	100	
*	SMP	100	100	100	
*	SMA	100	100	100	
12	Angka Yang Melanjutkan				
*	SD	100	98,4	98,53	
*	SMP	99,71	99,03	99,12	
*	SMA	76,41	79	NA	
13	Fasilitas Pendidikan				
14	Rasio Ketersediaan Sekolah				
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	0,11	0,11	0,11	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	0,16	0,16	0,16	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	0,23	0,18	0,18	
15	Rasio Guru/Murid Sekolah				
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	11,39	11,46	11,09	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	12,73	13,15	12,53	
16	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah				
*	Pendiidkan Anak Usia Dini (SD/MI)	01:23	01:17	01:13	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	01:14	01:12	01:12	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	01:20	01:19	01:19	
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	87,69	99,96	90,14	
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,2	99,53	111,67	
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	80,12	93,58	99,42	
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	
1.2	Kesehatan				
1	Umur Harapan Hidup	69,23	69,37	69,41	
2	Prevalensi Stunting	23,3	26	22,6	
3	Indeks Kesehatan	0,757	0,76	0,79	
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	7,6	14,5	10,5	
5	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	9,5	16,1	12,2	
6	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	11,3	11,9	8,1	
7	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	214	129	237	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	163.600	178.220	214.927	
9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	0,8	1	1,1	
10	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,261	0,257	0,221	
11	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,011	0,017	0,015	
12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,448	0,53	0,533	
13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	5.963	7.640	9.243	
14	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100.00	100.00	100.00	
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	
16	Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak	155,5	119,9	125,7	
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	354	361	705	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	200.86	201.46	354.33	
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	176	183	394	
20	Penderita Diare Yang Ditangani	2,911	2,865	3,167	
21	Angka Kejadian Malaria	10,78	5,58	6,38	
22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0,02	0,035	0,04	
23	Cakupan Puskesmas	133.33	133.33	120.00	
24	Cakupan Pembantu Puskesmas	18.57	18.57	19.29	
25	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	82.18	74.09	77.24	
26	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1.82	2.13	2.21	
27	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	50	100	100	
28	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	74.93%	
29	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	
30	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	
31	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	
32	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	99.89%	
33	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	75.46%	
34	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	83.19%	
35	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	86.72%	
36	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	91.92%	
37	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	89.22%	
38	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	90.56%	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	18,7	18,9	19	
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,18	0,24	0,2	
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,0054	0,0053	0,0056	
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	24,3	31,79	25,28	
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	71,8	65,22	75,16	
6	Rasio Jaringan Irigasi	0,87	0,61	NA	
7	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	91,91	90,97	88,92	
8	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk	2,08	2,06	2,36	
9	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	46,7	51,35	53,95	
10	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengamanan Pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	54,01	56,6	59,82	
11	rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	46,14	68,26	87	
12	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	56,69	70,46	72,29	
13	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71,48	78,28	78,5	
14	rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	1,58	100	43,27	
15	tingkat kemantapan jalan	64,62	45,05	33,22	
16	rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	7,45	10	9,4	
17	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	81,71	82,78	82,55	
3	Rasio Rumah Layak Huni	81,71	82,78	82,55	
4	capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	
5	capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	
6	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	5,89	2,51	3,67	
7	penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	17,45	17,22	6,65	
8	persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	97,91	97,91	97,91	
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
	Pol PP				
1	Angka Kriminalitas	19,42	9,21	9,21	
2	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	825	825	825	
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	5	14	14	
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	75	100	100	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	50	92,86	61,11	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	60,78	1,67	
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	60,78	28,67	
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	84,51	
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	78,57	100	
10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	5	13	38	
	Penanggulangan Bencana				
1	Indeks Resiko Bencana	174.82	173.25	171.17	
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	NA	0,34	0,34	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7.00	14.00	14.00	
1.6	Sosial				
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	51.030	52.411	53.411	
2	Persentase PMKS yang tertangani	116,34	89,03	89,04	
3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1	0	0	
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	
5	Korban bencana alam (Jiwa/KK)	2.850	414	394	
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0	0	0	
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	23,74	39,2	43,73	
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
2.7	Tenaga Kerja				
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	187,55	94.53	175.67	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.20	2.84	2.84	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,74	58,52	61,49	
4	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang)	35	38	41	
5	Rasio Lulusan S1/S2/S3	15,12	15,72	16,32	
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	26,67	50	
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	5,2	5,85	14,87	
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	55,55	100	62,5	
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	24,49	59,99	40,22	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,14	85,19	85,42	
2	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	0,581	0,57	0,476	
3	Indeks Pemberdayaan Gender	55,25	56,01	64,5	
4	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan dan swasta	11,74	10,59	21,21	
5	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	4	4	4	
6	Rasio KDRT	0,15	0,21	0,21	
7	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	36,97	24,21	30,82	
8	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	1,06	1,03	1,07	
9	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	0,87	1,03	0,92	
10	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	1,01	1,18	1,1	
11	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25,17	6,89	32,49	
12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100	100	100	
13	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	16,66	20,03	0,021	
2.9	Pangan				
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81,51	82,36	81,44	
2	Ketersediaan Pangan Utama	132,32	235,63	249,85	
3	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita				
	Energi (Kilo Kal)	2,040.88	2,256.01	2,067.61	
	Protein Perkaapita (Gram)	61.15	68.42	64.10	
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	54,02	50,85	76,93	
2.1	Pertanahan				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	
2	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	
3	persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	100	NA	
4	persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	55	57,6	NA	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
5	persentase ketersediaan tanah untuk Masyarakat	NA	NA	NA	
2.11	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,01	80,01	78,17	
2	Indeks Kualitas Air	68,89	67,33	64,39	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	92,22	92,26	83,46	
4	Indeks Kualitas Udara	86,2	83,33	92,6	
5	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	
6	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	
7	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada	Ada	Ada	
8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
9	Penetapan Hak MHA	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
10	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
11	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	15,13	14,19	18,15	
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	60	33,33	9,71	
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	0,99	1	0,99	
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,25	0,13	0,06	
3	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	
5	Perekaman KTP elektronik	99,02	100	99,58	
6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	31,82	61,56	45,59	
7	Kepemilikan akta kelahiran	97,68	97,17	97,62	
8	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	18,92	100	100	
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6528	0,6871	0,7286	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100	100	100	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	143	143	144	
4	Persentase PKK Aktif	100	100	100	
5	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	
6	Persentase pengentasan desa tertinggal	86	44.19	0	
7	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	48.65	23.75	44,44	
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,72	66,33	66,60	
2	Angka Stunting (SSGI)	23,3	26	22,6	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	4.96	1,67	11.04	
4	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	87.34	85.99	88.69	
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	68.71	99.75	59.37	
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17.54	25.41	16.70	
7	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	
8	TFR (Angka Kelahiran Total)	0.911	02.04	1.81	
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	69.02	72.18	66.81%	
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0.15	8.81	17.81%	
2,2	Perhubungan				
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	18.851,00	32.400,00		
2	Rasio Ijin Trayek	12	36	NA	
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	NA	
4	Pemasangan Rambu-Rambu	57	189	NA	
5	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	01:09	01:11	NA	
6	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun				
	Angkutan Laut				
	Jumlah Penumpang Turun	9.676,72	11.604,00	NA	
	Jumlah Penumpang Naik	9.718,62	10.692,00	NA	
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	214.033,55	6.684,00	NA	
	Jumlah barang muat (ton)	500.409,20	5.964,00	NA	
	Angkutan Udara				

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Penumpang Datang	31.271,00	56.092,00	NA	
	Jumlah Penumpang Berangkat	21.973,00	50.431,00	NA	
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	244.256,00	450.705,00	NA	
	Jumlah barang muat (ton)	99.202,00	280.291,00	NA	
7	rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.49	0.51	0.51	
8	kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0.87	0	0.34	
2,2	Komunikasi dan Informatika				
1	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	1,97	2,88	3,25	
2	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Layanan	2,87	3,7	4	
3	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen	1	1,18	1,64	
4	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Tata Kelola	1,3	2,5	2,8	
5	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Kebijakan	1,3	2,9	3,5	
6	Akses Jaringan Komunikasi	86,33	86,9	87	
7	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	79.09	77.88	81.71	
8	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	61.03	61.22	68.48	
9	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	60.04	6.5	8.69	
10	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	75.68	76.32	74.36	
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	34,86	97,3	100	
12	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57,44	68,36	100	
2,2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Persentase Koperasi Aktif	39,1	40,12	43,2	
2	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	21,31	21,54	21,92	
3	persentase usaha mikro yang menjadi Wirausaha	1,9	4,05	7,95	
2,2	Penanaman Modal				
1	Persentase Peningkatan Investasi	33,55	-4,99	28,1	
2	Nilai Investasi	96.602.530	91.786.100	117.577.986	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
3	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	87	70	70	
4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	96.602.530	91.786.100.	117.577.986	
		.000.000	000.000	.923.142	
5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	33,55	-4,99	28,1	
2,2	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,20	54,10	55,00	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,83	2,21	2,14	
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	78,73	62,2	21,5	
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	171	15	1	
2,2	Statistik				
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA	ADA	
2	Buku Kabupaten dalam angka	ADA	ADA	ADA	
3	Buku "PDRB"	ADA	ADA	ADA	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	
2,2	Persandian				
1	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	1,97	2,88	3,25	
2	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Layanan	2,87	3,7	4	
3	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen	1	1,18	1,64	
4	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Tata Kelola	1,3	2,5	2,8	
5	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Kebijakan	1,3	2,9	3,5	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	0	52,4	
2,2	Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	90,62	90,22	80	
2,2	Perpustakaan				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70,63	27,81	156,14	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	2508	5105	5105	
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	56,86	61,28	60,53	
2,2	Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	0	27,51	27,28	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	1	1	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan				
3,3	Kelautan dan Perikanan				
1	Nilai Tukar Nelayan	NA	104,4	93,22	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	NA	114,76	91,42	
3	Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	02.08	1.72	1.51	
4	Produksi Perikanan (ton)				
	Produksi Perikanan Laut	33420,8	37775	33449	
	Produksi Perikanan Darat	2981	3463		
5	Produksi Perikanan Budidaya	2220,32	34292	9505,24	
6	Konsumsi Ikan	57,3	52,33	64,16	
7	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	0,4	0,4	0,4	
3,3	Pariwisata				
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi , Makan, Minum	56,25	16,93	15,41	
2	Jumlah Kunjungan Wisata	3624	3516	6194	
3	Lama Kunjungan Wisata	NA	NA	NA	
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	10,29	4,39	1,63	
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-50,99	460	96,96	
6	Tingkat hunian akomodasi	100	28,61	23,51	
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,01	0,01	0,01	
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,01	0,01	0,01	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
3.27	Pertanian				
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	NA	101,83	117,69	
2	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	02.08	1.72	1.51	
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar				
	Padi	4,567	4,9	4,015	
	Jagung	1,581	4,1	NA	
	Ubi Jalar	20,395	12,974	NA	
	Ubi Kayu	29,069	25,544	NA	
	Kacang Tanah	1,077	1,06	NA	
	Kacang Kedelai	20.82	11.10	NA	
	Kacang Hijau	0.66	1.00	NA	
4	Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar				
	Padi	42.583,00	26.940,00	NA	
	Jagung	4.937,22	684,7	NA	
	Ubi Jalar	778,44	648,7	NA	
	Ubi Kayu	5.070,48	3.677,57	NA	
	Kacang Tanah	55,12	45,07	NA	
	Kacang Kedelai	267,3	352	NA	
	Kacang Hijau	34,37	41,5	NA	
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	-25.61	48.37	-41,87	
3,3	Perdagangan				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1.25	1.26	1.39	
2	Net Ekspor Barang Dan Jasa (ADHK)	37,654.87	52,683.40	53,552.96	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	56,96	100	19,35	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	58,33	8,33	79,56	
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	8,09	0,17	1,57	
3,3	Perindustrian				
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	67.36	70.13	73.00	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	7,68	5,63	17,6	
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	NA	NA	NA	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	
3,3	Transmigrasi				
1	Persentase penduduk miskin di Kawasan transmigrasi yang di Bina	NA	NA	NA	
4	Unsur Pendukung				
4,1	Sekretariat Daerah				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	
2	Nilai Sakip	C	CC	B	
3	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	NA	NA	NA	
4,2	Sekretariat DPRD				
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	NA	NA	NA	
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada	Ada	Ada	
5	Unsur Penunjang				
5,1	Perencanaan				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	NA	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	
5,2	Keuangan				
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	60,97	81,05		
2	Indeks Penyerapan Anggaran	NA	NA	NA	
3	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	NA	NA	NA	
4	Indeks Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WDP	
5	Persentase SILPA Terhadap APBD	22,37	14,55	30,41	
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
7	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	NA	NA	NA	
8	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
*	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	NA	NA	NA	
*	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	NA	NA	NA	
*	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	NA	NA	NA	
*	Total Kredit/PDRB (%)	NA	NA	NA	
	Inklusi Keuangan (%)	NA	NA	NA	
9	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	16,04	13,69	14,96	
10	Rasio PAD	22,6	30,87	35,09	
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	
5,3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Profesionalitas ASN	48,21	67,39	62,67	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			KET.
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
2	Presentase disiplin ASN				
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,47	63,63	62,1	
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,92	19,36	23,68	
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,34	8,88	23,32	
5.5	Penelitian dan Pengembangan				
1	Indeks Inovasi Daerah	55,84	46,34	45,89	
6	Unsur Pengawasan				
6.1	Inspektorat				
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	74,56	73,55	71,86	
7	Unsur Kewilayahan				
7.1	Kecamatan				
1	Angka Kriminalitas	19,42	9,21	9,21	
8	Unsur Pemerintahan Umum				
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,3	75,8	76,2	

Sumber : Data diolah Bappelitbangda Kab. Morowali Tahun 2024 (* Data Sementara)

2.3 Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2025

✓ Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.622.058.454.556,00 mengalami penurunan pada perubahan RKPD tahun 2025 menjadi Rp. 2.523.118.319.556,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sementara APBD Kabupaten Morowali sampai dengan tanggal 09 Mei tahun 2025, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 451.991.542.588,50 atau 17,91 persen dari Target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.622.058.454.556,00 adapun rincian pendapatan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali sampai dengan tanggal 09 Mei Tahun 2025 sebesar Rp. 116.166.829.755,50 atau mencapai 13,45 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 863.808.302.035,00. Prognosis sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 863.808.302.035,00. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 45.687.647.241,67 atau mencapai 8,31 persen dari target sebesar Rp. 549.684.302.035,00. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 45.201.931.288,00 atau mencapai 18,38 persen dari target sebesar Rp. 245.864.000.000,00. Sementara itu untuk Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan belum ada realisasi, dari target Rp. 2.400.000.000,00 dan Realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 25.277.251.225,83 atau 38,38 persen dari target sebesar Rp. 65.860.000.000,00.
- Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Morowali sampai dengan tanggal 09 Mei Tahun 2025 sebesar Rp. 335.824.712.833,00 atau mencapai 20,34 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.749.699.593.345,00. Prognosis sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.650.759.458.345,00. Adapun Realisasi Pendapatan Transfer ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 335.824.712.833,00 atau sebesar 20,80 persen dari target sebesar Rp. 1.713.602.976.000,00, sementara untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah belum ada realisasi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 36.096.617.345,00.
- Realisasi Lain-lain PAD yang SAH Kabupaten Morowali sampai dengan 09 Mei Tahun 2025 belum ada realisasi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.550.559.176,00. Untuk jelasnya Realisasi Pendapatan Kabupaten Morowali sampai dengan 09 Mei Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

✓ **Realisasi Belanja Daerah**

Belanja Daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.864.601.336.932,00 mengalami peningkatan pada Perubahan RKPD menjadi Rp. 3.380.667.110.658,85. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali sampai dengan tanggal 09 Mei Tahun 2025, realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp. 531.138.045.734,16 atau mencapai 18,47 persen dari total belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali pada tahun 2024 Sebesar Rp. 2.864.601.336.932,00 adapun rincian belanja daerah sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Morowali sampai dengan 09 Mei tahun 2025 sebesar Rp. 316.599.214.354,00 atau mencapai 17,78 persen dari total belanja operasi sebesar Rp. 1.862.155.895.575,12. Prognosis sampai dengan 31 Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.922.688.711.320,62. Adapun Realisasi Belanja operasi ini terdiri dari Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 179.974.573.768,00 atau mencapai 22,51 persen dari total belanja pegawai, Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 126.440.469.761,00 atau mencapai 14,49 persen dari total belanja barang dan jasa, untuk Belanja Bunga belum ada realisasi dari total belanja bunga, Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 9.145.170.825,00 atau mencapai 12,18 persen dari total belanja hibah dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.039.000.000,00 atau mencapai 3,27 persen dari total belanja bantuan sosial.
- Realisasi Belanja Modal Kabupaten Morowali sampai dengan 09 Mei tahun 2025 sebesar Rp. 132.586.693.597,16 atau mencapai 17,78 persen dari total belanja modal sebesar Rp. 703.387.193.954,15. Prognosis sampai dengan 31 Desember sebesar Rp. 1.158.920.151.935,50. Adapun Realisasi Belanja Modal ini terdiri dari Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 25.042.110.000,00 atau mencapai 53,04 persen dari total belanja tanah, realisasi belanja

Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 20.393.013.759 atau mencapai 22,37 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin, Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 27.791.914.978,16 atau mencapai 6,68 persen dari total belanja gedung dan bangunan, realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 58.726.104.860,00 atau mencapai 24,39 persen dari total belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja Modal Aset Tetap Lainnya belum ada realisasi dari target belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Sementara itu untuk Realisasi belanja Aset Lainnya sebesar Rp. 87.550.000,00 atau sebesar 68,59 persen.

- Untuk Belanja Tidak Terduga sampai dengan 09 Mei tahun 2025 belum ada realisasi dari target belanja tidak terduga sebesar Rp. 10.975.325.198,73.
- Realisasi belanja transfer sampai dengan 09 Mei tahun 2025 sebesar Rp. 81.952.137.783,00 atau mencapai 28,75 persen dari total belanja transfer pada tahun 2025. Realisasi Belanja transfer ini terdiri dari Realisasi belanja bantuan keuangan daerah sebesar 81.952.137.783,00 atau mencapai 39,21 persen dari total belanja bantuan keuangan daerah pada tahun 2025. Sementara untuk belanja transfer Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa belum ada realisasi dari target belanja transfer Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa. Lebih jelasnya Realisasi belanja daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

✓ **Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Morowali sampai dengan tanggal 09 Mei Tahun 2025, realisasi Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 859.11.409.652,85 atau mencapai 243,71 persen dari total pembiayaan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali yaitu sebesar Rp. 257.605.500.926,00. Adapun rincian Pembiayaan daerah sebagai berikut :

- Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah pada sampai dengan 09 Mei 2025 adalah sebesar Rp. 872.611.409.652,85 atau mencapai 237,40 persen dari target Penerimaan Pembiayaan daerah dalam APBD kabupaten Morowali sebesar Rp. 257.605.500.926,00 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya.
- Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah sampai dengan 09 Mei tahun 2025 sebesar Rp. 13.500.000.000,00 atau sebesar 89,63 persen dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 13.500.000.000 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 1.562.618.550,00 Lebih jelasnya Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Kabupaten Morowali Tahun 2025

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN APBD	ANGGARAN PERUBAHAN APBD	(-/+)	REALISASI 2025 TERHADAP ANGGARAN PENETAPAN APBD	% 2025
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.622.058.454.556,00	2.523.118.319.556,00	(98.940.135.000,00)	451.991.542.588,50	17,91
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	863.808.302.035,00	863.808.302.035,00	0,00	116.166.829.755,50	13,45
4.1.01	Pajak Daerah	549.684.302.035,00	549.684.302.035,00	0,00	45.687.647.241,67	8,31
4.1.02	Retribusi Daerah	245.864.000.000,00	245.864.000.000,00	0,00	45.201.931.288,00	18,38
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.860.000.000,00	65.860.000.000,00	0,00	25.277.251.225,83	38,38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	863.808.302.035,00	863.808.302.035,00	0,00	116.166.829.755,50	13,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.749.699.593.345,00	1.650.759.458.345,00	(98.940.135.000,00)	335.824.712.833,00	20,34
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.713.602.976.000,00	1.614.662.841.000,00	(98.940.135.000,00)	335.824.712.833,00	20,80
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.096.617.345,00	36.096.617.345,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN APBD	ANGGARAN PERUBAHAN APBD	(-/+)	REALISASI 2025 TERHADAP ANGGARAN PENETAPAN APBD	% 2025
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	36.096.617.345,00	36.096.617.345,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.650.759.458.345,00	1.650.759.458.345,00	0,00	335.824.712.833,00	20,34
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.622.058.454.556,00	2.523.118.319.556,00	(98.940.135.000,00)	451.991.542.588,50	17,91
5	BELANJA DAERAH	2.864.601.336.932,00	3.380.667.110.658,85	516.065.773.726,85	531.138.045.734,16	18,47
5.1	BELANJA OPERASI	1.862.155.895.575,12	1.922.688.711.320,62	60.532.815.745,50	316.599.214.354,00	17,78

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN APBD	ANGGARAN PERUBAHAN APBD	(-/+)	REALISASI 2025 TERHADAP ANGGARAN PENETAPAN APBD	% 2025
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01	Belanja Pegawai	799.726.894.186,04	860.089.271.877,58	60.362.377.691,54	179.974.573.768,00	22,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	952.549.185.249,08	940.565.647.913,04	(11.983.537.336,04)	126.440.469.761,00	14,49
5.1.03	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	1.664.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.204.833.140,00	80.463.840.640,00	4.259.007.500,00	9.145.170.825,00	12,18
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.010.983.000,00	39.905.950.890,00	7.894.967.890,00	1.039.000.000,00	3,27
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.862.155.895.575,12	1.922.688.711.320,62	60.532.815.745,50	316.599.214.354,00	17,78
5.2	BELANJA MODAL	703.387.193.954,15	1.158.920.151.935,50	455.532.957.981,35	132.586.693.597,16	16,60
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.997.982.885,00	146.479.572.625,92	99.481.589.740,92	25.042.110.000,00	53,04
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.798.782.803,00	136.735.770.715,50	45.936.987.912,50	20.939.013.759,00	22,37
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.219.531.596,32	538.608.491.387,25	225.388.959.790,93	27.791.914.978,16	6,68
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	251.779.836.669,83	334.349.216.556,83	82.569.379.887,00	58.726.104.860,00	24,39
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	463.410.000,00	2.619.450.650,00	2.156.040.650,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	127.650.000,00	127.650.000,00	0,00	87.550.000,00	68,59

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN APBD	ANGGARAN PERUBAHAN APBD	(-/+)	REALISASI 2025 TERHADAP ANGGARAN PENETAPAN APBD	% 2025
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA MODAL	703.387.193.954,15	1.158.920.151.935,50	455.532.957.981,35	132.586.693.597,16	16,60
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.975.325.198,73	10.975.325.198,73	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.975.325.198,73	10.975.325.198,73	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	10.975.325.198,73	10.975.325.198,73	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	288.082.922.204,00	288.082.922.204,00	0,00	81.952.137.783,00	28,75
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	76.054.830.204,00	76.054.830.204,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212.028.092.000,00	212.028.092.000,00	0,00	81.952.137.783,00	39,21
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	288.082.922.204,00	288.082.922.204,00	0,00	81.952.137.783,00	28,75
	JUMLAH BELANJA	2.864.601.336.932,00	3.380.667.110.658,85	516.065.773.726,85	531.138.045.734,16	18,47
	SURPLUS/DEFISIT	(242.542.882.376,00)	(857.548.791.102,85)	(615.005.908.726,85)	(79.146.503.145,66)	22,45
6	PEMBIAYAAN DAERAH	257.605.500.926,00	872.611.409.652,85	615.005.908.726,85	859.111.409.652,85	243,71
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	257.605.500.926,00	872.611.409.652,85	615.005.908.726,85	872.611.409.652,85	237,40

Kode Rek.	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN APBD	ANGGARAN PERUBAHAN APBD	(-/+)	REALISASI 2025 TERHADAP ANGGARAN PENETAPAN APBD	% 2025
1	2	3	4	5	6	7
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	257.605.500.926,00	872.611.409.652,85	615.005.908.726,85	872.611.409.652,85	237,40
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	257.605.500.926,00	872.611.409.652,85	615.005.908.726,85	872.611.409.652,85	237,40
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.062.618.550,00	15.062.618.550,00	0,00	13.500.000.000,00	89,63
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	13.500.000.000,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.562.618.550,00	1.562.618.550,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.062.618.550,00	15.062.618.550,00	0,00	13.500.000.000,00	89,63
	PEMBIAYAAN NETTO	242.542.882.376,00	857.548.791.102,85	615.005.908.726,85	859.111.409.652,85	243,71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	779.964.906.507,19	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Morowali Tahun 2025 (Pengarikan 09 Mei 2025)

2.4 Capaian Kinerja Indikator Program.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali untuk periode tahun 2025 merinci besaran proyeksi Kapasitas Riil Keuangan yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Besaran nilai Kapasitas Riil Keuangan sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program prioritas, olehnya penganggaran terhadap sejumlah program sudah memperhitungkan Kapasitas Riil Keuangan dengan mempertimbangkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika komponen pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan komponen Belanja Langsung (BL).

Evaluasi kinerja perangkat daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Perangkat daerah sebagai pelaksana program memiliki peran penting dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah Kabupaten Morowali. Untuk itu evaluasi terhadap kinerja urusan/perangkat daerah dilakukan untuk memberikan gambaran capaian perangkat daerah sekaligus dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pejabat kepala daerah terhadap kinerja perangkat daerah di Kabupaten Morowali. Evaluasi perangkat daerah Kabupaten Morowali periode pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan perbandingan capaian indikator program dan realisasi keuangan perangkat daerah Kabupaten Morowali. Hasil evaluasi kinerja OPD di Kabupaten Morowali dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.18
Evaluasi Kinerja Program Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	Dinas Pendidikan			541.613.824.734,00	0,00	0,00	65.146.905.693,00			
1.2.1.1.1.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indikator program. Presentase Pengelolaan Satuan Pendidikan	97%	275.425.518.658,00	0,00	0,00	17.695.879.419,00	-	-	-
1.2.1.1.2.	Program.PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Yang dikembangkan	98,50%	1.035.362.100,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.3.	Program.PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Tenaga Pendidik yang bersertifikat Pendidik	100%	3.794.653.348,00	0,00	0,00	910.080.000,00	-	-	-
1.2.1.2.1.	Program.PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Daerah yang di Kembangkan	97%	2.157.103.282,00	0,00	0,00	7.300.000,00	-	-	-
1.2.1.2.2.	Program.PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	68%	1.037.592.853,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.2.3.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda budaya dan seni yang dilestarikan	75%	534.116.708,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Presentase urusan penunjang pemeritahan yang dilaksanakan	100%	257.629.477.785,00	0,00	0,00	46.533.646.274,00	-	-	-
	Dinas Kesehatan			241.174.374.092,00						

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.2.1.1.1.	Program.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indikator program. Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH)	71,00	79.461.673.586,00	-	-	4.825.526.500	-	-	-
		Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	14,70 AKB							
		Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	172 AKI							
		Angka Kesakitan	35-							
		Persentase pemenuhan layanan pasien	0,78							
		Prevalensi Stunting	14,00%							
1.2.1.1.2.	Program.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indikator program. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompetensinya ditingkatkan	46,00%	1.210.220.102,00	-	-	0	-	-	-
1.2.1.1.3.	Program.PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indikator program. Indeks Pembinaan dan Pengawasan izin dan Sertifikasi Sarana Pelayanan farmasi, UMOT	100,00	106.545.700,00	-	-	0	-	-	-
		Persentase Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Mamin yang memenuhi standar	100%							
1.2.1.2.1.	Program.PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indikator program. Angka laju pertumbuhan penduduk	40%	672.152.792,00	-	-	0	-	-	-
1.2.1.2.2.	Program.PROGRAM PEMBINAAN	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	18,00An gka	2.639.121.662,00	-	-	0	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	75%							
		Total Fertility Rate (TFR)	1 Angka							
1.2.1.2.3.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pendapatan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	78,50%	942.483.950,00	-	-	0	-	-	-
1.2.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemeritahan yang dilaksanakan	100%	156.142.176.300,00	3.191.405.265	5.742.755.586	263.432.117.669	-	-	-
	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali			189.609.952.806						
1.2.2.1.1.	Program.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SDMK yang ditingkat Sumber dayanya	46,00%	31.180.297.574	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemeritahan yang dilaksanakan	100%	158.429.655.232	4.815.971.246	9.620.489.162	-	-	-	-
	RSUD Salabangka Paku			45.353.967.181						

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	32.017.756.969	750.813.535	507.670.493	3.147.798.639	-	-	-
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indikator program. tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	100,00	12.818.209.212	-	-	179.753.054	-	-	-
1.3.2.1.3.	Program.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indikator program. Meningkatnyaketersediaan dan mutu sumber dayaa manusia (SDM) kesehatan yang profesional serta memenuhi standar kompotensi dibidangnya	100,00	518.001.000	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			774.141.374.893,00						
1.4.1.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	19.498.190.065,00	0,00	0,00	2.477.190.000	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indikator program. Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	21,50	3.667.316.000,00	0,00	0,00	2.800.000	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.4.2.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indikator program. Persentase kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45,95	156.629.867.993,00	0,00	0,00	17.251.905.107	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Indikator program. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	87,13	22.858.533.363,00				0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Indikator program. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	83,42	25.681.306.808,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Indikator program. Indeks Kualitas Sanitasi	0,09	16.962.715.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.4.2.1.5.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indikator program. Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	0,21	425.863.102.567,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.4.2.1.6.	Program.PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indikator program. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	3,00	541.527.500,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.4.2.1.7.	Program.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Indikator program. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	88,68	102.438.815.597,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.4.2.1.8.	Program.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Indikator program. Persentase bangunan gedung pemerintah/fasilitas umum dalam kondisi baik	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			138.843.020.143						
1.3.2.3.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	8.267.510.216,00	0,00	0,00	1.377.194.847	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.2.	Program.PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Indikator program. Persentase rumah korban bencana yang tertangani	100,00	866.317.000,00	0,00	0,00	850.000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.3.	Program.PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Indikator program. Pesentase rumah tidak layak huni yang tertangani	33,33	25.022.953.561,00	0,00	0,00	29.962.000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.4.	Program.PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Indikator program. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum)	99,65	53.739.374.481,00	0,00	0,00	788.697.539	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.5.	Program.PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Indikator program. Persentase penyelesaian lahan fasilitas umum/pemerintah	100,00	28.592.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.2.3.6.	Program.PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Indikator program. Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	95	49.678.896.885,00	0,00	0,00	21.563.164.248	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.7.	Program.PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Indikator program. Persentase retribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	95	21.560.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.3.2.3.8.	Program.PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Indikator program. Persentase penatagunaan tanah	95	1.217.816.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			22.360.856.411						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. presentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten morowali yang dilaksanakan	100,00	6.962.165.100	196.930.366	294.884.115	974.453.386	-	-	-
1.5.1.1.1.	Program.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indikator program. persentase penanganan pra bencana	100,00	15.398.691.311	-	59.820.500	202.518.420	-	-	-
		Indikator program. persentase penanganan tanggap darurat bencana	80,00					-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
		Indikator program. persentase pasca bencana	100,00					-	-	-
	Satuan Polisi Pamong Praja			32.471.358.812						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Presentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah	80,00	31.901.204.582	-	-	10.019.703.450	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.1.	Program.PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator program. PRESENTASE PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80,00	464.904.230	-	-	141.830.000	-	-	-
1.5.1.3.1.	Program.PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Indikator program. PRESENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	80,00	105.250.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Dinas Sosial			23.055.638.614						
1.1.2.1.1.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indikator program. Persentase PPKS yang di berdayakan	15,82	513.394.250	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.2.	Program.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indikator program. Persentase terhadap jumlah PPKS	31,50	7.014.895.040	-	110.520.000	1.039.000.000	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.1.2.1.3.	Program.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Indikator program. Prosentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,00	8.334.533.235	42.625.000	-	1.174.510.000	-	-	-
1.1.3.1.1.	Program.PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indikator program. Presentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan penanganan	95,00	411.964.298	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.2.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indikator program. persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100,00	250.470.062	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	6.530.381.729	119.240.975	136.282.620	539.313.202	-	-	-
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			10.867.887.056						
1.2.1.1.1.	Program.PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Indikator program. Persentase Perusahaan yang Menyusun RTK	68,30	112.952.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.	Program.PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Indikator program. Indeks Tenaga Kerja yang Ditempatkan	62,50	452.576.136	-	-	13.227.996	-	-	-
1.2.1.1.3.	Program.PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indikator program. Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	51,10	2.597.100.258	-	-	16.339.160	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.2.1.1.4.	Program.PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indikator program. Indeks Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	71,70	314.059.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.1.	Program.PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indikator program. Persentase Pengembangan Satuan pemukiman	12,70	347.610.112	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	7.043.589.550	280.630.287	298.590.013	389.426.277	-	-	-
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			229.994.592.939						
1.2.1.1.1.	Program.PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	32,00%	85.782.490	-	-		-	-	-
1.2.1.1.2.	Program.PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan tertangani	33,00%	245.667.000	-	-		-	-	-
1.2.1.1.3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	29,00%	1.606.037.293	-	-		-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.2.1.1.4.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100%	17.279.274.498	1.088.580.087	1.888.076.995		-	-	-
1.2.1.1.5.	Program.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	92,25%	12929124781	-	-		-	-	-
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	0%							
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	0%							
1.2.1.1.8.	Program.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	84,00%	27629873377						
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	33%	0						
1.2.1.1.6.	Program.PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan/Kelompok Tani yang Dibina	100%	137.250.270.000	-	-		-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.2.1.1.7.	Program.PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	32.968.563.500	-	-		-	-	-
1.2.1.1.9.	Program.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	100%		-	-		-	-	-
	Dinas Lingkungan Hidup Daerah			25.766.352.691						
1.3.2.3.1.	Program.PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indikator program. Presentase Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti.	70,00	281.177.000	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3.2.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Presentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	30,00	8.677.760.814	315.215.585	315.262.585.00	1.293.548.603	-	-	-
1.3.2.3.3.	Program.PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Indikator program. Presentase Pengelolaan Limbah B3	100%	48.240.000	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.2.3.4.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Indikator program. Persentase Pelaku Usaha Pemilik Izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	30,00	135.540.000	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3.5.	Program.PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indikator program. Persentase Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup yang Memperoleh Penghargaan	5%	192.258.050	-	-	-	-	-	-
		Indikator program. Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan	0,08							
1.3.2.3.6.	Program.PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Indikator program. Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang terselesaikan	70,00	92.415.000	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3.7.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indikator program. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Wilayah Kota	20,70	14.165.695.321	121.450.000	121.450.000	2.984.308.500			
1.3.2.3.8.	Program.PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT		0,00	22.840.000	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH									
1.3.2.3.9.	Program.PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		0,00	192.747.100	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1.1.	Program.PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indikator program. 1. Indeks kualitas Air 2. Indeks kualitas Udara	77,50%	1.727.579.406	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1.1.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indikator program. Presentase Ruang Terbuka Hijau	12,00	230.100.000	-	-	-	-	-	-
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			7.848.238.591						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indikator program. Cakupan Penerbitan KTP-el	100,00	83.371.500	-	-	10.650.000	8,30	8,30	8,30
		Indikator program. Persentase Anak Memiliki KIA persatuan Anak	100,00					8,30	8,30	8,30

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
		Indikator program. Rasio Penduduk ber - KTP -el persatuan Penduduk	1,00					0,80	0,80	0,80
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Indikator program. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100,00	137.803.000	-	-	12.355.000	0,00	0,00	25,00
		Indikator program. Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran	1,00					-	-	-
		Indikator program. Rasio Pasangan Nikah ber-Akta Nikah	1,00					-	-	-
1.3.2.1.3.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Indikator program. ketersediaan data base Kependudukan skala Provinsi	100,00	31.180.000	-	-	-	-	-	-
		Indikator program. Penerapan KTP-el berbasis NIK	0,00					-	-	-
1.3.2.1.4.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase urusan penunjang pemerintah yang dilakukan	100,00	7.679.255.591	133.008.168	182.581.056	766.371.588	3,00	3,00	14,00
1.3.2.1.5.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Indikator program. Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6,00	106.430.000	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak			13.987.049.986						

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.1.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	9.886.123.750	292.238.772	912.564.532	1.095.741.645			
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENATAAN DESA		0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indikator program. Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100,00	1.256.363.500	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1.1.	Program.PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indikator program. • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) • Persentase ARG pada belanja langsung APBD • Persentase Partisipasi Perempuan	100,00	307.455.000	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1.2.	Program.PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Indikator program. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	144.685.000	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1.3.	Program.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indikator program. Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera	100,00	74.765.000	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1.4.	Program.PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indikator program. • Indeks Perlindungan Anak (IPA) • Persentase capaian kluster Kabupaten Layak Anak	100,00	417.437.000	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.5.3.1.5.	Program.PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indikator program. persentase korban yang mendapatkan layanan	100,00	106.610.000	-	-	-	-	-	-
1.5.4.1.1.	Program.PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Indikator program. • Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama • Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa • Presentase Bumdes yang Dibina (%)	100,00	125.470.000	-	-	-	-	-	-
1.5.5.1.1.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indikator program. Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100,00	1.668.140.736	-	-	99.000.000	-	-	-
Dinas Perhubungan				28.274.488.524						
1.3.1.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP)	80,00	8.119.529.381	-	-	1.641.790.385	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indikator program. Persentase ketersediaan alat dan kelengkapan jalan	100,00	5.190.143.255	-	-	1.143.230.500	-	-	-
1.3.2.2.1.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indikator program. Persentase Pengelolaan Pelayaran	100,00	14.964.815.888	-	-	267.924.466	-	-	-
Dinas KomInfo										

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
				14.834.541.614						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	7.145.469.223	223.975.939	265.261.853	773.513.707	-	-	-
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	70%	1.826.663.681	-	35.349.300	143.114.308	-	-	-
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30%							
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	30%							
		mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0							
1.3.2.1.3.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	indeks SPBE Kabupaten Morowali hasil Evaluasi dan Pemantauan Tahun oleh Kempan-RB	2,40%	4.610.266.670	-	6.675.000	56.372.000	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan kandomain dan sub domain Instansi	100%							
		Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	0							
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	100%							
1.3.2.1.4.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	562.198.350	-	10.540.000	-	-	-	-
1.3.2.1.5.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE Kabupaten Morowali pada Domain Manajemen SPBE	2 Indeks	689.943.690	-	13.380.996	1.400.000	-	-	-
	Dinas Koperasi dan UMKM			10.949.938.435,00						

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.2.1.1.1.	Program.PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Indikator program. Presentase Koperasi yang Aktif	35,00	62.406.000,00	0,00	0,00	11.100.000	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.	Program.PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Indikator program. Presentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	6,88	124.091.500,00	0,00	0,00	16.485.000	-	-	-
1.2.1.1.3.	Program.PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Indikator program. Presentase Pengurus Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7,11	182.447.790,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1.1.4.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Indikator program. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	6,41	91.375.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.5.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1,96%	4.752.082.682,00	0,00	0,00	46.499.773	0,00	0,00	

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan	100,00	5.737.535.463,00	0,00	0,00	1.039.606.578	-	-	-
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			10.639.919.462,00						
1.2.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan Yang Dilaksanakan	100,00	9.456.195.712,00	-	1.117.034.111	2.136.874.945	0,00	199,57	0,00
1.2.2.1.2.	Program.PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Indikator program. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	6,05	540.715.000,00	-	15.009.000	15.009.000	0,00	64,86	0,00
1.2.2.1.3.	Program.PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indikator program. Realisasi Total terhadap Target Investasi	100,00	220.456.750,00	-	16.002.800	22.902.800	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4.	Program.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indikator program. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100,00	320.549.500,00	-	14.118.000	21.938.600	117,42	0,00	0,00
1.2.2.1.5.	Program.PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indikator program. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	100,00	102.002.500,00	-	14.619.000	19.049.000	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
		dalam Membuka Usaha								
1.2.2.1.6.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indikator program. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata			9.672.757.112						
1.2.2.1.1.	Program.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indikator program. Tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha	0	706.075.000	-	-	87.910.000	-	-	-
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketersediaan data Penanaman	100%	8.966.682.112	-	-	774.603.485	-	-	
	Dinas Perpustakaan			7.607.545.553,00						
1.2.1.1.1.	Program.PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indikator program. Presentase Perpustakaan di Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	100,00	451.694.315,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1.1.2.	Program.PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indikator program. Jumlah Koleksi Hasil Pelestarian Naskah Kuno	1050,00	22.588.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indikator program. Jumlah OPD yang menerapkan Arsip secara baku	35,00	342.049.110,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Indikator program. Presentase Penyelamatan Arsip	90,00	93.471.340,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2.1.4.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	100,00	6.697.742.788,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Dinas Perikanan				45.604.520.943						
1.2.2.1.1.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Indikator program. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	39000,00	28.541.003.300	3.680.000	-	-	4067,20	3799,20	13867,00
1.2.2.1.2.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Indikator program. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32000,00	3.465.326.622	-	-	-	14,60	1,66	85,75
1.2.2.1.3.	Program.PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Indikator program. Persentase Penurunan Ilegal Fishing	65,00	445.570.000	30.920.000	-	-	5,00	5,00	5,00
1.2.2.1.4.	Program.PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Indikator program. Jumlah Produksi Olahan hasil perikanan	6534,00	2.596.751.242	4.890.000	-	-	4300,00	4360,00	4420,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	10.555.869.779	442.297.086	687.503.303	1.899.888.998	10,00	5,00	5,00
	Dinas Perdagangan			76.548.511.900,00						
1.2.2.1.1.	Program.PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indikator program. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	30,00	119.395.000,00	0,00	0,00	3.860.000	-	-	-
1.2.2.1.1.	Program.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indikator program. Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	32,50	36.054.603.296,00	0,00	0,00	484.366.213	-	-	-
1.2.2.1.2.	Program.PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indikator program. Persentase Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Diluar	100,00	270.019.800,00	0,00	0,00	255.535.800	-	-	-
1.2.2.1.3.	Program.PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indikator program. Persentase alat UTTP yang tera ulang	60%	673.110.350,00	0,00	0,00	90.442.000	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.2.2.1.4.	Program.PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Indikator program. Persentase Produk Dalam Daerah yang di Promosikan Di luar	34,00%	39.811.250,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.3.1.1.	Program.PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Indikator program. Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	37,50%	32.620.692.279,00	0,00	0,00	294.466.000	-	-	-
1.2.3.1.2.	Program.PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Indikator program. Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi dan dipantau	24,00%	49.895.500,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.3.1.3.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Indikator program. Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	38,60%	110.115.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	6.610.869.425,00	0,00	0,00	1.481.800.558	-	-	-
Sekretariat Daerah				161.211.319.747						
1.3.3.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	68.181.008.957	5.602.971.143	5.632.224.669	10.634.399.745	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.3.1.2.	Program.PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100,00	88.938.636.800	65.408.000	14.645.250.000	15.176.533.679			
		Persentase produk hukum yang dihasilkan	100,00							
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah Yang Dihasilkan	100,00							
1.3.3.1.3.	Program.PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100,00	4.091.673.990	366.680.000	292.251.000	467.580.000			
	Sekretariat DPRD			55.940.790.566,00						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00	18.251.461.750,00						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	37.689.328.816,00						
	Bappelitbangda			26.136.555.837						
1.1.3.1.1.	Program.PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator program. Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	85,00	2.013.563.750	-	73.173.000	25.017.000	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.1.3.1.2.	Program.PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator program. Indeks Kualitas Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	3.778.354.675				0,00	0,00	0,00
		Indikator program. Indeks Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100,00					-	-	-
		Indikator program. Indeks Kualitas Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	90,00		-	111.426.000	47.932.500	-	-	-
1.1.3.3.1.	Program.PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indikator program. Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	90,00	960.262.290	-	23.417.000	-	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	19.384.375.122	431.497.303	943.925.138	59.414.419	-	-	-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				355.689.685.285						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indikator program. Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program RKPd, KUA-PPAS dan APBD	1,00	305.521.355.293	-	272.543.209	11.384.765.536	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
		Indikator program. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yang bersifat mandatory	4,00					0,00	0,00	0,00
		Indikator program. Penyerapan anggaran belanja dalam APBD	4,00					0,00	0,00	0,00
		Indikator program. Kemandirian keuangan dan fleksibilitas	2,00					0,00	0,00	0,00
		Indikator program. Solvabilitas	4,00					0,00	0,00	0,00
		Indikator program. Opini BPK	15,00					0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indikator program. Indeks manajemen pengelolaan aset	80,00	3.456.541.980	29.316.260	39.244.000	70.829.300	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.3.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	46.711.788.012	318.460.218	404.210.441	1.814.431.160	0,00	0,00	0,00
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			49.827.889.846						
1.2.1.1.1.	Program.PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Indikator program. Persentase Jumlah SPPT yang Tertagih	91,60	1.796.310.250	0,00	0,00	193.159.250	-	-	-
		Indikator program. Persentase objek pajak yang ditetapkan berdasarkan potensi pajak	100,00					-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
		Indikator program. Persentase objek pajak yang tertagih	100,00					0,00	0,00	0,00
		Indikator program. Persentase peningkatan potensi pajak	25,00					-	-	-
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	48.031.579.596	0,00	0,00	1.709.970.885.000	0,00	0,00	25,00
	BKPSDMD			21.164.216.859						
1.3.1.1.2.	Program.PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indikator program. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,94	1.970.759.000	0,00	0,00	171.568.977	-	-	-
		Indikator program. Rasio Jabatan Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78,42					-	-	-
		Indikator program. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	46,74					-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.1.1.3.	Program.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indikator program. Persentase Pejabat Struktural Eselon II yang Sudah Mengikuti Diklat PIM II	91,81	3.262.522.000	0,00	0,00	21.268.083	-	-	-
		Indikator program. Persentase Pejabat Struktural Eselon III yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	80,54					-	-	-
		Indikator program. Persentase Pejabat Struktural Eselon IV yang Sudah Mengikuti Diklat PIM	39,60					-	-	-
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Presentase Capaian Kinerja BKPSDM	100,00	15.930.935.859	0,00	0,00	1.298.210.058	-	-	-
Inspektorat Daerah				26.386.709.178						
1.3.3.1.1.	Program.PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indikator program. Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	2.042.879.000	98.439.580	9.900.000	5.250.000	-	-	-
1.3.3.2.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase pelayanan administrasi perkatoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	21.122.953.178	659.589.834	503.974.235	2.418.084.751	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.3.2.2.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indikator program. Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	75,00	3.220.877.000	67.100.000	215.703.500	54.970.000	-	-	-
		Indikator program. Persentase penyelesaian Tindaklanjut hasil temuan BPK dan APIP	80,00					-	-	-
		Indikator program. Persentase Kasus/pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00					-	-	-
	Kec. Bahodopi			7.654.479.654						
1.3.3.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator program. Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100	17.057.500	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.2.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Prosentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan	100,00	6.254.830.384	271.360.534	277.178.151	431.015.867	-	-	-
1.3.3.1.3.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100,00	194.642.500	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1.1.	Program.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bahodopi	100,00	23.615.880	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	KETERTIBAN UMUM									
1.3.5.1.1.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bahodopi	100,00	2.150.000	-	-	-	-	-	-
1.3.6.1.1.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan	10%	1.162.183.390	-	55.000.000	-	-	-	-
	Kec. Bumi Raya			9.918.521.889						
1.3.3.1.1.	Program.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator program. Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bumi Raya	100,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.2.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator program. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100,00	157.445.000	-	-	17.700.000	-	-	-
1.3.4.1.1.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator program. Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa Kecamatan Bumi Raya	10%	1.251.026.305	-	39.400.000	39.400.000	-	-	-
1.3.4.1.2.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator program. Jumlah Desa yang akan dilakukan pembinaan Kecamatan Bumi Raya	100,00	112.026.000	16.302.000	33.002.000	33.002.000	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.5.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100	8.246.775.014	256.016.914	496.777.871	1.438.972.356	-	-	-
1.3.6.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator program. Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100	151.249.570	-	49.450.000	59.375.000	-	-	-
Kec. Bungku Barat				8.453.680.462						
1.3.1.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Prosentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan	100,00	7.463.431.362	114.188.447	228.826.445	831.990.273	7,14	10,71	13,28
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator program. Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	77,50	47.965.000	-	-	4.520.000	0,00	0,00	14,00
1.3.3.1.1.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator program. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan/APBD desa Kecamatan Bungku Barat	10,00	699.567.600	-	43.480.000	48.730.000	0,00	6,22	6,22
1.3.3.1.2.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Indikator program. Jumlah Desa Yang Akan dilakukan Pembinaan di	10,00	12.760.000	-	-	-	0,00	10,00	0,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	DESA	Kecamatan Bungku Barat								
1.3.4.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator program. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat	100,00	229.956.500	-	-	14.550.000	0,00	0,00	40,00
	Kec. Bungku Pesisir			7.827.887.186						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator program. Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	77,50	728.658.250	-	-	48.000.000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator program. Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Bungku Pesisir	100,00	23.200.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.3.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator program. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100,00	1.631.565.316	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.4.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator program. Persentase Keg.Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBDesa Kecamatan Bungku Pesisir	10,00	49.952.500	-	-	14.500.000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.5.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Indikator program. JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN	100,00	3.420.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	DESA	KECAMATAN BUNGKU PESISIR								
1.3.2.1.6.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	100,00	5.391.091.120	108.987.992	328.115.124	816.721.715	0,00	0,00	0,00
	Kec. Bungku Selatan			12.166.632.835						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100,00	10.928.485.335	0,00	0,00	946.604.323	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Bungku Selatan	100,00	34.550.000	0,00	0,00	2.350.000	-	-	-
1.3.2.1.3.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan	10%	1.197.797.500	0,00	0,00	67.020.000	-	-	-
1.3.2.1.4.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator program. Persentase urusan pelayanan publik yang di laksanakan di kecamatan	100,00	5.800.000	0,00	0,00	-	-	-	-
	Kec. Bungku Tengah			13.985.553.426						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Indikator program. Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	100,00	1.479.410.803	-	-	4.129.000	0,00	0,00	25,00

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	DAN PELAYANAN PUBLIK									
1.3.2.1.2.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator program. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBD Kelurahan dan APBD Desa Kecamatan Bungku Tengah	100,00	144.561.525	-	-	7.020.000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.3.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator program. Desa yang akan dilakukan Pembinaan	100,00	84.260.505	15.373.000	-	-	0,00	25,00	0,00
1.3.2.1.4.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100,00	12.270.727.013	386.678.683	404.761.945	1.881.313.283	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.5.	Program.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator program. Persentase Kasus K3 di Kecamatan	15,00	6.593.580	-	-	-	-	-	-
	Kec. Bungku Timur			4.956.807.079						
1.3.1.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Indeks Kepuasan masyarakat	100,00	3.848.814.129	81.211.299	254.428.269	702.254.243	-	-	-
1.3.1.1.2.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Indikator program. Persentase urusan pelayanan publik yang di laksanakan di	100,00	780.342.950	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	PUBLIK	kecamatan								
1.3.1.1.3.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator program. Persentase kegiatan pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa	100,00	88.385.000	-	-	49.018.000	0,00	90,00	0,00
1.3.1.1.4.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator program. Jumlah penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	1,00	226.185.000	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.5.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator program. Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	10,00	13.080.000	-	-	300.000	-	-	-
	Kec. Menui Kepulauan			12.484.888.990,00						
1.3.1.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Prosentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan	100,00	10.824.279.590,00	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.2.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator program. Persentase urusan pelayanan publik yang di laksanakan di kecamatan	100,00	13.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.3.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator program. Persentase APBDes/APBD Kelurahan terhadap	100,00	227.264.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
		kegiatan pemberdayaan								
1.3.1.1.4.	Program.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator program. Persentase penurunan Permasalahan Trantib	100,00	40.940.000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.5.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator program. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	1.301.524.900,00	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.6.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator program. Persentase desa berstatus desa Mandiri	100,00	77.160.000,00	-	-	-	-	-	-
	Kec. Wita Ponda			6.748.281.828						
1.3.2.1.1.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator program. Persentase urusan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan	100,00	1.240.545.950	-	-	161.704.500	-	-	-
1.3.2.4.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Indeks kepuasan masyarakat	100,00	5.436.273.378	95.286.741	191.280.053	832.055.055	-	-	-
	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	0	0,00						

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
	UMUM									
	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keg. Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKelurahan dan APBDesa Kecamatan Wita Ponda	0	0,00						
	Program.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 di Kecamatan Witaponda	0	0,00						
1.3.2.5.1.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG AKAN DILAKUKAN PEMBINAAN Kecamatan Wita Ponda	100,00	71.462.500	-	-	-	-	-	-
	Kec. Sombori			4.428.766.540						
1.3.3.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Prosentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan	100,00	2.912.289.545	96.296.640	149.334.960	514.392.289	-	-	-
		Indikator program. Cakupan Pencapaian Urusan Pemerintahan (%)	90,00					4,00	0,00	0,00
1.3.3.1.2.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator program. Persentase Urusan Pelayanan Publik Yang di Laksanakan di Kecamatan	90,00	874.016.885	-	153.000.000	153.000.000	-	-	-
1.3.3.1.3.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indikator program. Persentase APBDesa Terhadap Kegiatan Pemberdayaan (%)	65,00	256.670.900	-	46.851.000	46.851.000	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.3.1.4.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikator program. Persentase Desa Tertib Administrasi (%)	100,00	57.000.000	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.5.	Program.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indikator program. Persentase Kasus K3 di Kecamatan	15,00	35.605.500	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.6.	Program.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indikator program. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di Laksanakan (%)	100,00	350.183.710	-	-	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah				15.520.387.223						
1.3.1.1.1.	Program.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator program. Prosentase Urusan Penunjang Pemerintah yang dilaksanakan	100,00	4.748.739.033	124.213.415	407.888.861	815.777.722	-	-	-
1.3.1.1.2.	Program.PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara	100,00	1.796.482.800						
		Presentase siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila	100,00		13.651.500	32.127.500	64.255.000	-	-	-

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran			Realisasi Kinerja		
					Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar
1.3.3.1.1.	Program.PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indikator program. Angka partisipasi politik	100,00	1.523.775.537	-	38.365.200	38.365.200	-	-	-
1.3.3.1.2.	Program.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase pengurus Ormas yang aktif	82,00%	261.790.000	-	26.453.000	-	-	-	-
1.3.3.1.3.	Program.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 9 kecamatan.	60,00%	2.090.523.000	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.4.	Program.PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah Rawan Konflik	90,00%	5.099.076.853	-	30.884.096	-	-	-	-

2.5 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab dokumen RPD ini, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Morowali selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan;
2. Masih Rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
3. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia;
4. Rendahnya Ketimpangan Infrastruktur Dasar Antar Kecamatan;
5. Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal;
6. Kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Beberapa masalah pokok daerah tersebut diatas dapat dipilah berdasarkan masalah utama dan akar masalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19
Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;	Tatakelola pemerintahan yang belum efektif dan efisien	1 Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan
			2 Belum optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis Kinerja
			3 Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK
			4 Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN
			5 Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD
		Rendahnya Kinerja Pelayanan	1 Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Publik	<p>2 Masih ditemukan adanya keluhan-keluhan pada sektor pelayanan publik</p> <p>3 Masih kurangnya sektor layanan publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>
2	Belum Meratanya kualitas dan daya saing SDM	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah Tahun 2022 meningkat menjadi 9,35.	1 Masih rendahnya minat anak Usia Sekolah untuk melanjutkan pendidikan
			2 Kurangnya jumlah Guru sesuai kompetensi yang dibutuhkan
			3 Belum meratanya distribusi Guru pada seluruh wilayah kecamatan
		Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)	1 Masih tingginya angka putus sekolah dan meningkat pada jenjang SMA
			2 Belum optimalnya bantuan beasiswa pendidikan pemerintah dan CSR untukantisipasi angka putus sekolah belum optimal
		Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai	1 Belum memadainya sarana prasarana sekolah khusus wilayah Kepulauan
			2 Belum memadainya Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung sekolah yang belum memadai;
			3 Masih lemahnya teknologi pembelajaran dan masih terbatasnya jaringan/ akses Internet mendukung model/sistem belajar berbasis daring (online) dan pelaksanaan Pembelajaran jarak jauh (PJJ);
			4 Belum berkembangnya ekosistem digital sebagai pembelajaran karena terbatasnya sarana prasarana.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah		
		Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai	1 Belum optimalnya pemerataan dan distribusi guru secara geografis maupun secara keahlian berdasarkan mata pelajaran yang belum optimal		
			2 Belum optimalnya tingkat kesejahteraan guru		
		Usia Harapan Hidup (UHH) Masih rendah	1 Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu		
			2 Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit khususnya di wilayah kecamatan Menui Kepulauan, Sombori dan Bungku Selatan		
			3 Belum optimalnya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu		
		Tenaga Medis dan non medis masih minim	1 Terbatasnya jumlah medis dan non medis perawat		
			2 Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter terbatas, khususnya Dokter Spesialis		
		Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai	1 Masih terbatasnya sarana prasarana RSUD Morowali (Bungku)		
			2 Masih sangat terbatasnya sarana Prasarana RSUD Pratama Paku		
			3 Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu		
		3	Masih Tingginya Angka kemiskinan dan Ketimpangan pembangunan wilayah	Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali masih tinggi	1 Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, Tahun 2021 Rp. 478.409 per orang, meningkat pada tahun 2022 sebanyak Rp.507.523 per orang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah			
			2	Tingginya harga kebutuhan pokok (basic needs)		
			3	Terbatasnya ketersediaan produksi kebutuhan pokok dibandingkan dengan permintaan khususnya kawasan industri.		
		Bantuan sosial belum semuanya tepat sasaran	1	Belum optimalnya verifikasi dan validasi PKH bagi rumah tangga miskin;		
			2	Masih adanya data inclusion error dan exclusion error bagi rumah tangga miskin.		
		Kondisi sosial ekonomi dan ketimpangan infrastruktur wilayah	1	Masih rendahnya kondisi pendidikan dan kesehatan keluarga		
			2	Masyarakat miskin tidak memiliki asset liability		
			3	Masih banyaknya rumah tidak layak huni rumah tangga miskin		
			4	Rendahnya akses atas infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin (Air Bersih, Listrik, Sanitasi) khususnya di wilayah Kecamatan Bungku Selatan, Sembori dan Menui Kepulauan		
		Kantong Kemiskinan yang sulit diakses	1	Adanya kendala Geografis dan Topografi, dimana kantong-kantong utama kemiskinan terutama berada di Kecamatan Bungku Selatan, Sembori dan Kecamatan Menui Kepulauan		
			2	Terdapat status desa sangat tertinggal sebanyak 2 desa dan desa tertinggal sebanyak 62 desa pada Tahun 2022		
		4	Menurunnya peran dan kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan kelautan dan	Menurunnya produksi Pertanian (Padi, Jagung, Ubi dan kacang)	1	Masih rendahnya produksi dan Kualitas-Produk pertanian
					2	Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsinta, Pupuk/Obat-obatan Terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pariwisata dalam perekonomian		3 Menurunnya nilai tambah (value added) produk pertanian
		Pariwisata belum berkembang	Belum optimalnya Sektor Pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah
		Menurunnya hasil tangkapan ikan laut dan menurunnya budidaya ikan air tawar	1 Kegagalan budidaya rumput laut
			2 Menurunnya hasil perikanan tangkap
			3 Rendahnya penyediaan air baku untuk daerah baru
		5	Belum optimalnya pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar antar wilayah Kecamatan
2 Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) dari 26,82 persen Tahun 2021 menurun menjadi 24,30 persen pada Tahun 2022			
3 Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan dan Bungku Selatan.			
4 Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk			
Menurunnya persentase sarana Sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Morowali sebesar 82,80 persen pada tahun 2021, menurun menjadi menjadi 78,34 persen tahun 2022.		
Cakupan Layanan Telekomunikasi Belum memadai	1 Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi		
	2 Masih adanya wilayah desa blank-spot jaringan komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau.		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ketersediaan Air Bersih terjadi peningkatan namun masih Rendah	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali periode waktu 2018-2022, mengalami perkembangan berfluktuasi sampai Tahun 2022 sebesar 103,52 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018.
		Jaringan Irigasi masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sarana Pengairan yang ada, jumlahnya belum memadai, termasuk pengelolaan yang masih buruk 2 Banyaknya irigasi teknis yang mengalami kerusakan.
6	Tingginya pelanggaran penataang ruang	Alih Fungsi Lahan Tinggi	1 Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan niaga
			2 Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP)
			3 Pola pemanfaatan ruang
			4 Pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan
			5 Semakin berkurangnya kawasan lindung
7	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurun	Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	1 Sering terjadinya Bencana Banjir di beberapa tempat khususnya pada wilayah pertambangan
			2 Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut
			3 Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air
			4 Belum tertatanya pengelolaan limbah berbahaya khususnya pada pengolahan hasil tambang.
			5 Terbatasnya Prasarana TPA
			6 Belum berjalannya mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			7 Menurunnya kualitas sumber air tanah dan pencemaran air
			8 Rendahnya curah hujan tersebut memicu kemarau panjang dan kekeringan serta merusak Hidrologi sumber air
			9 Pemanasan Global memicu perubahan iklim
			# Pencemaran air laut di kawasan wilayah pertambangan
			# Makin terbatasnya wilayah penangkapan ikan di laut, karena pencemaran ataupun lalu lintas transportasi dari kapal/tongkang perusahaan pertambangan
			# Makin terbatasnya hasil tangkapan nelayan disebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut
			# Indeks kualitas lingkungan hidup yang masih cukup rendah sebesar 80,54, tren terancam semakin menurun akibat aktivitas industri, khususnya pada wilayah Kecamatan Bahodopi sekitarnya dan Kecamatan Bungku Barat.
		Kerusakan Hutan dan ekosistem laut Meningkat	1 Tingkat kerusakan hutan tinggi akibat eksplorasi sumber daya alam (Nikel)
			2 Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan daratan terutama hutan dan ekosistem laut
			3 Tingginya pencemaran ekosistem laut akibat limbah teling
			4 Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kerusakan hutan
			5 Pencemaran sumber air bersih

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			6 Belum optimalnya sistem pengelolaan pertambangan, sebagai penyebab hutan gundul dan degradasi kondisi hutan
			7 kerusakan ekosistem laut mengakitatnya menurunnya potensi perikanan laut Morowali
			8 Kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut sebagai akibat pencemaran limbah teling ataupun lalu lintas transportasi dari kapal/tongkang perusahaan pertambangan
		Mitigasi Bencana masih rendah	1 Meningkatnya risiko bencana pasca tambang
			2 Peningkatan risiko bencana pada bebarapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Morowali
			3 Adanya Sesar Matano yang aktif
			4 Masih Rendahnya Kualitas SDM Penanganan Bencana
			5 Pemetaan risiko bencana, mitigasi dan sistem informasi kebencanaan rendah
			6 Masih Rendahnya Penanganan Daerah Pasca Bencana



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan kondisi perekonomian Kabupaten Morowali Tahun 2025 beserta karakteristiknya dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2023 sebesar 20.34%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 16,26%. Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Morowali. Program dan kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat agar kesejahteraan masyarakat Morowali meningkat.

Pemerintah Kabupaten Morowali pada Tahun 2025 mengusung Tema Pembangunan “*Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah,*”.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2025 dalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja bagi calon tenaga kerja lokal yang sesuai kebutuhan industri;

3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun secara merata dan terjangkau;
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing;
5. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya organisasi;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan peningkatan kemantapan infrastruktur;
7. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menggerakkan sektor pertanian, perikanan-kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan;
8. Optimalisasi lahan, dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Meningkatkan peran UMKM dan Ekonomi Kreatif pada sektor unggulan dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat;
10. Peningkatan pengendalian pencegahan pencemaran lingkungan dan ketahanan bencana;
11. Peningkatan ketertiban, pembinaan kemasyarakatan, penegakan hukum serta penguatan peran semua stakeholder dalam rangka peningkatan rasa aman.

3.1.1. Kondisi Ekonomi

1). Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/region. PDRB tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

PDRB sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 menjadi 17 lapangan usaha. Sementara laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada Tahun ke-n terhadap nilai pada Tahun ke n-1 (Tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada Tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2024 Kabupaten Morowali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2024 (Persen)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.84	(2.76)	3.21	1.81	(0.29)	1.89
B	Pertambangan dan Penggalian	19.77	34.40	23.11	17.22	14.08	5.75
C	Industri Pengolahan	24.00	35.72	24.53	31.91	25.29	21.01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.98	4.47	2.69	11.36	10.10	6.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.17	0.11	9.06	2.33	1.83	4.53
F	Konstruksi	13.31	(14.62)	70.45	34.62	2.36	0.98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.90	(4.98)	9.00	62.22	5.19	12.30

Lapangan Usaha		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	6.47	(28.38)	201.86	151.77	5.86	10.35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.01	(10.48)	14.19	56.23	16.93	15.41
J	Informasi dan Komunikasi	6.80	7.09	9.83	23.57	6.70	4.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.17	13.23	7.89	5.92	0.29	12.01
L	Real Estat	0.90	0.15	3.77	28.73	20.20	15.31
M,N	Jasa Perusahaan	4.98	(1.17)	1.27	14.35	10.43	16.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.05	1.06	4.59	(3.00)	2.51	0.96
P	Jasa Pendidikan	3.00	(0.18)	0.74	0.48	4.53	6.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.35	6.91	4.05	2.22	7.21	6.61
R,S,T, U	Jasa lainnya	2.59	(0.44)	14.40	10.05	5.40	11.02
Produk Domestik Regional Bruto		20.20	28.93	25.15	28.21	20.34	16.26

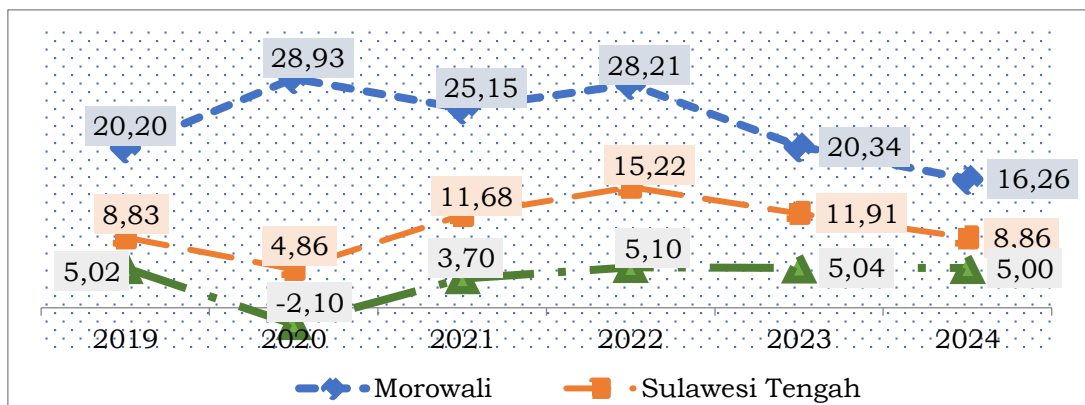
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2019-2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 23.18 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 10.23 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi Tahun 2018 sebesar 112.20 persen. Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20.20 persen. Selanjutnya Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 28.93 persen. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali mencapai 25.15 (lebih rendah dari tahun

sebelumnya). Selanjutnya data Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada dua digit diangka 28.21 persen dan Tahun 2023-2024 menurun menjadi sebesar 20.34 persen dan 16.26 persen.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu Industri Pengolahan (21.01 persen), Jasa Perusahaan (16.26 persen), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15.41 persen). Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan rendah yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1.89 persen), Konstruksi (0.98 persen), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0.94 persen). Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian.

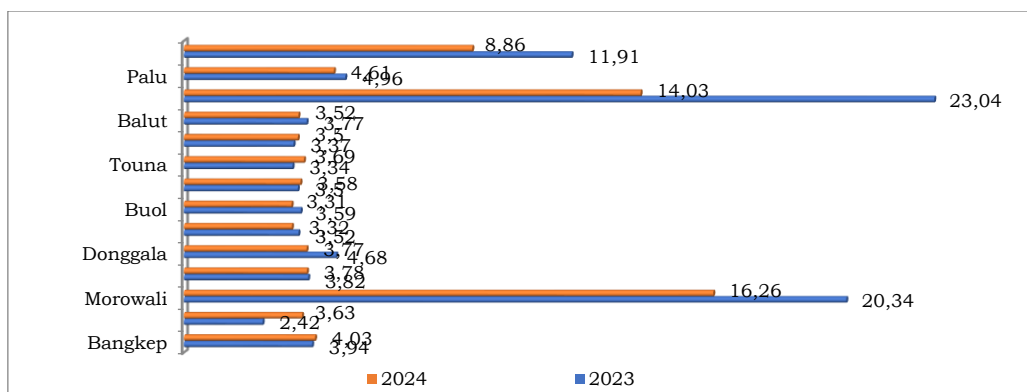
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, dalam periode Tahun 2019-2024 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 20.20 persen, tetap lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.83 persen dan rata-rata secara nasional sebesar 5.02 persen. Penyebab pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif, yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali menurun menjadi sebesar 16.26 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional sebesar 5.00 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.86 persen secara lengkap terdapat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Ditinjau menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua, setelah Kabupaten Morowali Utara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 23.04 persen dan di urutan ketiga Kota Palu sebesar 4.96 persen. Sedangkan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Banggai sebesar 2.42 persen. Selain Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 11 kabupaten/kota rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023-2024, data terkait diuraikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 pada kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan kecuali Kabupaten Bangkep (4.03 persen), Kabupaten Banggai (3.63 persen), Kabupaten Parigi Moutong (3.58 persen), Kabupaten Tojo Una-Una (3.69 persen), Kabupaten Sigi (3.50 persen) mengalami peningkatan. Kabupaten Morowali berada pada urutan pertama sebesar 16.26 persen sementara Kabupaten Morowali Utara sebesar 14.04 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Buol sebesar 3.31 persen.

2). PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah yang diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi. Besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Manfaat menghitung PDRB Perkapita adalah 1) Mengukur Kesejahteraan Ekonomi, semakin tinggi PDRB perkapita, maka semakin besar rata-rata pendapatan yang dapat dinikmati penduduk. 2) Perbandingan Ekonomi Antar Wilayah. Artinya, PDRB perkapita digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara daerah, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. 3) Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan, yaitu Pemerintah menggunakan PDRB per kapita untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dan merancang strategi pembangunan. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

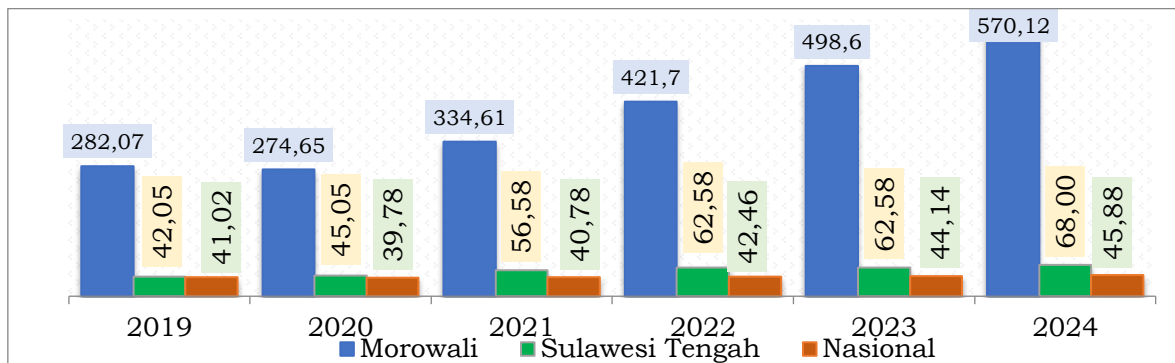
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)						
ADHB	45,349.58	62,148.34	98,916.81	146,599.32	158,048.73	173,864.99
ADHK 2010	34,102.75	43,902.29	55,001.24	70,515.62	84,989.24	98,808.77
Nilai PDRB Per kapita (juta rupiah)						
ADHB	375.10	388.80	601.78	876.42	927.23	1,003.18
ADHK 2010	282.07	274.65	334.61	421.70	498.60	570.12
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen)	18.66	(2.63)	21.83	26.03	18.24	14.34
Jumlah Penduduk (orang)	121,196	161,727	167,910	176,244	170,450	198,968

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah).

Selama periode 2019-2024 PDRB perkapita Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan terus meningkat baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010. Tahun 2019 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp375.10 juta, mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1,003.18 juta Tahun 2024. Sementara berdasarkan ADHK 2010 Tahun 2019 sebesar Rp282.07 juta dan meningkat menjadi sebesar Rp570.12 juta. Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Morowali tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam kurun waktu tersebut. Secara umum diketahui, pertumbuhan PDRB Morowali didominasi oleh pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalan, serta Sektor Industri Pengolahan yang *multiplier effectnya* terhadap perekonomian lokal masih sangat kecil. Latar belakangnya adalah karena pada kedua sektor tersebut keterlibatan faktor produksi lokal (tenaga kerja, capital, dan skill) masih sangat kecil. Kedua sektor tersebut, terutama pada industri feronikel, merupakan *enclave* dalam ekonomi daerah Kabupaten Morowali.

PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sangat jauh di atas capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana pada Tahun 2019 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp282.07 juta, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp42.05 juta, dan Nasional sebesar Rp41.02 juta. Pada Tahun 2024 PDRB perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp570.12 juta, sangat jauh dari Nasional mencapai sebesar Rp45.88 juta dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp68.00 juta. Data Perkembangan PDRB Perkapita

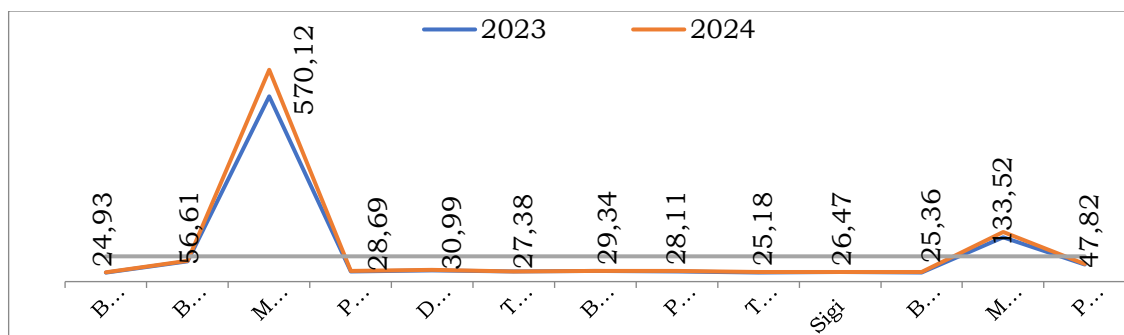
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional diuraikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.3
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Merujuk pada data gambar di atas, bahwa PDRB perkapita Kabupaten Morowali bukan saja melampaui PDRBn perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan berlipat ganda sebanyak 8.38 kali lipat, atau sebanyak 12.43 kali lipat dari PDB perkapita Indonesia Tahun 2024. Dengan PDRB perkapita yang terus meningkat, diharapkan berdampak positif pula terhadap bidang-bidang yang lain (misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) sehingga tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Morowali akan semakin meningkat. Perbandingan PDRB Perkapita antara Kabupaten Morowali dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan Kabupaten Morowali adalah tertinggi dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang disajikan secara lengkap pada gambar berikut ini.



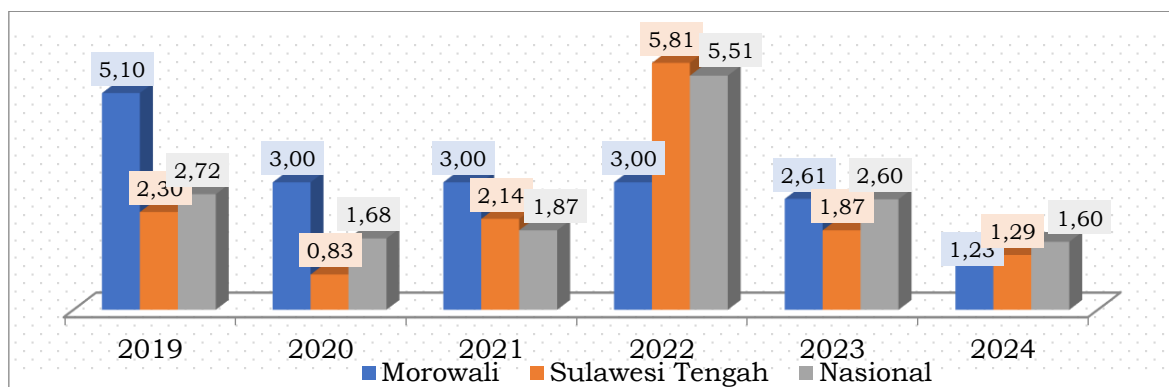
Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Berdasarkan data pada gambar di atas, sampai dengan Tahun 2024 capaian PDRB perkapita tertinggi adalah Kabupaten Morowali sebesar Rp570.12 juta, dan Kabupaten Morowali Utara berada pada posisi kedua sebesar Rp133.52 juta, serta tertinggi ketiga Kabupaten Banggai sebesar Rp56.61 juta. Sedangkan untuk kabupaten dengan PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Banggai Laut (Rp25.36 juta) dan Kabupaten Tojo Una-Una (Rp25.18 juta) serta Kabupaten Banggai Kepulauan (Rp24.93 juta).

3). Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang relatif tinggi akan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah perlu dikendalikan, sehingga diharapkan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.5
Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019-2024

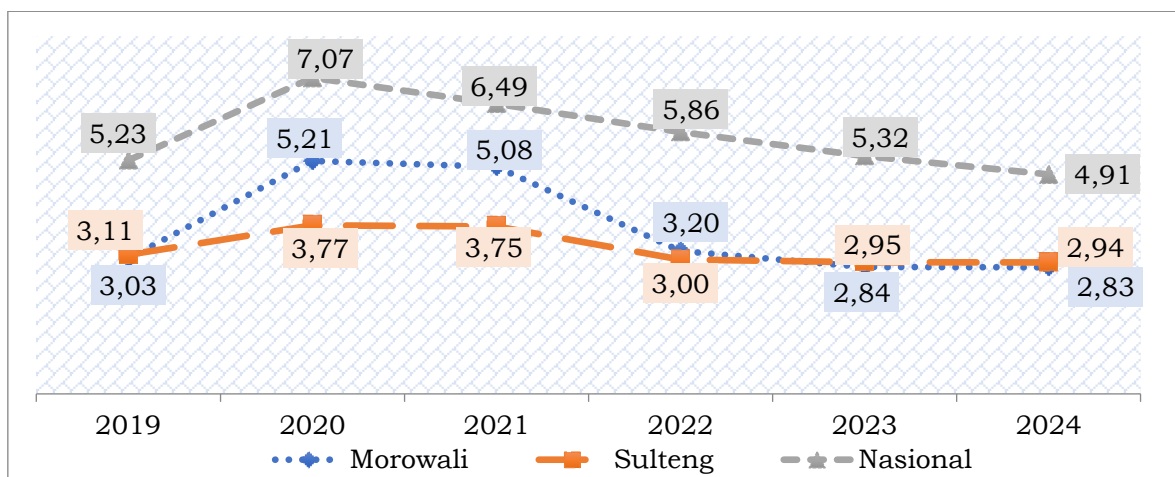
Grafik di atas menunjukkan tren inflasi Kabupaten Morowali Tahun 2019 sebesar 5.10 persen lebih tinggi dari rata-rata inflasi secara Nasional yakni sebesar 2.72 persen dan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2.30 persen. Tahun 2024, besaran inflasi Kabupaten Morowali menurun diangka sebesar 1.23 persen, dan jauh di bawah rata-rata inflasi Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara Nasional masingmasing mencapai sebesar 1.29 persen dan 1.60 persen. Penurunan ini

mencerminkan stabilisasi harga pangan dan energi serta dampak kebijakan ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efisiensi distribusi dan rantai pasok.

4). Tingkat Pengangguran Terbuka

Penganggur (*unemployment*) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela), maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Sebagai daerah yang kaya Sumber daya Alam (*natural resources*) Kabupaten Morowali ‘negeri tambang’ di Indonesia. Potensi pertambangan ini seharusnya dapat menjadi sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penciptaan lapangan kerja atau kesempatan kerja. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari data persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang justru menurun dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Secara umum, TPT Kabupaten Morowali menunjukkan penurunan sampai Tahun 2024 sebesar 2.83 persen. TPT tertinggi Tahun 2020-2021 sebesar 5 persen. Pada Tahun 2020, bencana non-alam Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut berdampak sangat buruk pada kondisi perekonomian nasional, salah satunya dengan meningkatnya jumlah penganggur termasuk di Kabupaten Morowali. Namun secara umum, TPT Kabupaten Morowali Tahun 2024 berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Morowali mulai membaik dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal, meskipun masih terdapat tantangan fluktuatif pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, Kabupaten Morowali berpotensi menjadi daerah dengan ketenagakerjaan yang lebih stabil dan inklusif dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, kondisi TPT Kabupaten Morowali dibandingkan dengan kondisi capaian Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam menangani masalah pengangguran. Sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kerja Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bangkep	2.00	2.47	2.95	1.48	1.56	1.55
Banggai	2.18	2.42	3.57	3.09	3.12	3.11
Morowali	2.97	5.21	5.08	3.20	2.84	2.84
Poso	2.18	2.39	2.47	1.68	1.67	1.77
Donggala	2.76	2.58	3.50	2.84	2.79	2.79
Tolitoli	3.10	3.74	3.13	3.31	3.12	3.11
Buol	3.01	4.36	3.64	3.07	3.14	3.13
Parimo	2.36	2.70	2.97	1.71	2.11	2.10
Touna	2.92	2.84	3.44	3.05	2.83	2.47
Sigi	2.54	3.36	2.38	3.60	2.60	2.55
Balut	3.04	3.09	3.35	3.60	3.64	3.60

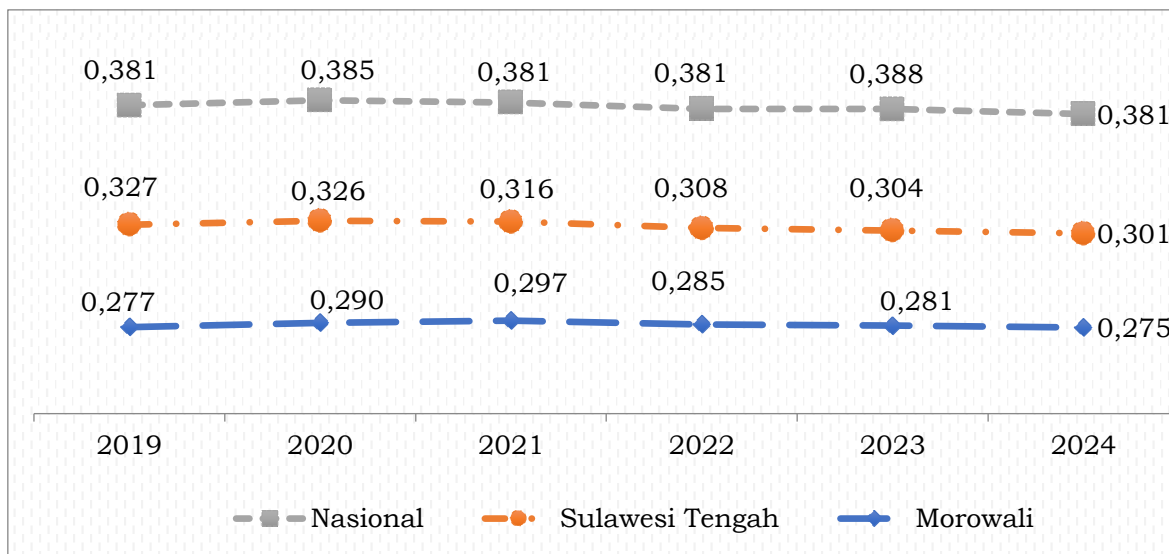
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Morut	3.05	5.16	2.98	2.25	2.23	2.38
Kota Palu	6.32	8.38	7.61	6.15	5.65	5.63
Sulteng	3.11	3.77	3.75	3.00	2.95	2.94
Nasional	5.23	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan data TPT Kabupaten Morowali menurun cukup signifikan di Tahun 2024 menjadi sebesar 2.84 persen. TPT tertinggi yakni Kota Palu mencapai 5.65 persen, kemudian Kabupaten Banggai Laut mencapai 3.60 persen. Sedangkan, TPT terendah adalah Kabupaten Poso sebesar 1.77 persen dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 1.55 persen. Namun, secara keseluruhan TPT kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di bawah rata-rata nasional kecuali Kota Palu.

5). Indeks Gini

Koefisien Gini atau indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hampir tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0.3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0.3 sampai dengan 0.4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0.4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada gambar berikut.

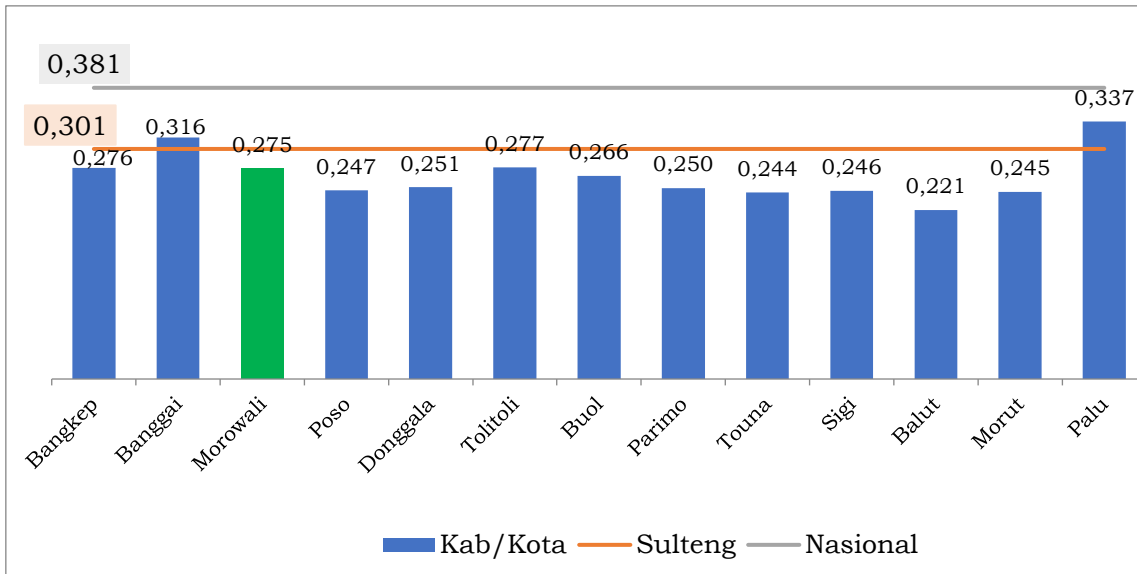


Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.7
Indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2019-2024

Selama kurun waktu 2019-2024 indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2019 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0.277 mengalami penurunan Tahun 2024 menjadi sebesar 0.275. Pada Tahun 2024 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0.301 dan rata-rata Nasional sebesar 0.381. Dengan besaran angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0.284, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah.

Ditinjau menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi kelima. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan indeks Gini tertinggi dalah Kota Palu dan Kabupaten Banggai. Data mengenai perbandingan indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.8
Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Berdasarkan gini rasio di atas bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, Kota Palu dan Kabupaten Banggai berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yang artinya bahwa kedua wilayah tersebut berada pada ketimpangan pendapatan moderat. Secara Nasional, semua kabupaten/kota berada di bawah rata-rata nasional termasuk gini rasio Provinsi Sulawesi Tengah.

6). Kemiskinan

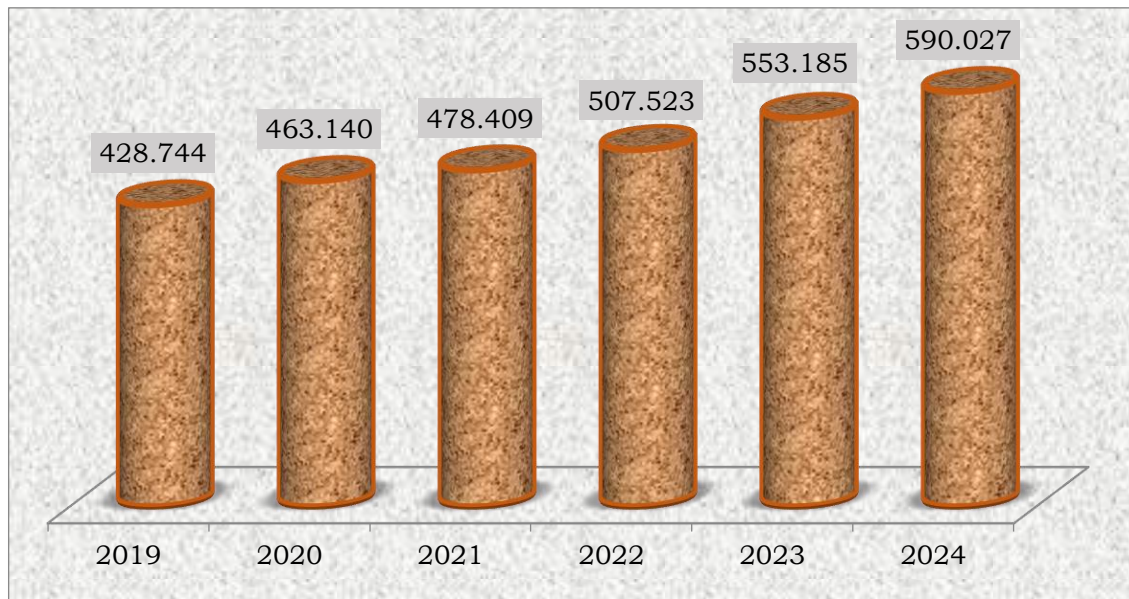
Tingkat kemiskinan adalah rasio jumlah orang miskin terhadap jumlah penduduk suatu wilayah (negara atau daerah) pada Tahun tertentu. Seseorang dikatakan miskin bila pendapatan berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatan dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lain. Gambaran kondisi kemiskinan Kabupaten Morowali dijelaskan pada beberapa aspek yaitu: garis kemiskinan, penduduk miskin, indeks

kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), yang dapat dijelaskan pada beberapa bagian berikut ini.

a). Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

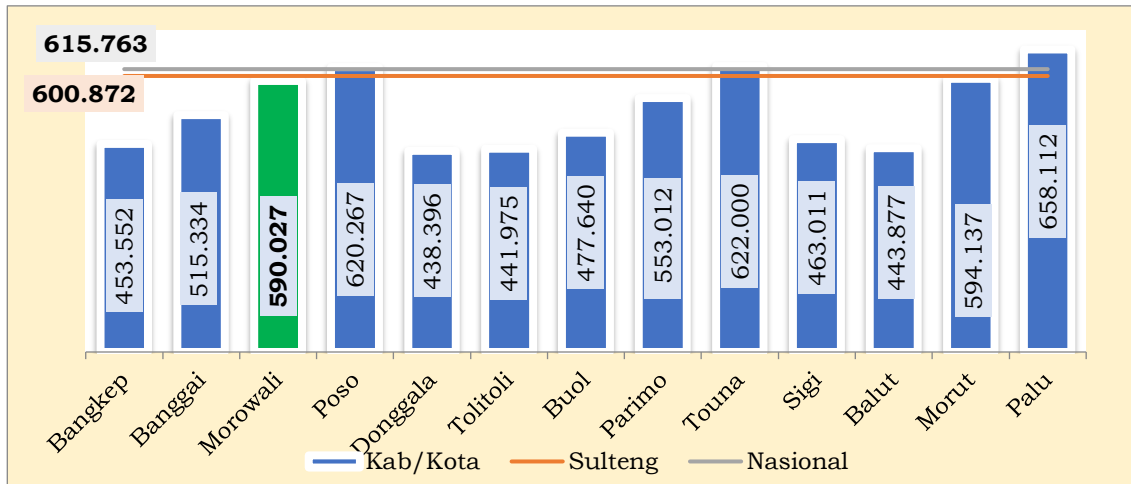
Garis kemiskinan Kabupaten Morowali periode 2019-2024 mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Rata-rata peningkatan garis kemiskinan Kabupaten Morowali dalam rentan waktu tersebut sebesar 6.61 persen. Pada Tahun 2019 GK sebesar Rp428.744 perkapita/bulan meningkat menjadi sebesar Rp590,027 perkapita/bulan. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Morowali kurun Tahun 2019-2024 secara lengkap terdapat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.9
Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023

Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan signifikan dari Tahun 2019 hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup, terutama akibat inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan standar konsumsi minimum. Faktor lain yang berkontribusi adalah meningkatnya upah tenaga kerja seiring dengan ekspansi industri pertambangan di Kabupaten Morowali, yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 pada Tahun 2020-2021 mempercepat perubahan struktur ekonomi dan meningkatkan ketimpangan pendapatan, sehingga batas minimum garis kemiskinan terus mengalami penyesuaian. Namun, jika melihat perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali berada pada urutan keempat sebagaimana digambarkan pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.10
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024

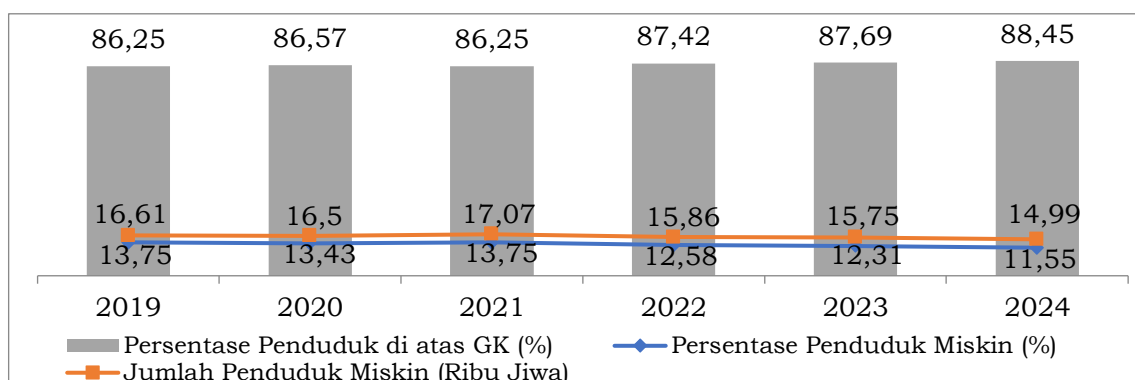
Grafik di atas menunjukkan perbandingan garis kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bahwa Kota Palu memiliki garis kemiskinan tertinggi sebesar Rp658,112 per kapita per bulan, sementara Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso juga memiliki nilai yang cukup tinggi masing-masing sebesar Rp622,000 dan Rp620,267 per kapita per bulan. Kabupaten Morowali mencatat garis kemiskinan sebesar Rp590,027 per kapita per bulan, berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp600,872 per kapita per bulan) dan nasional sebesar Rp615,763 per kapita per bulan). Kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp453,552 per kapita per bulan dan Kabupaten Tolitoli sebesar Rp441,975 per kapita per bulan, mencerminkan perbedaan tingkat biaya hidup dan daya beli masyarakat antarwilayah. Peningkatan garis kemiskinan ini dapat dikaitkan dengan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri pada masing-masing daerah.

b). Persentase Penduduk Miskin (PO)

Penduduk miskin (*poverty people*) merupakan masalah utama yang terjadi di setiap daerah. Sementara itu, pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata, sehingga mereka keluar dari kondisi kemiskinan. Wujud nyata dari

kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat (*consumption society*). Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, melalui peningkatan kinerja perekonomian daerah, maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

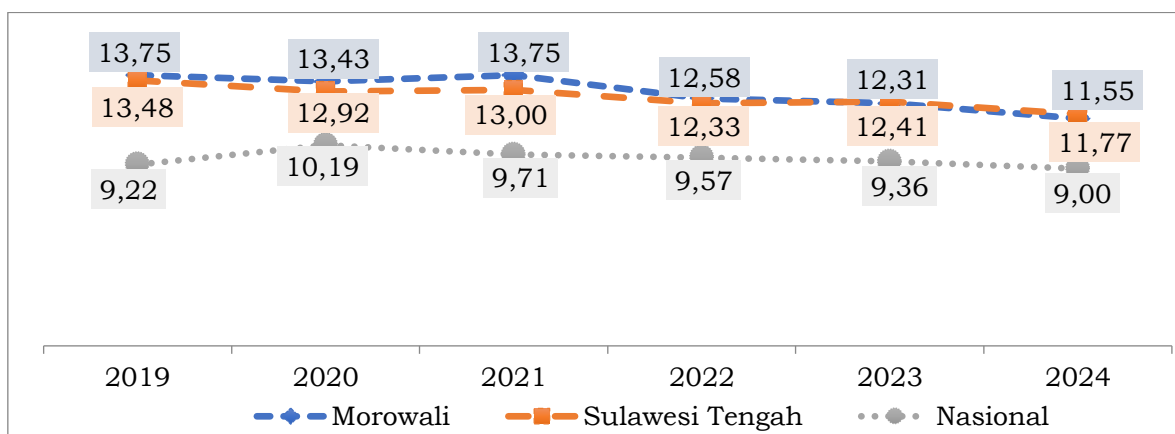
Gambar 3.11
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Penduduk di atas
Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali selama periode 2019 hingga 2024. Persentase penduduk

miskin turun dari 13.75 persen Tahun 2019 menjadi 11.55 persen Tahun 2024, demikian pula jumlah penduduk miskin menurun dari 16.61 ribu jiwa menjadi 14.99 ribu jiwa. Seiring dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, maka persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga meningkat dari 86.25 persen Tahun 2019 menjadi 88.45 persen Tahun 2024, menandakan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

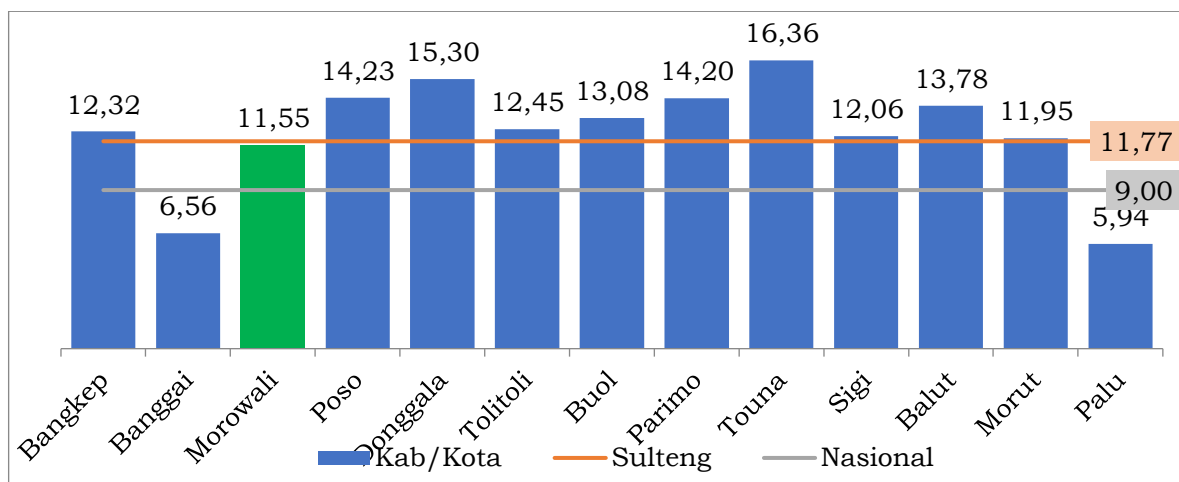
Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Morowali bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional masih lebih tinggi di atas rata-rata, menunjukkan adanya tantangan struktural, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, atau ketimpangan hasil pembangunan antarwilayah. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang lebih rendah mencerminkan capaian pembangunan yang lebih baik di wilayah tersebut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.12
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Morowali selama periode 2019–2024 cenderung menurun, dari 13.75 persen Tahun 2019 menjadi 11.55 persen Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan secara nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali masih berada di atas rata-rata nasional, yang terus menurun dari 9.22 persen menjadi 9.00 persen, menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Morowali menunjukkan kemajuan dalam pengurangan kemiskinan, wilayah ini masih menghadapi tantangan struktural yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional, namun berada dalam tren positif. Berkaitan dengan penurunan penduduk miskin selama Tahun 2019-2024 yang relevan dengan penurunan di Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional, apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penduduk miskin Kabupaten Banggai dan Kota Palu lebih rendah dibandingkan secara nasional, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

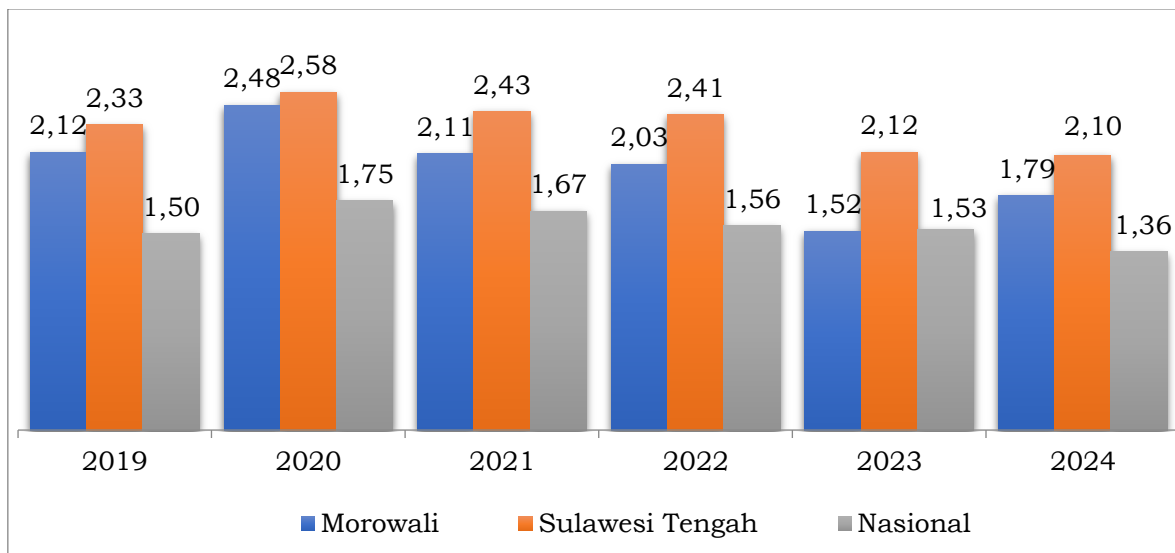
Gambar 3.13
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Perkembangan penduduk miskin antar Kabupaten Morowali dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Morowali di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah namun di atas rata-rata nasional dan berada pada urutan ketiga. Sedangkan Kabupaten Banggai dan Kota Palu memiliki persentase penduduk miskin

terendah dan berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

c). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berikut diuraikan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali tahun 2019-2024.

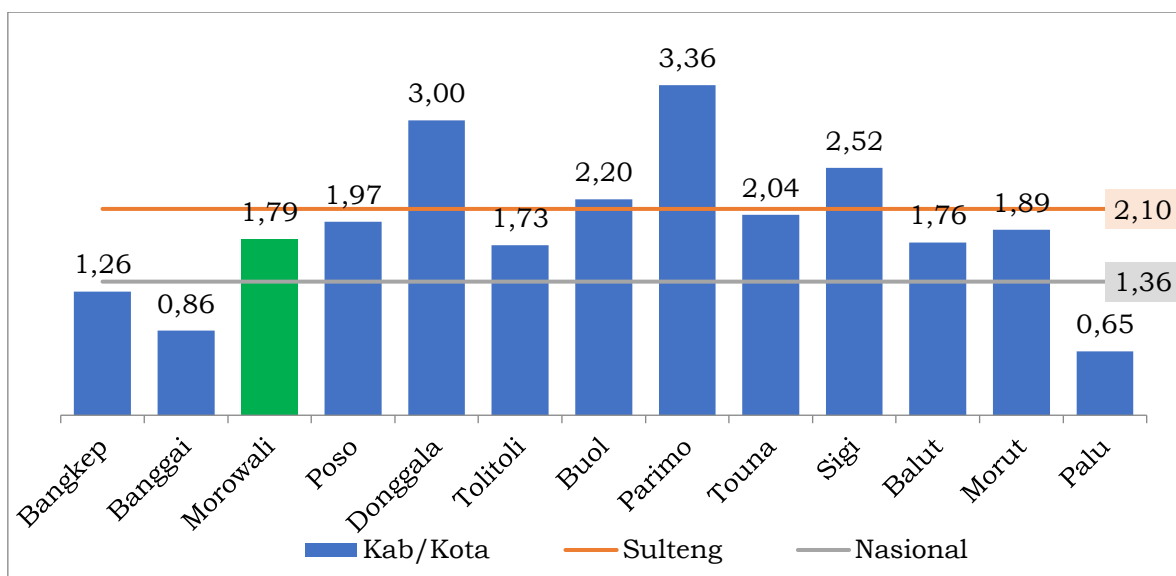


Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Nilai Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali cenderung meningkat dan berfluktuatif. Tahun 2019 sebesar 2.12 menurun menjadi 1.79 Tahun 2024. P1 Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk miskin di Kabupaten Morowali Tahun 2024 hanya kekurangan sekitar 1.79 persen dari

garis kemiskinan untuk keluar dari status miskin. Meski masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, angka ini menandakan perbaikan kondisi ekonomi penduduk miskin di Kabupaten Morowali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan keberhasilan upaya pengurangan ketimpangan kedalaman kemiskinan. Namun, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan yang lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya, sebagaimana diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

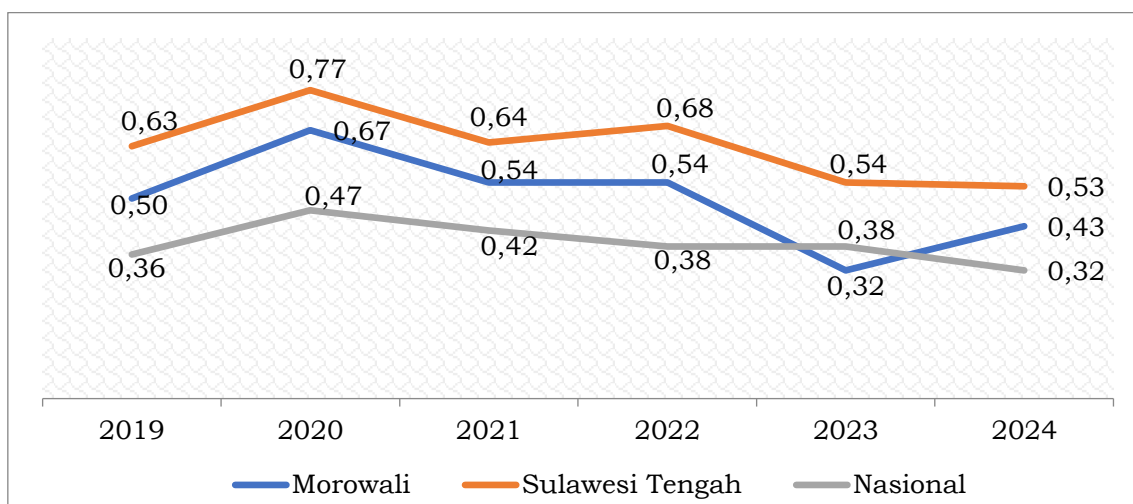
Gambar 3.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali berada pada urutan keenam berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kabupaten dengan P1 terendah adalah Kota Palu dan Kabupaten Banggai, sedangkan P1 tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala.

c). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran

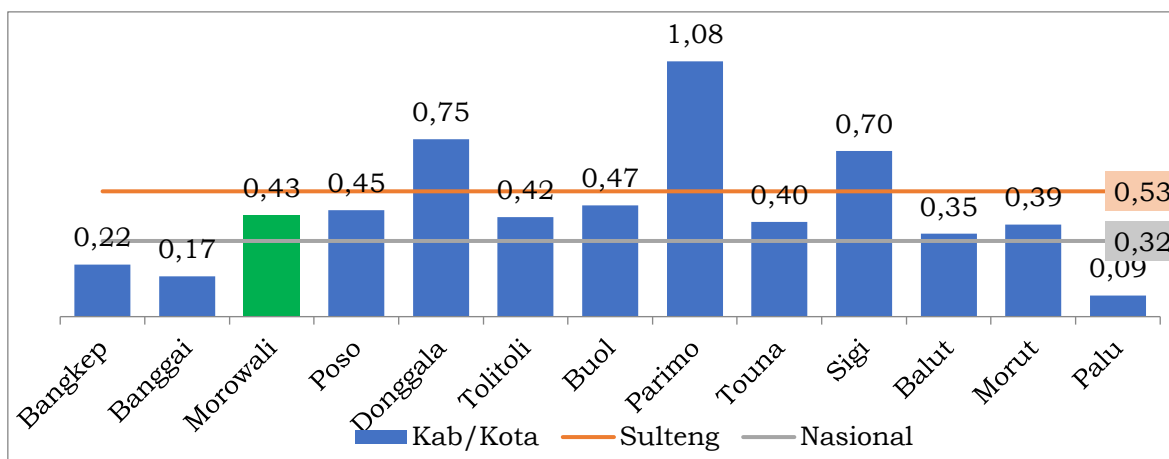
diantara penduduk miskin. Data indek keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali (P2) ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.16
Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali berfluktuatif dengan kecendrungan menurun. Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2019 sebesar 0.50 menurun menjadi sebesar 0.43 Tahun 2024. Kondisi P2 Kabupaten Morowali, tergolong tinggi berada di atas rata-rata nasional walaupun berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah setempat. Upaya melalui berbagai program dan bantuan sosial yang dikucurkan harus tepat sasaran dan sesuai dengan target. Capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali ternyata belum sepenuhnya mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan cenderung melebar jarak pendapatan kemiskinan di antara penduduk miskin. Selanjutnya, data P2 Kabupaten Morowali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada gambar berikut ini.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.17
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

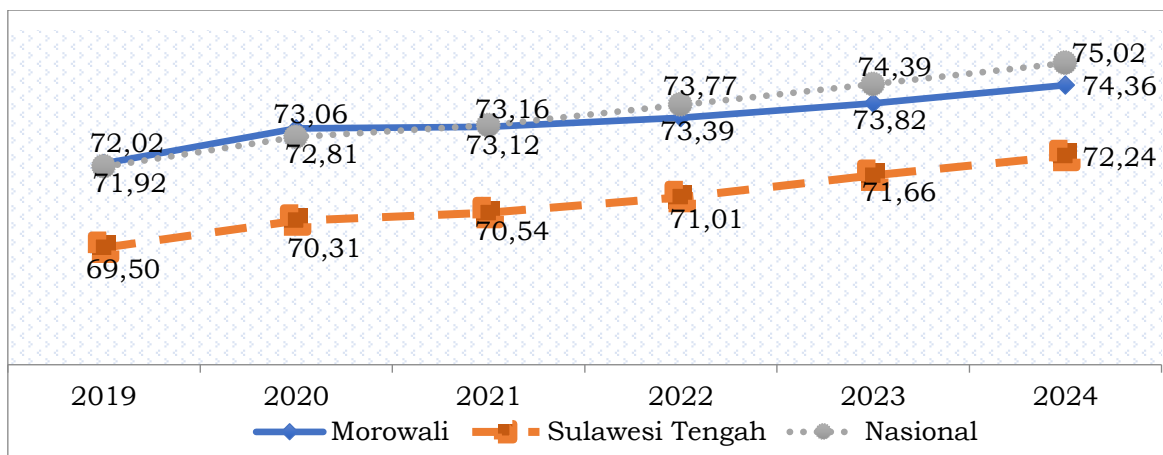
Nilai rata-rata P2 Kabupaten Morowali sebesar 0.43 berada pada urutan kedelapan. Beberapa daerah masih memiliki P2 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. sedangkan P2 terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, dan Kota Palu.

7). Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi Tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan backcasting Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), penge-tahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat menggambarkan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Gambaran perkembangan IPM Kabupaten Morowali diuraikan pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.18
IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional
Tahun 2019-2024

Perkembangan IPM Kabupaten Morowali selama Tahun 2019-2024 mengalami peningkatan yakni Tahun 2019 sebesar 72.02 meningkat menjadi sebesar 74.36 Tahun 2024. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2024 masuk kategori tinggi menunjukkan perbaikan di aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 75.02, namun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 72.24. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Morowali sudah relatif baik. Peningkatan IPM ini juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan sektor industri dan investasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.4
IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, dan Nasional
Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	65.13	65.61	65.82	66.30	67.05	67.65
Banggai	70.36	71.01	71.09	71.58	72.19	72.86
Morowali	72.02	73.06	73.12	73.39	73.82	74.36
Poso	71.40	72.10	72.22	72.75	73.25	73.65
Donggala	65.49	66.80	66.96	67.49	68.17	68.71
Toli-Toli	65.42	67.70	68.31	68.77	69.68	70.38
Buol	67.69	68.49	68.92	69.37	70.18	70.89
Parigi Moutong	65.47	67.46	67.84	68.29	69.06	69.48
Tojo Una-Una	64.52	66.67	66.81	67.62	68.47	69.04
Sigi	68.16	68.48	68.84	69.40	70.28	70.90
Banggai Laut	65.27	67.60	67.82	68.40	69.12	69.65
Morowali Utara	68.45	69.42	69.52	70.02	70.74	71.64
Kota Palu	81.50	82.74	82.96	83.26	83.71	84.12
Sulawesi Tengah	69.50	70.31	70.54	71.01	71.66	72.24
Nasional	71.92	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan Kota Palu dengan IPM tertinggi yakni sebesar 84.14 masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan, Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Gambaran kategori IPM berdasarkan peta IPM kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 3.19
Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Peta IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya Kota Palu dengan status IPM Sangat Tinggi, kemudian disusul Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli pada kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, kabupaten Tojo Una-Una pada kategori IPM sedang.

3.1.2. Proyeksi Perekonomian Kabupaten Morowali di Tahun 2025

Berdasarkan gambaran pencapaian perekonomian daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2024, Pada tahun 2026 indikator makro daerah (Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Perkapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran

Terbuka, Indeks Gini Kabupaten Morowali, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia) diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Morowali Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Proyeksi Sebelum Perubahan Tahun 2025	Proyeksi Setelah Perubahan Tahun 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	16,26	12,99*	12,99
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,83	2,31 *	2,31 -2,55
5.	Indeks Gini	Indeks	0,275	0,265*	0,210-0,265
6.	Kemiskinan	Persen	11,55	11,59*	9,86 -11,35
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,36	72,75*	74,50-74,65

Sumber: RPD Kab. Morowali Tahun 2024-2026 (data diolah)

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); pendapatan transfer (meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah); lain-lain pendapatan

daerah yang sah (meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan).

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan Tahun 2025, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kabupaten Morowali.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Morowali, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan

Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan mempermudah birokrasi guna mempermudah investasi

Pendapatan daerah pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 2.523.118.319.556,00 mengalami penurunan sebesar Rp 98.940.135.000 atau 4% dari pendapatan di APBD tahun 2025 sebesar Rp 2.622.058.454.556,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pusat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Adapun rincian Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah pada perubahan tahun 2025 tetap sebesar Rp 863.808.302.035,00 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 549.684.302.035,00; Retribusi Daerah sebesar Rp 245.864.000.000,00; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 2.400.000.000,00; dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 65.860.000.000,00.
- Pendapatan Transfer turun sebesar Rp 98.940.135.000,00 atau 6% dari Rp 1.749.699.593.345,00 anggaran APBD tahun 2025 menjadi sebesar Rp 1.650.759.458.345,00.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap sebesar Rp 8.550.559.176,00 berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian target Ringkasan Perubahan Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Ringkasan Perubahan Pendapatan Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.622.058.454.556,00	2.523.118.319.556,00	(98.940.135.000,00)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	863.808.302.035,00	863.808.302.035,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	549.684.302.035,00	549.684.302.035,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	245.864.000.000,00	245.864.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.860.000.000,00	65.860.000.000,00	0,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.749.699.593.345,00	1.650.759.458.345,00	(98.940.135.000,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.713.602.976.000,00	1.614.662.841.000,00	(98.940.135.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.096.617.345,00	36.096.617.345,00	0,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.550.559.176,00	8.550.559.176,00	0,00

Sumber: BKAD, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Penetapan dan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap PD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

7. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.380.667.110.658,85 naik sebesar Rp 516.065.773.726,85 atau 18% dari rencana belanja APBD tahun 2025 sebesar Rp 2.864.601.336.932,00 Anggaran tersebut digunakan untuk :

- 1) Belanja operasi naik sebesar Rp 22.700.143.233,32 atau 3% menjadi Rp 1.884.856.038.808,44 dari belanja awal sebesar Rp 1.862.155.895.575,12;
- 2) Belanja modal naik sebesar Rp 493.365.630.493,53 atau 65% menjadi Rp 1.196.752.824.447,68 dari belanja awal sebesar Rp 703.387.193.954,15;
- 3) Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp 10.975.325.198,73; dan
- 4) Belanja transfer juga tidak mengalami perubahan sebesar Rp sebesar Rp 288.082.922.204,00.

Ringkasan Belanja Kabupaten Belanja Morowali Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Ringkasan Perubahan Belanja Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.864.601.336.932,00	3.380.667.110.658,85	516.065.773.726,85
5,1	BELANJA OPERASI	1.862.155.895.575,12	1.884.856.038.808,44	22.700.143.233,32
5.1.01	Belanja Pegawai	799.726.894.186,04	814.636.977.587,15	14.910.083.401,11

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	2	3	4	5
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	952.549.185.249,08	948.502.926.191,29	(4.046.259.057,79)
5.1.03	Belanja Bunga	1.664.000.000,00	1.664.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.204.833.140,00	80.149.184.140,00	3.944.351.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.010.983.000,00	39.902.950.890,00	7.891.967.890,00
5,2	BELANJA MODAL	703.387.193.954,15	1.196.752.824.447,68	493.365.630.493,53
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.997.982.885,00	146.479.572.625,92	99.481.589.740,92
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.798.782.803,00	140.982.259.332,38	50.183.476.529,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.219.531.596,32	554.930.925.281,55	241.711.393.685,23
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	251.779.836.669,83	351.612.966.557,83	99.833.129.888,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	463.410.000,00	2.619.450.650,00	2.156.040.650,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	127.650.000,00	127.650.000,00	0,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.975.325.198,73	10.975.325.198,73	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.975.325.198,73	10.975.325.198,73	0,00
5,4	BELANJA TRANSFER	288.082.922.204,00	288.082.922.204,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	76.054.830.204,00	76.054.830.204,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	212.028.092.000,00	212.028.092.000,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	(242.542.882.376,00)	(857.548.791.102,85)	(615.005.908.726,85)

Sumber: BKAD, 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp 872.611.409.652,85 meningkat sebesar Rp 615.005.908.726,85 atau 239% dari RKPD sebelum perubahan sebesar Rp 257.605.500.926,00.

Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 15.062.618.550,00.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp 857.548.791.102,85 Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Tabel 3.8
Ringkasan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH			0,00
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	257.605.500.926,00	872.611.409.652,85	615.005.908.726,85
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	257.605.500.926,00	872.611.409.652,85	615.005.908.726,85
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.062.618.550,00	15.062.618.550,00	0,00

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.562.618.550,00	1.562.618.550,00	0,00
	Pembiayaan Netto	242.542.882.376,00	857.548.791.102,85	615.005.908.726,85
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD, 2025



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA. 2025, maka dalam perubahan RKPD 2025 terdapat beberapa perubahan terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

Hasil Pilkada serentak Tahun 2024 menetapkan pasangan Bapak Iksan dan Ibu Iriane Ilyas sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, dimana Visi yang diusung oleh pasangan kepala daerah tersebut sebagaimana termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan”**. Visi tersebut di atas diwujudkan dalam 5 (lima) misi yaitu :

1. Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui transformasi Tata Kelola dan Birokrasi yang melayani

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Point utama dalam misi ini yaitu :

- Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) :

- a. Transparansi; memastikan semua proses pemerintahan terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- b. Akuntabilitas; setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Partisipasi Publik, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) :
 - a. Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan
 - b. Profesionalisme; meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah.
- Birokrasi yang Melayani :
 - a. Pelayanan Publik yang Prima; memberikan layanan yang cepat, tepat dan memuaskan kepada masyarakat
 - b. Responsif; cepat tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan bersih serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Morowali.

2. Misi 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat Berkarakter dan Berbudaya

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter dan berbudaya bertujuan untuk mengembangkan masyarakat Morowali yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, serta memiliki karakter yang kuat dan budaya yang kaya. Point utama dari misi ini

- Kesehatan:
 - a. Kesehatan Fisik; meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat Morowali memiliki tubuh yang sehat.
 - b. Kesehatan Mental; menyediakan dukungan dan layanan kesehatan mental untuk menjaga kesejahteraan psikologis masyarakat.

- Karakter :
 - a. Pendidikan Karakter; mengintegrasikan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan untuk membentuk individu yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
 - b. Etika dan Moral; mendorong nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas
- Budaya :
 - a. Pelestarian Budaya; melestarikan budaya dan mengembangkan budaya lokal agar tetap hidup dan dihargai oleh generasi muda.
 - b. Penghargaan terhadap Keragaman; menghargai dan merayakan keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa.

Dengan fokus aspek-aspek ini diharapkan sumber daya manusia di Kabupaten Morowali dapat berkembang secara holistik menjadi individu yang sehat, berkarakter kuat dan memiliki budaya yang kaya.

3. Misi 3. Memajukan Sarana dan Prasarana Inklusif dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Kepulauan

Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan bertujuan untuk memastikan bahwa semua wilayah baik daratan maupun kepulauan mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan daerah Morowali. Point utama dari misi ini yaitu :

- Sarana dan Prasaran Inklusif :
 - a. Infrastruktur Transportasi; membangun dan meningkatkan jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara untuk memastikan konektivitas yang baik antara wilayah daratan dan kepulauan.
 - b. Aksesibilitas; memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

- c. Ketersediaan sarana publik; menyediakan sarana pelayanan publik yang mudah, terjangkau dan efisien guna menunjang pembangunan di wilayah terpencil dan kepulauan.
- Pemerataan Pembangunan :
 - a. Pembangunan Berkeadilan; mengalokasikan sumber daya secara merata untuk pembangunan di wilayah terpencil dan kurang berkembang.
 - b. Pengembangan Wilayah; mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah yang kurang berkembang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah daratan dan kepulauan.
- Dukungan Pembangunan :
 - a. Fasilitas Publik; membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit dan pusat layanan masyarakat di wilayah daratan dan kepulauan.
 - b. Teknologi dan Komunikasi; membangun fasilitas teknologi informasi guna meningkatkan akses terhadap informasi dan memperlancar komunikasi guna mendukung pembangunan yang inklusif.

Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut diharapkan pembangunan dapat berjalan secara merata dan inklusif sehingga semua wilayah baik daratan maupun kepulauan dapat berkembang secara optimal.

4. Misi 4. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan serta Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan

Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dilakukan terintegrasi, ramah lingkungan dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi. Point utama dari misi ini adalah:

- Pengembangan Sektor Pertanian
 - a. Peningkatan Produksi; meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal, regional,

- nasional serta produktivitas tanaman hortikultura dan perkebunan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Teknologi Pertanian; menggunakan input dan teknologi modern (pertanian dan informasi) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi hasil pertanian dan diversifikasi produk pertanian.
- Pengembangan Sektor Peternakan
 - a. Ketahanan Pangan Asal ternak; meningkatkan produksi ternak spesifik lokasi untuk memastikan ketersediaan pangan asal ternak yang cukup dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
 - b. Nilai Tambah Produk Ternak; mengembangkan produk olahan ternak untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
 - Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan
 - a. Sumber Daya Laut; memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan.
 - b. Sumber Daya di Perairan Umum; memanfaatkan sumber daya pesisir, air payau dan air tawar untuk mengembangkan perikanan budidaya.
 - c. Teknologi Perikanan; menggunakan teknologi penangkapan ikan, budidaya yang ramah lingkungan guna meningkatkan efisiensi dan hasil perikanan serta diversifikasi olahan hasil perikanan.
 - Pengembangan Sektor Pariwisata
 - a. Destinasi Wisata; mengembangkan destinasi wisata lokal untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.
 - b. Promosi Wisata; meningkatkan promosi wisata untuk memperkenalkan potensi wisata daerah.
 - Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan
 - a. Produk Kreatif Lokal; mengembangkan produk kreatif lokal yang unik dan memiliki nilai jual tinggi
 - b. Pelatihan dan Pendampingan; memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha kreatif untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.

Dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor ini diharapkan kemakmuran masyarakat dapat meningkat secara signifikan melalui pemanfaatan potensi lokal dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Misi 5. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Revitalisasi Lingkungan secara Berkelanjutan Berbasis Hilirisasi dan Industrialisasi

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang kuat dan adil dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut beberapa point utama dalam misi ini :

- Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan
 - a. Pertumbuhan Ekonomi; mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Keadilan Ekonomi; memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - a. Pemanfaatan Berkelanjutan; menggunakan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang.
 - b. Konservasi; melindungi dan melestarikan ekosistem alam untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
- Revitalisasi Lingkungan
 - a. Rehabilitasi Ekosistem; memulihkan ekosistem yang rusak akibat aktivitas manusia untuk mengembalikan fungsi alam yang optimal.
 - b. Pengurangan Emisi; mengurangi emisi karbon dan polusi untuk menjaga kualitas udara dan air.
- Hilirisasi dan Industrialisasi
 - a. Pengembangan Industri; mendorong pengembangan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

b. Teknologi dan Inovasi; menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

Dengan fokus pada aspek-aspek ini diharapkan perekonomian dapat tumbuh secara kokoh dan berkeadilan serta lingkungan dapat terjaga dengan baik melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, telah ditetapkan sasaran pembangunan tahun 2025 yang diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Rasio, Tingkat Kemiskinan serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2025

NO.	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN MAKRO MOROWALI (BPS)		TARGET RKPD 2025 NASIONAL	TARGET RKPD 2025 SULTENG	TARGET RKPD 2025 MOROWALI (SEBELUM)	TARGET P-RKPD 2025 MOROWALI (SESUDAH)
		2023	2024				
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	20,34	16,26	5,3 - 5,6	12,72 - 13,28	12,99	12,99
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,84	2,84	4,5 - 5,0	2,25 - 2,94	2,31	2,31 -2,55
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	12,31	11,55	7,0 - 8,0	11,06 - 11,56	11,59	9,86 -11,35
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,81	74,36	-	-	72,75 - 73,00	74,50-74,65
5.	Indeks Gini (Indeks)	0,281	0,275	0,379 - 0,382	0,298 - 0,302	0,265	0,210-0,265

Berdasarkan misi Kabupaten Morowali yang termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali dalam Perubahan RKPD 2025 yaitu :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1 Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	1.1 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC
		1.1.2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	C
			Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	A
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	48,18
			Survei Penilaian Integritas	Predikat	71,86
			Indeks Pembangunan Digital	Indeks	4,99
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68,11
		1.1.2 Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,40
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter dan berbudaya	2.1. Mewujudkan Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Manusia Yang		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,75 - 73,00
		2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan	Indeks Pendidikan	Indeks	68,46

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
	Sehat dan Cerdas	pemerataan Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	59,88	
		2.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,79	
	2.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Nilai Budaya, Ketahanan Keluarga dan Kerukunan Umat Beragama			Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,74	48,74
		2.2.1 Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan Lokal Yang Maju dan Dinamis		Nilai Ketahanan Sosial Budaya		
				Nilai Warisan Budaya		
				Nilai Ekspresi Budaya		
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
		2.2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	0,55
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	79,14
		2.2.3 Meningkatnya Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahragaan		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	68,01
				Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	
				Indeks Kerukunan Umat Beragama		57,75
	2.2.4 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama		Nilai Toleransi	Niali		
			Nilai Kesetaraan	Niali		
		Nilai Kerjasama	Niali			
3 Memajukan (Meningkatkan penyediaan) sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung	3.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan		Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	74,00	
		3.1.1	Meningkatnya Kualitas dan	Indeks Infrastruktur	Indeks	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan	Prasarana Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan		Kuantitas Sarana dan Prasarana Dasar	r Pekerjaan Umum		
				Indeks Infrastruktur Perumahan dan Perumahan	Indeks	
		3.1.2	Meningkatnya Ketersediaan dan Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Laut	Rasio Konektivitas	Rasio	6,31
4. Meningkatkan (Kesejahteraan) kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan	4.1 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan			Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	12,99
				Pendapatan Perkapita (ADHK)	Ribu (Rupiah)	570.117,47
				Tingkat Kemiskinan	Persentase	11,35
		4.1.1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	0,83
		4.1.2	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian	Persentase	24,00
				PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	Persentase	55,75
		4.1.3	Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan dan Agroindustri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	1,35
				Kontribusi sektor agroindustri		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			terhadap PDRB		
		4.1.4 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian Desa	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	44,25
			Indeks Desa	Indeks	0,7286
			Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81,44
	4.2 Menurunnya Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	2,55
		4.2.1 Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase	59,69
5. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi					
	5.1 Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Hilirisasi dan Industrialisasi		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase	21,43
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	Ribu (Rupiah)	40.301,79
		5.1.1 Terwujudnya Usaha/Industri Kecil dan Menengah Sebagai Rantai Pasok Bagi Industri Pengolahan dan Pertambangan	Pertumbuhan Industri Kecil	Persentase	5,47
		5.1.2 Meningkatkan Investasi Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Realisasi Investasi		
	5.2 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	160,90
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,95
		5.2.1 Meningkatkan Ketangguhan	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,37

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		Terhadap Bencana	Angka Kriminalitas	Persen tase	19,00-17,50
		5.2.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Persen tase	66,97
			Indeks Kualitas Udara	Persen tase	83,59
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen tase	92,79
			Penurunan Emis Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen tase	18,49

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025-2029 telah dirumuskan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Program Prioritas dan Penanggung Jawab Program

NO	MISI RPJMD	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappelitbangda
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappelitbangda
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD

NO	MISI RPJMD	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPSTP
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas KOMINFO
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Hukum
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkarakter dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Daerah
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPMP3A
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL
3	Memajukan Sarana dan Prasarana Inklusif dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Kepulauan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas KOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADANUTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan Daerah

NO	MISI RPJMD	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, serta Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMP3A
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMP3A
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMP3A

NO	MISI RPJMD	PROGRAM	OPD PENANGGUNG JAWAB
	sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHD
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DLHD	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		DLHD	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHD	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLHD	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DLHD	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHD	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		DLHD	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		BPBD	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Satpol PP	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Satpol PP	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kecamatan	

4.2. Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA. 2025 dan khusus pada point 3 (tiga) disebutkan bahwa perubahan arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain :

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan.
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim.
- d. Pengendalian inflasi di daerah.
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

4.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025

Terdapat beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Morowali yaitu :

1. Tingkat kemiskinan masih tinggi
2. Masih Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Infrastruktur dasar antar wilayah masih timpang
4. Kualitas layanan kesehatan yang belum optimal
5. Pengembangan sektor pertanian dan perikanan belum optimal

6. Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mengalami penurunan
7. Kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum optimal

Dari permasalahan pembangunan tersebut di atas maka Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan penurunan angka kemiskinan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing
3. Memacu pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
4. Optimalisasi pembangunan sektor pertanian dan perikanan
5. Peningkatan kualitas lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana.

4.2.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2025

Tema pembangunan dibuat untuk memberi arah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan setiap tahun. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan tema pembangunan tahunan Kabupaten Morowali berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil untuk pencapaian target sasaran pembangunan. Tema Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025 adalah : **“Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah”**.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka daerah juga mempunyai kewajiban untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional sehingga dalam penentuan prioritas pembangunan tahunan perlu dilakukan penyelarasan dengan prioritas program nasional maupun provinsi.

Tabel 4.4
Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025		
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025		
NASIONAL	KABUPATEN MOROWALI	
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing	
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Optimalisasi Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan dan Sektor lainnya	
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah	
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing	

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	
NASIONAL	KABUPATEN MOROWALI
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Astacita 1/PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan SDM yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Astacita / PN 2. Menetapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	Mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditas pertanian lainnya	Optimalisasi Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan dan Sektor lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan Daerah
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan Daerah
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan Daerah
			Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informasi

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Astacita 3 / PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro maritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan UMKM
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi dan UMKM
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi dan UMKM

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan UMKM
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
					PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
	Astacita /PN 4. Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi,	Peningkatan SDM yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas		pendidikan yang berdaya saing			
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan Daerah
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan Daerah
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Pendidikan Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Morowali, RS Salabangkapaku, Puskesmas
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinkes KB, RSUD Morowali, RS Salabangkapaku, Puskesmas
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas PEMDES P3A
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas PEMDES P3A
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas PEMDES P3A
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas PEMDES P3A
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas PEMDES P3A

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan Daerah
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan Daerah
		Meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan daya dukung lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamongpraja
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Astacita 5 / PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim dan meningkatkan daya dukung lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Astacita 6/PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Astacita 7 / PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	Peningkatan SDM yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing	NON URUSAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Perangkat Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah Kab. Morowali
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah Kab. Morowali
				SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Morowali

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Morowali
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Morowali
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Morowali
				KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kab. Morowlai

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah Kab. Morowlai
				KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Semua Kecamatan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Semua Kecamatan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Semua Kecamatan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Semua Kecamatan

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					PROGRAAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
	Astacita 8 / PN 8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan SDM yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Semua Kecamatan
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamongpraja

NO	ASTA CITA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

4.3. Inovasi daerah

Inovasi merupakan motor perkembangan ekonomi yang berkesinambungan. Kini kita hidup di area yang mewajibkan inovasi, dimana tantangan untuk merespon perubahan bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 1942 Joseph Schumper menyebutkan Creative Destruction yang menggambarkan penyegaran ekonomi dengan cara menghasilkan hal baru berupa berbagai teknologi yang inovatif. Ada berbagai definisi tentang inovasi yang kesemuanya tidak terlepas dari isu “Kebaruan”. Dilihat dari peran pemerintah dalam meningkatkan inovasi berupa produk-produk unggulan daerah, salah satunya di bidang pelayanan publik. Istilah inovasi berasal dari kata Latin ‘innovare’ yang merujuk pada penggunaan cara-cara baru untuk menghasilkan nilai baru yang lebih baik dan efektif dalam meningkatkan kinerja suatu individu atau organisasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebut inovasi sebagai hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Sementara itu berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangal yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan ada ke dalam produk atau proses produksi.

Dalam konteks pelayanan publik, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3024 Tahun 2014 Tentang Inovasi Pelayanan Publik dijelaskan bahwa Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal

dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak adanya sesuatu, kemudian diadakan suatu gagasan atau praktik yang baru. Inovasi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Di Kabupaten Morowali, setidaknya terdapat 23 jenis inovasi yang sebagian besar sudah berada dalam dalam tahap penerapan. Inovasi ini dijalankan oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan terdapat satu OPD yang memiliki lebih dari satu inovasi. Berikut beberapa bentuk inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar :

Tabel 4.6
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Morowali

NO	NAMA OPD	NAMA INOVASI	TAHAPAN INOVASI	WAKTU UJI COBA INOVASI DAERAH	WAKTU PENERAPAN INOVASI DAERAH	KET.
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ASLI, PELAN, TAHAN LAMA (Aspal Lawele untuk Inovasi Penanganan Jalan, Mempertahankan Layanan Mantap)	Penerapan	11-03-2021	08-06-2021	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KEMILAU (Ketersediaan Air Minum di Kepulauan)	Penerapan	03-01-2021	06-01-2021	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SINTETIS (Sarana Integrasi Informasi Sistematis)	Penerapan	25-02-2021	25-05-2021	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Komunitas Masyarakat Peduli Jalan (KOMPLAN)	Penerapan	21-02-2021	21/05/2021	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PADI (Pengelolaan Air Daerah Irigasi)	Penerapan	01-03-2021	07-07-2021	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	GELOMBANG (Gerakan Menahan Ombak Saat Air Pasang)	Penerapan	09/02/2021	22/07/2022	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	JEBOL PIN PBG (Jemputan Bola Potensi Income PBG)	Penerapan	08/04/2021	22/11/2022	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KOMPUTER (Komunitas Masyarakat Peduli Tata Ruang)	Penerapan	07/04/2021	23/08/2022	
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SALAMAN (Sanitasi Layak dan Aman)	Penerapan	10/02/2021	14/04/2022	

NO	NAMA OPD	NAMA INOVASI	TAHAPAN INOVASI	WAKTU UJI COBA INOVASI DAERAH	WAKTU PENERAPAN INOVASI DAERAH	KET.
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SATU PEDANG (Satuan Tugas Peduli Tata Ruang)	Penerapan	13/05/2021	14/07/2022	
11	Dinas Lingkungan Hidup	MESA'U (Merubah Sampah Menghasilkan Uang)	Penerapan	01-01-2019	01-01-2020	
12	Dinas Lingkungan Hidup	MOBASA (Morowali Bebas Sampah)	Penerapan	01-01-2019	01-01-2021	
13	Dinas Lingkungan Hidup	PELOPOR BERIMAN (Pengangkut Operasional Motor Bersihkan Sampah Pemukiman)	Penerapan	01-01-2019	01-01-2021	
14	Dinas Sosial	KAMI JAKUP DAN TASIA (Kartu Jaminan Hidup Janda Kurang Mampu Disabilitas Serta Lansia)	Penerapan	04/01/2021	01/03/2021	
15	Dinas Sosial	SANTRI SEJAHTERA	Penerapan	02/01/2022	20/03/2022	
16	Dinas Sosial	SAFAAT (Satu Data Penerima Manfaat)	Penerapan	16/06/2021	18/08/2021	
17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SMART KGB	Penerapan	10/06/2020	11/01/2021	
18	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SIPEKIN (Sistem Informasi Pelaporan Kinerja)	Penerapan	12/01/2022	22/02/2022	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

BAB V RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V

RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Rencana program prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2024 dan triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang nantinya akan diturunkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali tahun 2025-2029. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2025 ini diharapkan telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Morowali dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	TOTAL RINCIAN
1	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	268.384.832.015,73
2	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	465.152.610.859,00
3	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	270.036.520.333,78
4	1.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.824.559.327,00
5	1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamongpraja	31.824.833.942,00
6	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	30.659.056.679,00
7	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah	11.214.822.050,00
8	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	78.911.775.665,60
9	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	29.630.980.641,00
10	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	8.397.086.291,00

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	TOTAL RINCIAN
11	2.13.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.014.997.248,00
12	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan Daerah	35.571.896.375,69
13	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah	21.449.148.837,40
14	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	10.658.014.593,00
15	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.969.619.962,00
16	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	119.037.027.681,20
17	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan Daerah	7.707.325.287,00
18	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan Daerah	45.122.468.076,00
19	3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	86.251.809.896,75
20	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	58.747.270.646,00
21	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	29.597.277.566,00
22	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bahodopi	8.050.509.654,00
23	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bumi Raya	10.369.655.157,00
24	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Bungku Barat	8.723.930.462,00
25	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bungku Pesisir	8.224.432.686,00
26	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Bungku Selatan	12.541.572.819,00
27	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Bungku Tengah	14.242.684.032,00
28	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Bungku Timur	5.326.703.072,00
29	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Menui Kepulauan	13.673.354.440,00
30	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wita Ponda	7.025.595.826,60
31	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	17.009.885.513,00

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	TOTAL RINCIAN
32	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	24.796.126.123,00
33	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	407.235.897.557,31
34	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	49.770.491.596,00
35	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.242.475.889,00
36	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	-
37	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Administrasi Pembangunan	2.031.864.550,00
38	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1.333.136.660,00
39	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum	3.467.951.530,00
40	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Kesejahteraan Rakyat	98.801.627.070,00
41	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Organisasi	1.900.102.706,00
42	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Tata Pemerintahan	1.618.046.330,00
43	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.199.559.230,00
44	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	3.152.731.850,00
45	4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Umum	74.555.914.044,00
46	7.01.0.00.0.00.06.0001	Kelurahan Bungi	1.032.249.715,00
47	7.01.0.00.0.00.06.0002	Kelurahan Lamberea	1.028.022.396,00
48	7.01.0.00.0.00.06.0003	Kelurahan Matano	1.029.528.461,00
49	7.01.0.00.0.00.06.0004	Kelurahan Marsaole	1.038.349.726,00
50	7.01.0.00.0.00.06.0005	Kelurahan Tofoiso	1.082.707.854,00
51	7.01.0.00.0.00.06.0006	Kelurahan Mendui	1.233.093.584,00
52	7.01.0.00.0.00.08.0007	Kelurahan Ulunambo	1.179.403.554,00
53	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	605.630.711.361,80
54	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sombori Kepulauan	4.723.130.065,00

NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	TOTAL RINCIAN
55	1.02.2.14.0.00.01.0012	Rumah Sakit Umum Daerah Morowali	218.171.721.723,99
56	1.02.2.14.0.00.01.0013	Rumah Sakit Salabangkapaku	51.120.397.158,00
57	1.02.2.14.0.00.01.0014	Puskesmas Ulunambo	4.296.585.832,00
58	1.02.2.14.0.00.01.0015	Puskesmas Kaleroang	3.409.570.524,00
59	1.02.2.14.0.00.01.0016	Puskesmas Lafeu	2.520.571.336,00
60	1.02.2.14.0.00.01.0017	Puskesmas Bahodopi	5.707.336.691,00
61	1.02.2.14.0.00.01.0018	Puskesmas Bahomotefe	2.737.393.616,00
62	1.02.2.14.0.00.01.0019	Puskesmas Bungku	3.589.710.585,00
63	1.02.2.14.0.00.01.0020	Puskesmas Wosu	3.250.331.265,00
64	1.02.2.14.0.00.01.0021	Puskesmas Bahonsuai	2.699.313.984,00
65	1.02.2.14.0.00.01.0022	Puskesmas Laantula Jaya	3.756.388.230,00
66	1.02.2.14.0.00.01.0023	Puskesmas Tanjung Harapan	2.852.759.931,00
67	1.02.2.14.0.00.01.0024	Puskesmas Fonuasingko	2.119.650.296,00
JUMLAH			3.380.667.110.658,85

Rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Morowali tahun 2025 dapat dilihat pada Buku II lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ini.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam empat aspek, yaitu:

1. Aspek Geografi Dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
3. Aspek Daya saing Daerah;
4. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapny, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Matriks Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2025

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1 Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	1.1 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	1.1.2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC
			Indeks Pelayanan Publik	Predikat	C
			Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	A
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	48,18
			Survei Penilaian Integritas	Predikat	71,86

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			Indeks Pembangunan Digital	Indeks	4,99	
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68,11	
		1.1.2 Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,40	
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter dan berbudaya	2.1. Mewujudkan Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Manusia Yang Sehat dan Cerdas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,75 - 73,00	
		2.1.1 Meningkatkan Kualitas dan pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	68,46	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	59,88	
		2.1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,79	
	2.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Nilai Budaya, Ketahanan Keluarga dan Kerukunan Umat Beragama			Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,74	48,74
		2.2.1 Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan Lokal Yang Maju dan Dinamis		Nilai Ketahanan Sosial Budaya		
				Nilai Warisan Budaya		
				Nilai Ekspresi Budaya		
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
		2.2.2 Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	0,55
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	79,14	
2.2.3 Meningkatkan Peran Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	68,01			

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	
		dan Daya Saing Keolahragaan	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks		
			Indeks Kerukunan Umat Beragama		57,75	
		2.2.4 Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama	Nilai Toleransi	Niali		
			Nilai Kesetaraan	Niali		
			Nilai Kerjasama	Niali		
3 Memajukan (Meningkatkan penyediaan) sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan	3.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	74,00	
		3.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Dasar	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	
				Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	
		3.1.2	Meningkatnya Ketersediaan dan Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Laut	Rasio Konektivitas	Rasio	6,31
4. Meningkatkan (Kesejahteraan) kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan	4.1 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan		Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	12,99	
			Pendapatan Perkapita (ADHK)	Ribu (Rupiah)	570.117,47	
			Tingkat Kemiskinan	Persentase	11,35	
		4.1.1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	0,83
		4.1.2	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM,	Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian	Persentase	24,00

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		pariwisata dan ekonomi kreatif	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	Persentase	55,75
		4.1.3 Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan dan Agroindustri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	1,35
			Kontribusi sektor agroindustri terhadap PDRB		
		4.1.4 Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian Desa	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	44,25
			Indeks Desa	Indeks	0,7286
			Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81,44
	4.2 Menurunnya Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	2,55
		4.2.1 Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase	59,69
5. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi					
	5.1 Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Hilirisasi dan Industrialisasi		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase	21,43
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	Ribu (Rupiah)	40.301,79
		5.1.1 Terwujudnya Usaha/Industri Kecil dan Menengah Sebagai Rantai Pasok Bagi Industri Pengolahan dan Pertambangan	Pertumbuhan Industri Kecil	Persentase	5,47

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		5.1.2 Meningkatkan Investasi Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Realisasi Investasi		
	5.2 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	160,90
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,95
		5.2.1 Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,37
			Angka Kriminalitas	Persentase	19,00-17,50
		5.2.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Persentase	66,97
			Indeks Kualitas Udara	Persentase	83,59
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persentase	92,79
		Penurunan Emis Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase	18,49	

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.1 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

Indikator kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali secara umum dibagi dalam empat aspek, yaitu :

Tabel 6.2
Matriks Indikator dan Target Kinerja Geografi dan Demografi
Kabupaten Morowali Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	
1,1	Ketahanan Energi,Air dan Kemandirian Pangan	
1	Indeks Ketahanan Pangan	82,21
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	7,20
3	Konsumsi Listrik Perkapita	378,82
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	85,58
5	Kapasitas Air Baku	0.3 - 0.6
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	32,53
1,2	Kualitas Lingkungan Hidup	
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	75,00
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	10,02
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	73,21
4	Persentase timbulan sampah yang dikelola (daur ulang)	10,02
5	Proporsi Limbah B3 yang dikelola	18-25
1,3	Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim	
1	Penurunan Insensitas Emisi GRK	18,49
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)	166,32
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,37
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,95
1,4	Demografi	
1	Rasio Penduduk	121,9

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
2	Kepadatan Penduduk	32,18
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,6
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
2,1	Kesejahteraan Ekonomi	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,99
2	Tingkat Kemiskinan	11,35
3	PDRB Per Kapita (ADHK)	1043311,36
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,55
5	Indeks Gini	0.274
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	28,94
7	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	74,50-74,25
2,2	Kesehatan untuk Semua	
1	Usia Harapan Hidup	69,81
2	Prevalensi Stunting	19,64
3	Angka Kematian Ibu	210
4	Angka Kematian Anak	
*	Angka Kematian Bayi	7,88
*	Angka Kematian Balita	9,27
5	Cakupan penemuan kasus TB (treatment coverage)	91,04
6	Angka Keberhasilan pengobatan TB (treatment success rate)	91,00
7	Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional	100
8	Indeks Keluarga Sehat	0,45
9	Indeks Kesehatan	0,81
2,3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,37
2	Harapan Lama Sekolah	13,38
3	Angka Literasi/Numerasi :	

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
*	Literasi Membaca SD	55,60
*	Literasi Membaca SLTP	68,08
*	Numerasi SD	42,74
*	Numerasi SLTP	63,50
4	APS PAUD	75,00
5	APS SD/SMP	98,00
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,57
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	76,43
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	58,71
9	Indeks Literasi Digital	45,03
10	Indeks Pendidikan	68,46
2,4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	86,01
2	Rumah Layak Huni	83,50
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bersih	92,20
4	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	64,44
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (100%)	7,16
2,5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	57,75
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,74
3	Indeks Kepuasan Infrastruktur	64,26
4	Persentase Jalan Kondisi Mantap	40,26
5	Persentase Akses Jaringan Internet	86,61
2,6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif	
1	Indeks Perlindungan Anak	79,14

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,9
3	Indeks Pembangunan Keluarga	73,14
4	Indeks Ketimpangan Gender	0,467
5	Indeks Pemberdayaan Gender	67,5
6	TPAK Perempuan	38,07
7	Indeks Pembangunan Gender	0,55
8	Indeks Pembangunan Pemuda	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH	
3,1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	
1	Angka Ketergantungan	0,456
3,2	Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi	
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	0,456
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	21,43
3	Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum	15,72
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	0,12
5	Rasio Kewirausahaan	0,19
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,45
7	Indeks Inovasi Daerah	48,18
8	Persentase UMKM yang naik kelas	24,00
3,3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	
1	Indeks Ekonomi Hijau	72,78
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesai	40,30
3	porosi EBT dalam Bauran Energi Primer	10,00
3,4	Transformasi Digital	
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,99
3,5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
1	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	55,75

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	40.301,79
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)	83.082,58
4	Ekspor Barang dan Jasa	55.213,10
3,6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	0,079
2	Presentase Desa Mandiri	27,78
	Indeks Desa	0,74
3,7	Stabilitas Ekonomi Makro	
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,34
2	Tingkat Inflasi	3,00
3	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi	46,40
4	Pertumbuhan Industri	5,47
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM	
4,1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
1	Indeks Reformasi Hukum	87,40
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,25
3	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
4	Indeks Pelayanan Publik	C
5	Indeks Integritas Nasional	73,56
6	Nilai SAKIP	B
4,2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	
1	Persentase Penegakan Perda	75
2	Persentase Capaian Aksi HAM	85
3	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi
4	Indeks Rasa Aman	77,85

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	72,21
6	Indeks Profesionalitas ASN	68,11
4,3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	
1	Indeks Daya Saing Daerah	2,99
2	Nilai Maturitas SPIP	3.290
3	Nilai Kapabilits APIP	Level 3
4	Survei Penilaian Integritas	71,86
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A
	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	
A	Urusan Pemerintahan Wajib	
1	Wajib Pelayanan Dasar	
1.1	Pendidikan	
1	Skor Literasi/Numerasi SD/SMP*	
-	Skor Literasi SD	59,79
-	Skor Literasi SMP	67,71
-	Numerasi SD	53,06
-	Numerasi SMP	61,31
3	Harapan Lama Sekolah	13,38
4	Rata-Rata Lama Sekolah	9,37
5	Indeks Pendidikan	68,46
6	Angka Putus Sekolah	
*	APS SD	0,01
*	APS SMP	0,01
*	APS SMA	0,01
7	Angka Melek Huruf	99,27
8	Akreditasi Sekolah di Kabupaten Morowali	
*	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30,50

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
	Pendidikan Dasar (SD/MI)	95,14
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	98,12
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	90,85
9	Angka Partisipasi Kasar	
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	107,45
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	103,78
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	97,89
10	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	100
11	Angka Partisipasi Murni	
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	95,57
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	78,98
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	80,14
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	99,34
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	95,47
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	93,29
13	Angka Kelulusan	
*	SD	100
*	SMP	100
*	SMA	100
14	Angka Yang Melanjutkan	
*	SD	100
*	SMP	100
*	SMA	100
15	Rasio Ketersediaan Sekolah	
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	1 : 95
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	1 : 175
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	1 : 200
16	Rasio Guru/Murid Sekolah	

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	10,94
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	12,40
17	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah	
*	Pendidikan Anak Usia Dini (SD/MI)	1 : 14
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	1 : 13
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	1 : 18
18	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	98,03
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	91,69
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,34
21	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,47
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
1.2	Kesehatan	
1	Umur Harapan Hidup	69,81
2	Prevalensi Stunting	19,64
3	Indeks Kesehatan	0,81
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	7,88
5	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	9,27
6	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	7,2
7	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	210

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100
9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	2,6
10	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,232
11	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,016
12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,383
13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	6,50
14	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100
16	Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak	100
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	91,04
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	314,21
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100
20	Penderita Diare Yang Ditangani	100
21	Angka Kejadian Malaria	6,38
22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0,02
23	Cakupan Puskesmas	100
24	Cakupan Pembantu Puskesmas	20,00
25	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	85,00
26	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	2,21
27	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
28	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
29	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
30	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
31	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
32	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
33	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
34	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
35	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
36	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
37	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
38	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	64,26
2	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	50,00

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,25
4	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,0057
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	30
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	78
7	Rasio Jaringan Irigasi	0,90
8	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	90,62
9	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk	2,5
10	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	54,19
11	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	60,06
12	rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	87,24
13	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	85,58
14	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,74
15	rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	1,82
16	tingkat kemantapan jalan	35,26

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
17	rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	9,64
18	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	86,68
2	Persentase kawasan kumuh yang ditata	100
3	Rasio Rumah Layak Huni	83,50
4	capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
5	capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100
6	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100
7	penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13,32
8	persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	98,13
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
	Pol PP	
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	80
2	Angka Kriminalitas	19,00-17,50
3	Persentase jumlah pelanggaran K3 yang tertangani	100

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit
	Penanggulangan Bencana	
1	Indeks Resiko Bencana	166,32
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	173,50
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	14,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
1.6	Sosial	
1	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya	2,84
2	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	61,45
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	53.911
4	Persentase PMKS yang tertangani	100

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
5	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100
7	Korban bencana alam (Jiwa/KK)	0
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
2.7	Tenaga Kerja	
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	179,71
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,55
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,45
4	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang)	35,00
5	Rasio Lulusan S1/S2/S3	16,00
6	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	20

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
7	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60
8	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	15,09
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	62,72
10	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	40,66
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0,55
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,467
3	Indeks Pemberdayaan Gender	67,5
4	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan dan swasta	25,76
5	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama
6	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	0,12
7	Rasio KDRT	0,10
8	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	39,00
9	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	1,62
10	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	0,95
11	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	1,12
12	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	33,33
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
14	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,021
2.9	Pangan	
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,21
2	Skor Pola Harapan Pangan (SPPH)	85,20
3	Ketersediaan Pangan Utama	271,85
4	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	
	Energi (Kilo Kal)	2.100
	Protein Perkaapita (Gram)	65,12
6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	77,95
2,1	Pertanahan	
1	Persentase Fasilitas Umum/Pemerintah yang memiliki status lahan yang tetap	75%
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100
3	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100
4	persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100
5	persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	57,72
6	persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	100

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
2.11	Lingkungan Hidup	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,95
2	Indeks Kualitas Air	66,97
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	92,79
4	Indeks Kualitas Udara	83,59
5	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali	Ada
6	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	1.185.211,33
7	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali	Ada
8	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	100
10	Penetapan Hak MHA	100
11	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Tidak
12	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Ada
13	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Ada
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	100
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	100
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	100
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100
6	Perekaman KTP elektronik	100

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
7	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100
8	Kepemilikan akta kelahiran	100
9	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	67
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1	Indeks Desa	0,74
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	144
4	Persentase PKK Aktif	100
5	Persentase Posyandu aktif	100
6	Persentase pengentasan desa tertinggal	100
7	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	27,78
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61
2	Angka Stunting (SSGI)	22,62
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,6
4	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	88,89
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	59,57
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,9
7	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100
8	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,01
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,01

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,01
2,2	Perhubungan	
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	19.000
2	Rasio Ijin Trayek	13,00
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10,00
4	Pemasangan Rambu-Rambu	60
5	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,35
6	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun	
	Angkutan Laut	
	Jumlah Penumpang Turun	9.700
	Jumlah Penumpang Naik	1.800
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.000
	Jumlah barang muat (ton)	510.000
	Angkutan Udara	
	Jumlah Penumpang Datang	32.000
	Jumlah Penumpang Berangkat	22.000
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	290.000
	Jumlah barang muat (ton)	100.000
7	rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,53
8	kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,43
2,2	Komunikasi dan Informatika	
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	51-75
2	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	3,25
3	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Layanan	3,73
4	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen	1,19

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
5	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Tata Kelola	2,52
6	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Kebijakan	2,92
7	Akses Jaringan Komunikasi	88,5
8	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	83,71
9	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	73,48
10	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
12	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100
2,2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1	Pendapatan Perkapita	570.117,47
2	Persentase Koperasi yang berkualitas	16,67
3	Rata-Rata Omzet UMKM	2.000.000,00
4	Persentase Koperasi Aktif	44,2
5	rasio Volume usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,02
6	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	22,41
7	persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	0,49
2,2	Penanaman Modal	
1	Persentase Peningkatan Investasi	4,00
2	Nilai Investasi	122.281.105,44
3	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	75

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	122.281.105,44
5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	28,36
2,2	Kepemudaan dan Olahraga	
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	68,01
2	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (Jumlah Organisasi Pemuda)	59,12
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,87
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	22,16
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	7
2,2	Statistik	
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,63
2	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada
3	Buku Kabupaten dalam angka	Ada
4	Buku "PDRB"	Ada
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
2,2	Persandian	
1	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	3,25
2	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Layanan	3,73

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
3	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen	1,19
4	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Tata Kelola	2,52
5	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Kebijakan	2,92
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100
2,2	Kebudayaan	
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	48,74
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	90,29
2,2	Perpustakaan	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	58,71
2	Persentase Perpustakaan ber Standar Norma Prosedur (SNP)	100
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	5000
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	62,66
2,2	Kearsipan	
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	40,99
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	100
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
3,3	Kelautan dan Perikanan	
1	Nilai Tukar Nelayan	106
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	93,49
3	Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	0,83
4	Produksi Perikanan (ton)	
	Produksi Perikanan Laut	34.350
	Produksi Perikanan Darat	3.000
5	Produksi Perikanan Budidaya	2.500
6	Konsumsi Ikan	66,36
7	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	0,4
3,3	Pariwisata	
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi , Makan, Minum	55,75
2	Jumlah Kunjungan Wisata	5000
3	Lama Kunjungan Wisata	3 hari
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	80
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	80
6	Tingkat hunian akomodasi	75
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,09
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,05
3.27	Pertanian	
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	105
2	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	2,00

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	
	Padi	4,60
	Jagung	23,00
	Ubi Jalar	203,95
	Ubi Kayu	290,69
	Kacang Tanah	10,77
	Kacang Kedelai	20,82
4	Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	
	Padi	42.000,00
	Jagung	2.000,00
	Ubi Jalar	800,00
	Ubi Kayu	4.200,00
	Kacang Tanah	60,00
	Kacang Kedelai	130,00
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	88,29
3,3	Perdagangan	
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1,35
2	Net Ekspor Barang Dan Jasa (ADHK)	55.213,10
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	100
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100
3,3	Perindustrian	

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	72,05
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	5,2
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada
3,3	Transmigrasi	
1	Persentase penduduk miskin di Kawasan transmigrasi yang di Bina	50
4	Unsur Pendukung	
4,1	Sekretariat Daerah	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
2	Nilai Sakip	B
3	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	0

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
4,2	Sekretariat DPRD	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	98,23
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada
5	Unsur Penunjang	
5,1	Perencanaan	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	61- 70
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
5,2	Keuangan	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A
2	Indeks Penyerapan Anggaran	15

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
3	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	12
4	Indeks Opini BPK atas LKPD	15
5	Persentase SILPA Terhadap APBD	10
6	Penetapan APBD	Tepat waktu
7	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	10
8	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	
*	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	12,85
*	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1.188.897,08
*	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	2,39
*	Total Kredit/PDRB (%)	2,39
	Inklusi Keuangan (%)	50,00
9	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15,18
10	Rasio PAD	37,59
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
5,3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
1	Indeks Profesionalitas ASN	68,11
2	Presentase disiplin ASN	100
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,11
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,69
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	25,33
5.5	Penelitian dan Pengembangan	
1	Indeks Inovasi Daerah	48,18

NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	2	3
6	Unsur Pengawasan	
6,1	Inspektorat	
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,29
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
3	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,86
7	Unsur Kewilayahan	
7.1	Kecamatan	
1	Angka Kriminalitas	19,00-17,50
8	Unsur Pemerintahan Umum	
8,1	Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	57,75
2	Indeks Demokrasi Indonesia	60-80



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

BAB VII PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

Bab Penutup Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2025 terdiri dari dua (2) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Perubahan RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024–2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dokumen perencanaan yang secara hierarkhis lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen di bawahnya secara operasional. Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Morowali berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD. Adapun fungsi Perubahan RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi Perubahan RAPBD untuk memastikan Perubahan APBD telah disusun berlandaskan pada Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka Perubahan RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Selanjutnya untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut tata cara pengendalian tersebut disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi OPD pada tata cara pengendalian ini menjadi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing OPD agar menyempurnakan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.
2. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Perubahan RKPD Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang nantinya akan diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembanguna Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029.

2. Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam Perubahan RKPD 2025 yaitu : **“Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah”**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif. Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:
 1. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan
 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, mutu layanan kesehatan dan pendidikan yang berdaya saing;
 3. Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasara untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah;
 4. Optimalisasi Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan;
 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.;

Pada akhirnya, untuk melaksanakan seluruh prioritas yang telah ditetapkan tersebut diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI MOROWALI,

ttd.


IKSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005